

RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2010 - 2014



"Melayani Semua dengan Amanah"

VISI
 MISI 5K
 MOTTO
 TUJUAN STRATEGIS
 STRATEGI
 ARAH KEBIJAKAN
 PROGRAM

VISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010-2014
 “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “

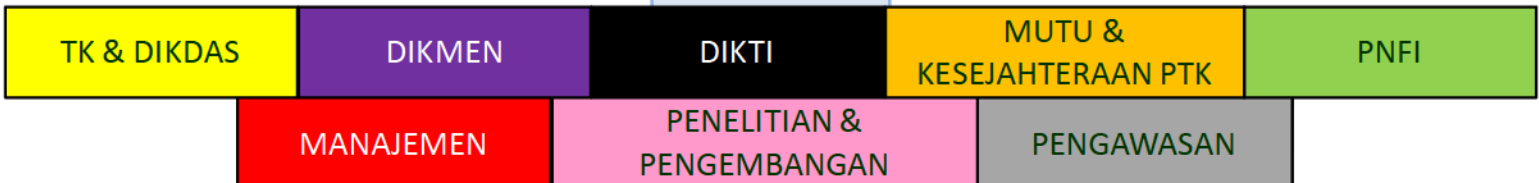
MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010 - 2014 (MISI 5K)
 Meningkatkan **Ketersediaan** Layanan Pendidikan
 Memperluas **Keterjangkauan** Layanan Pendidikan
 Meningkatkan **Kualitas/Mutu dan Relevansi** Layanan Pendidikan
 Mewujudkan **Kesetaraan** dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
 Menjamin **Kepastian** Memperoleh Layanan Pendidikan

“Melayani Semua dengan Amanah”

Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Berkualitas	Tersedia, terjangkau, dan Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Berkualitas dan Relevan	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Berkualitas, Relevan, dan Berdaya Saing Internasional	Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan	Tersedianya Sistem Tata Kelola yang Handal
---	---	---	--	--	--

★ Peningkatan Kompetensi Pendidik	★ Penguatan Manajemen Satuan Pendidikan	★ Penyempurnaan Sistem Pembelajaran	★ Penyediaan Sarana Dan Prasarana	★ Subsidi Untuk Pendidikan Formal	★ Subsidi PNFI
★ Data & Informasi Serta Akreditasi Pendidikan	★ Penataan Struktur Organisasi	★ Penguatan Akuntabilitas	★ Pengelolaan Aset BMN	★ Penguatan Sistem Pengawasan	

SERTIFIKASI & KUALIFIKASI GURU	PENINGKATAN MUTU LPTK & LULUSANNYA	PEMBERDAYAAN KEPSEK & PENGAWAS SEKOLAH	PENERAPAN METODOLOGI PENDAKHLAK MULLA & KARAKTER BANGSA	METODologi/PEND. YG MEMBANGUN MANUSIA BERJIMA KREATIF, INOVATIF, SPORTIF & WIRUSAHA	KETERPADUAN SISTEM EVALUASI PENDIDIKAN	PENGUATAN & PERLUASAN PEMANFAATAN TIK	PENYEDIAAN BUKU TEKS MURAH	RASIONALISASI PENDANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA	PENGUATAN DAN PERLUASAN PNFI	REFORMASI BIROKRASI	KOORDINASI ANTAR KILSERTA PUSAT & DAERAH	AKSELERASI PEMBANGUNAN PEND. DI DAERAH PERBATASAN, TERTINGGAL & BENCANA	PENYELARASAN PENDIDIKAN DENGAN KEBUTUHAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--	---------------------------------------	----------------------------	--	---	------------------------------	---------------------	--	---	---



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010--2014 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010--2014.

Renstra Kemendiknas 2010-2014 mengacu pada visi RPJMN 2010-2014 yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; arahan Presiden untuk memperhatikan aspek *change and continuity*, *de-bottlenecking*, dan *enhancement* program pembangunan pendidikan; serta Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005--2025 yang telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005--2009), penguatan pelayanan (2010--2015), penguatan daya saing regional (2015--2020), dan penguatan daya saing internasional (2020--2025).

Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2010--2014 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan hingga saat ini. Renstra Kemendiknas disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di pusat dan daerah, serta partisipasi seluruh pejabat Kemendiknas.

Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 merupakan dasar dan pedoman bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan sebagai acuan bagi SKPD Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun (1) Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Kerja (Renja); (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan Nasional; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Kementerian Pendidikan Nasional serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Jakarta, 27 Januari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MOHAMMAD NUH



DAFTAR ISI
RENSTRA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2010–2014

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Gambar.....	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Istilah dan Singkatan (<i>Glossary</i>)	vii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional.....	2
1.3 Paradigma Pendidikan	3
1.4 Landasan Hukum.....	5
1.5 Pilar-Pilar Strategis	5
BAB II Kondisi Umum Pendidikan	
2.1 Analisis Kondisi Internal Lingkungan Pendidikan	7
2.2 Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan.....	13
2.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan 2010-2014.....	15
BAB III Visi ,Misi,dan Tujuan Kementerian Pendidikan Nasional	
3.1 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional.....	17
3.2 Tata Nilai Kemendiknas	19
3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010—2014	19
BAB IV Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014	
4.1 Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010--2014.....	23
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014	39
BAB V Program Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014	
5.1 Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional	51
5.2 Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota.....	52
5.3 Pengelompokan Program.....	53
5.4 Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	54

5.5 Program Pendidikan Menengah	55
5.6 Program Pendidikan Tinggi	57
5.7 Program Pendidikan Nonformal dan Informal.....	59
5.8 Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	61
5.9 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas	63
5.10 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendiknas	65
5.11 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.....	66
BAB VI Kerangka Implementasi	
6.1 Strategi Pendanaan Pendidikan	69
6.2 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal	73
6.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi	74
6.4 Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu.....	77
Lampiran	
Lampiran A	Daftar permasalahan dan tantangan
Lampiran B	Daftar Program, Kegiatan, Indikator, dan Proyeksi Anggaran
SALINAN PERATURAN	
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia	
Nomor 2 Tahun 2010	
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Kerangka Pikir Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T1	25
Gambar 4.2	Kerangka Pikir Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T2	27
Gambar 4.3	Kerangka Pikir Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T3	30
Gambar 4.4	Kerangka Pikir Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T4	33
Gambar 4.5	Kerangka Pikir Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T5	35
Gambar 4.6	Kerangka Pikir Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis T6	37
Gambar 5.1	Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan	52
Gambar 6.1	Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Triwulanan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pendidikan	76
Gambar 6.2	Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas	78



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian PAUD Tahun 2004 – 2008	7
Tabel 2.2	Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2004 – 2008	8
Tabel 2.3	Capaian Pendidikan Menengah Tahun 2004 – 2008	10
Tabel 2.4	Capaian Pendidikan Tinggi Tahun 2004 – 2008	11
Tabel 2.5	Capaian Akses dan Mutu Pendidikan Jenjang Pendidikan Non Formal pada Tahun 2004 – 2008	12
Tabel 2.6	Capaian Tata Kelola Pendidikan pada Tahun 2004 – 2008	12
Tabel 3.1	Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif dan Kompetitif	17
Tabel 4.1	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1	24
Tabel 4.2	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2	28
Tabel 4.3	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3	31
Tabel 4.4	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T4	32
Tabel 4.5	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5	34
Tabel 4.6	Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6	36
Tabel 4.7	APK Gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi Tahun 2009-2014	38
Tabel 4.8	Rumusan Strategi Umum	39
Tabel 4.9	Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan	39
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan TK dan Dasar	54
Tabel 5.2	Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Menengah	56
Tabel 5.3	Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Tinggi	58
Tabel 5.4	Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Nonformal dan Informal	60
Tabel 5.5	Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	62
Tabel 5.6	Indikator Kinerja Utama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas	64
Tabel 5.7	Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendiknas	65
Tabel 5.8	Indikator Kinerja Utama Program Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas	67
Tabel 6.1	Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah	70
Tabel 6.2	Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat	70
Tabel 6.3	Perkiraan Penerimaan dan Anggaran Pendidikan	73

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (GLOSSARY)

A

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	=	Angka Partisipasi Kasar
APM	=	Angka Partisipasi Murni
APS	=	Angka Partisipasi Sekolah
ASEAN	=	<i>Assosiation of South East Asia Nations</i>

B

BAN	=	Badan Akreditasi Nasional
BAN-PNF	=	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal
BAN-PT	=	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
BAN-SM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah
BANS/BANM	=	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAPPENAS	=	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BHP	=	Badan Hukum Pendidikan
BHPP	=	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah
BHPPD	=	Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah
BHPM	=	Badan Hukum Pendidikan Masyarakat
BHP Penyelenggara	=	Badan Hukum Pendidikan Penyelenggaran
BMN K/L	=	Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga
BKM	=	Bantuan Khusus Murid
BOP	=	Biaya Operasional Penyelenggara
BOS	=	Bantuan Operasional Sekolah
BOMM	=	Bantuan Operasional Manajemen Mutu
BPK	=	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	=	Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
BPKP	=	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPPNFI	=	Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
BSNP	=	Badan Standar Nasional Pendidikan

C

CPD	=	<i>Continuing Professional Development</i> atau Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPB)
CTL	=	<i>Contextual Teaching and Learning</i> (Pembelajaran Kontekstual)

D

D4	=	Diploma 4
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DBH	=	Dana Bagi Hasil
Dekonsentrasi	=	Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat
Kemendiknas	=	Kementerian Pendidikan Nasional

Diklatpim	= Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Ditjen	= Direktorat Jenderal
DKI	= Daerah Khusus Ibukota
DN	= Dalam Negeri
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
Distance Learning	= Pembelajaran Jarak Jauh
DSS	= <i>Decision Support System</i>

E

EDI	= <i>Education Development Index</i>
EFA	= <i>Education for All</i>
EfSD	= <i>Education for Sustainable Development</i>

G

GDI	= <i>Gender-related Development Index</i>
GDLN	= <i>Global Development Learning Network</i>
Gender	= kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota, atau sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh sosial dan budaya

H

HAKI	= Hak Atas Kekayaan Intelektual
HDI	= <i>Human Development Index</i>
HET	= Harga Eceran Tertinggi
HIV	= <i>Human Immunodeficiency Virus</i>

I

ICDE	= <i>International Conference on Data Engineering</i>
IEA	= <i>International Organization for Evaluation of Educational Achievement</i>
IKK	= Indikator Kinerja Kegiatan
IKU	= Indikator Kinerja Utama
Inpres	= Instruksi Presiden
IPA	= Ilmu Pengetahuan Alam
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IPS	= Ilmu Pengetahuan Sosial
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRDI	= The Indonesian Research and Development Institute
ISO	= <i>International Organization for Standardization</i>
ITJEN	= Inspektorat Jenderal

J

Jardiknas	= Jejaring Pendidikan Nasional
-----------	--------------------------------

K

KBE	= <i>Knowledge Based Economy</i>
-----	----------------------------------



KBK	= Kurikulum Berbasis Kompetensi
KKN	= Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KKG	= Kelompok Kerja Guru
KKKS	= Kelompok Kegiatan Kepala Sekolah
KKPS	= Kelompok Kegiatan Pengawas Sekolah
Kopertis	= Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
KPJM	= Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
KTSP	= Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

L

LAKIP	= Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Learning Resources Center	= Pusat Sumber Belajar
Life Skills	= Kecakapan hidup
Life long education	= Pendidikan sepanjang hayat
Litbang	= Penelitian dan Pengembangan
Literasi	= Melek Aksara
LKP	= Lembaga Kursus dan Pelatihan
LPMP	= Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
LPTK	= Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
LSK	= Lembaga Sertifikasi Kompetensi

M

MA	= Madrasah Aliyah
MAK	= Madrasah Aliyah Kejuruan
MBM	= Manajemen Berbasis Masyarakat
MBK	= Manajemen Berbasis Kinerja
MBS	= Manajemen Berbasis Sekolah
MDGs	= <i>Millennium Development Goals</i>
Mendiknas	= Menteri Pendidikan Nasional
MGMP	= Musyawarah Guru Mata Pelajaran
Mhs	= Mahasiswa
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MKKS	= Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
MKPS	= Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah
Musrenbang	= Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
MTEF	= <i>Medium Term Expenditure Framework</i> (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)
MTs	= Madrasah Tsanawiyah

N

NAD	= Nanggroe Aceh Darrussalam
NKRI	= Negara Kesatuan Republik Indonesia

O

OECD	= <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
------	--

P

P4TK	= Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
------	--

PAUD	= Pendidikan Anak Usia Dini
PBB	= <i>Performance Based Budgeting</i> (penganggaran berbasis kinerja)
PBJ	= Pengadaan Barang dan Jasa
PDB	= Produk Domestik Bruto
PEK	= Pengembangan Ekonomi Kreatif
Permendikas	= Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
PIRLS	= <i>Progress in International Reading Literacy Study</i>
PISA	= <i>Programme for International Student Assessment</i>
PKBM	= Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	= Pendidikan Kecakapan Hidup
PNBAI	= Program Nasional bagi Anak Indonesia
PNBP	= Pendapatan Negara Bukan Pajak
Posyandu	= Pos Pelayanan Terpadu
PP	= Peraturan Pemerintah
PPB	= Pengembangan Profesional Berkelanjutan
PPPNFI	= Pusat pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal
PT	= Perguruan Tinggi
PTA	= Perguruan Tinggi Agama
PTK-PNF	= Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal
PTN	= Perguruan Tinggi Negeri
PTS	= Perguruan Tinggi Swasta
PUG	= Pengarusutamaan Gender
PuP3B	= Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan atau <i>Education for Sustainable Development</i>)
Prodi	= Program Studi
PTK PAUD	= Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
Q	
QS Star	= <i>Quacquarelli Symonds Star</i>
R	
RA	= Raudhatul Athfal
RKA-KL	= Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga
Renstra	= Rencana Strategis
Renja	= Rencana Kerja
RI	= Republik Indonesia
RKB	= Ruang Kelas Baru
RPJMN	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPN	= Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RPPNJP	= Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang
RSBI	= Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional
S	
S-1	= Strata 1 (sarjana)

S-2	=	Strata 2 (magister)
S-3	=	Strata 3 (doktor)
Sakernas	=	Survei Angkatan Kerja Nasional
SAI	=	Sistem Akuntansi Instansi
Satker	=	Satuan Kerja
SBI	=	Sekolah Bertaraf Internasional
SD	=	Sekolah Dasar
SDA	=	Sumber Daya Alam
SDLB	=	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	=	Sumber Daya Manusia
Setjen	=	Sekretariat Jenderal
SIM	=	Sistem Informasi
Sisdiknas	=	Sistem Pendidikan Nasional
SKB	=	Sanggar Kegiatan Belajar
SKL	=	Standar Kompetensi Lulusan
SKPD	=	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLB	=	Sekolah Luar Biasa
SM	=	Sekolah Menengah
SMA	=	Sekolah Menengah Atas
SMLB	=	Sekolah Menengah
SMK	=	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	=	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	=	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	=	Standar Nasional Pendidikan
SOP	=	Standar Operasi dan Prosedur
SPI	=	Sistem Pengendalian Internal
SPM	=	Standar Pelayanan Minimal
SUKMA	=	Surat Keterangan Melek Aksara
Susenass	=	Survei Sosial Ekonomi Nasional
T		
Tata Nilai	=	Pandangan hidup dan kesepakatan atas norma dalam mengelola organisasi
TBM	=	Taman Bacaan Masyarakat
Tendik	=	Tenaga Pendidik
THES	=	<i>Times Higher Education Supplement</i>
TIK	=	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TIMSS	=	<i>Trends in International Mathematic and Science Study</i>
TK	=	Taman Kanak Kanak
TKLB	=	Taman Kanak Kanak Luar Biasa
TUK	=	Tempat Uji Kompetensi
U		
UASBN	=	Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional
UKS	=	Usaha Kesehatan Sekolah
UNSMP	=	Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama
UPBJJ	=	Unit Pendidikan Belajar Jarak Jauh
UPT	=	Unit Pelaksana Teknis
USB	=	Unit Sekolah Baru

UU = Undang Undang
UUD 1945 = Undang Undang Dasar 1945

V
Vokasi = Keahlian terapan

W
Wajar = Wajib Belajar
WCU = *World Class University*
WDP = Wajar Dengan Pengecualian
WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
WTO = *World Trade Organization*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010--2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005--2025. Berdasarkan RPJPN tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) telah menyusun Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005--2025, seperti yang tertuang di dalam Permendiknas Nomor 32 Tahun 2005, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemendiknas Tahun 2005--2009.

RPPNJP telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu tema pembangunan I (2005--2009) dengan fokus pada peningkatan kapasitas dan modernisasi; tema pembangunan II (2010--2015) dengan fokus pada penguatan pelayanan; tema pembangunan III (2015--2020) dengan fokus pada penguatan daya saing regional; dan tema pembangunan IV (2020--2025) dengan fokus pada penguatan daya saing internasional. Tema pembangunan dan penetapan tahapan tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan RPJPN 2005--2025 dan RPJMN 2010--2014 serta perkembangan kondisi yang akan datang.

RPJMN Tahun 2010--2014 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. RPJMN Tahun 2010--2014 tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Renstra Kemendiknas Tahun 2010--2014.

Renstra Kemendiknas tahun 2010--2014 menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan di pusat dan daerah dalam merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan.

1.2 Landasan Filosofis Pendidikan Nasional

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan filosofis serta berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Berdasarkan landasan filosofis tersebut, sistem pendidikan nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya dengan tugas memimpin kehidupan yang berharkat dan bermartabat serta menjadi manusia yang bermoral, berbudi luhur, dan berakhlak mulia.

Pendidikan merupakan upaya memberdayakan peserta didik untuk berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang menjunjung tinggi dan memegang dengan teguh norma dan nilai sebagai berikut:

- a. **norma agama dan kemanusiaan** untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk individu, maupun makhluk sosial;
- b. **norma persatuan bangsa** untuk membentuk karakter bangsa dalam rangka memelihara keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. **norma kerakyatan dan demokrasi** untuk membentuk manusia yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip kerakyatan dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- d. **nilai-nilai keadilan sosial** untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan bermutu bagi seluruh bangsa serta menjamin penghapusan segala bentuk diskriminasi dan bias gender serta terlaksananya pendidikan untuk semua dalam rangka mewujudkan masyarakat berkeadilan sosial.

1.3 Paradigma Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

1.3.1 Pemberdayaan Manusia Seutuhnya

Memperlakukan peserta didik sebagai subjek merupakan penghargaan terhadap peserta didik sebagai manusia yang utuh. Peserta didik memiliki hak untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam aspek kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, dan kinestetik. Paradigma ini merupakan fondasi dari pendidikan yang menyiapkan peserta didik untuk berhasil sebagai pribadi yang mandiri (makhluk individu), sebagai elemen dari sistem sosial yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain (makhluk sosial) dan sebagai pemimpin bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik di muka bumi (makhluk tuhan).

1.3.2 Pembelajaran Sepanjang Hayat Berpusat pada Peserta Didik

Pembelajaran merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu pembelajaran sejak lahir hingga akhir hayat yang diselenggarakan secara terbuka dan multimakna. Pembelajaran sepanjang hayat berlangsung secara terbuka melalui jalur formal, nonformal, dan informal yang dapat diakses oleh peserta didik setiap saat tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pembelajaran dengan sistem terbuka diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

Pendidikan multimakna diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi perkerti luhur, dan watak, kepribadian, atau karakter unggul, serta berbagai kecakapan hidup (*life skills*). Paradigma ini memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan.

1.3.3 Pendidikan untuk Semua

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Paradigma ini menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial, ataupun kendala geografis, yaitu layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Keberpihakan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan sekolah khusus, pendidikan layanan khusus, ataupun pendidikan nonformal dan informal, pendidikan dengan sistem guru kunjung, pendidikan jarak jauh, dan bentuk pendidikan khusus lain yang sejenis sehingga menjamin terselenggaranya pendidikan yang demokratis, merata, dan berkeadilan serta berkesetaraan gender.

1.3.4 Pendidikan untuk Perkembangan, Pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B)

Pendidikan menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi-generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). Paradigma ini mengajak manusia untuk berpikir tentang keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam semesta.

Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang nilai-nilai tanggung-jawab sosial dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik bahwa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai-nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan

(sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.

1.4 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Kemendiknas Tahun 2010--2014 adalah sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- (7) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (8) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (9) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- (10) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025
- (11) Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
- (12) Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
- (13) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

1.5 Pilar Strategis

Pilar strategis landasan filosofis pendidikan nasional mengacu pada strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan umum UU Sisdiknas, yaitu sebagai berikut.

- (1) Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia
- (2) Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- (3) Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis
- (4) Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan
- (5) Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- (6) Penyediaan Sarana Belajar yang Mendidik
- (7) Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan
- (8) Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata
- (9) Pelaksanaan Wajib Belajar
- (10) Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan
- (11) Pemberdayaan Peran Masyarakat
- (12) Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat
- (13) Pelaksanaan Pengawasan dalam Sistem Pendidikan Nasional

BAB II

KONDISI UMUM PENDIDIKAN

2.1. Analisis Kondisi Internal Lingkungan Pendidikan

Dalam menyusun rencana strategis 2010--2014, diperlukan analisis kondisi internal pendidikan nasional pada periode 2005--2009 sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi. Rangkuman hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut.

2.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Upaya penyediaan layanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menunjukkan peningkatan. Angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang ini telah meningkat dari 39,09% pada tahun 2004 menjadi 50,62% pada tahun 2008. Pada tahun 2009 diperkirakan akan terjadi peningkatan APK menjadi 53,90%. Disparitas APK pada jenjang PAUD antarwilayah terjadi penurunan yaitu dari 6,0% pada tahun 2004 menjadi 3,61% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 3% pada tahun 2009 (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Capaian PAUD Tahun 2004 – 2008

Program	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008
PAUD	APK(%)	39,09	42,34	45,63	48,32	50,62
	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)	6,04	5,42	4,37	4,2	3,61

2.1.2 Pendidikan Dasar

Pada jenjang SD/MI/SDLB/Paket A terjadi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dari 112,5% pada tahun 2004 menjadi 116,56% pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 116,95% pada tahun 2009. Seiring dengan itu angka partisipasi murni (APM) naik dari 94,12% pada tahun 2004 menjadi 95,14% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,40% pada tahun 2009. Pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, APK meningkat dari 81,22% pada tahun 2004 menjadi 96,18% pada tahun 2008 dan diperkirakan menjadi 98,00% pada tahun 2009, seperti terlihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Capaian Pendidikan Dasar Tahun 2004 – 2008

Program	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008
SD/MI/SDLB/ Paket A	APK(%)	112,5	111,2	112,57	115,71	116,56
	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)	2,49	2,49	2,43	2,4	2,28
	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)	94,12	94,3	94,48	94,9	95,14
	Rerata Nilai UN	-	-	-	-	7,03
	Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Dirintis Bertaraf Internasional (RSBI)	-	-	22	141	207
SMP/MTs/ SMPLB/ Paket B	APK(%)	81,22	85,22	88,68	92,52	96,18
	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)	25,14	25,14	23,44	23	20,18
	Rerata Nilai UN	5,26	6,28	7,05	7,02	6,87
	Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Dirintis Bertaraf Internasional (RSBI)	-	-	34	170	277
	Rasio Lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tidak Melanjutkan mengikuti PKH (%)	5	6,5	12,7	12,5	16,4
	Medali Emas Olimpiade Internasional	0	12	8	28	52

Disparitas APK SD/MI/SDLB/Paket A antara kabupaten dan kota menurun dari 2,5% pada tahun 2004 menjadi 2,3% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 2,2% pada tahun 2009. Sementara itu, disparitas APK SMP/MTs/Paket B/ sederajat menurun dari 25,1% pada tahun 2004 menjadi 20,2% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 18,9% pada tahun 2009.

Persentase kelulusan peserta ujian mulai jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B dari tahun ajaran 2004/2005 sampai tahun 2007/2008 mengalami kenaikan walaupun tidak secara konsisten atau berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata nilai UN SMP/MTs pada tahun 2008 adalah sebesar 6,87 dengan tingkat kelulusan sebesar 92,76%. Rata-rata nilai ujian SMP/MTs tersebut masih di bawah target 2008, yaitu 7. Hal ini mengkhawatirkan karena di samping target nasional tidak tercapai, juga tingkat kelulusan masih di bawah 95%.

Program pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional (SBI) telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah sekolah bertaraf internasional dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 telah terbentuk 207 SD, dan 277 SMP berstandar internasional atau dirintis berstandar internasional (Lihat Tabel 2.2). Target untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Rasio Lulusan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Tidak Melanjutkan mengikuti PKH juga senantiasa berhasil dilampaui dengan baik. Untuk tahun 2009 diperkirakan rasio ini bisa mencapai 18,99% jauh di atas target nasional yang 15%. Dalam hal prestasi siswa-siswa Indonesia di ajang internasional, pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan peningkatan prestasi dengan memperoleh 52 medali emas pada tahun 2008, dibandingkan dengan 28 medali emas pada tahun 2007.

2.1.3 Pendidikan Menengah

APK SMA/SMK/MA/SMAB/Paket C mengalami peningkatan, yaitu 49,01% pada tahun 2004 menjadi 64,28% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 68,20% pada tahun 2009 (Lihat Tabel 2.3). Disparitas APK SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C antara kabupaten dan kota menurun dari 33,1% pada tahun 2004 menjadi 30% pada tahun 2008 dan diperkirakan turun menjadi 29,2% pada tahun 2009. Sementara itu, rerata nilai Ujian Nasional pada jenjang ini menunjukkan peningkatan, dari 5,31 pada tahun 2004 menjadi 7,17 pada tahun 2008.

Program pengembangan sekolah/madrasah bertaraf internasional (SBI) pada jenjang pendidikan menengah telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Terlihat peningkatan jumlah sekolah bertaraf internasional dari tahun ke tahun. Pada tahun 2008 telah terbentuk 259 SMA dan 300 SMK berstandar internasional atau dirintis berstandar internasional. Hasil yang sama juga terjadi pada program sekolah/madrasah berbasis keunggulan lokal. Hingga tahun 2008 telah dikembangkan sebanyak 100 SMA dan 341 SMK berbasis keunggulan lokal. Rasio jumlah siswa SMK:SMA dari tahun ke tahun juga terus meningkat dari 30:70 pada tahun 2004 menjadi 49:51 menurut perhitungan sementara pada akhir bulan September 2009. Rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan menengah juga meningkat dari 93,8% pada tahun 2004 menjadi 95,6% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,9% pada tahun 2009.

Sertifikat kompetensi yang diterbitkan juga senantiasa berhasil melampaui target. Untuk tahun 2008 sertifikasi kompetensi pendidikan menengah akan mencapai 675.000 lembar jauh melampaui target nasional 350.000 sertifikat.

Dalam hal prestasi siswa-siswa Indonesia di ajang internasional, pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan peningkatan prestasi dengan memperoleh 36 medali emas pada tahun 2008 dibanding dengan 23 medali emas pada tahun 2007.

Tabel 2.3 Capaian Pendidikan Menengah Tahun 2004 – 2008

Program	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008
SMA/SMK/ MA/SMALB/ Paket C	APK(%)	49,01	52,2	56,22	60,51	64,28
	Disparitas APK antara Kabupaten dan Kota(%)	33,13	33,13	31,44	31,2	29,97
	Rerata Nilai UN	5,31	6,52	7,33	7,14	7,17
	Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Dirintis Bertaraf Internasional (RSBI) - SMA	-	-	100	259	259
	Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau Dirintis Bertaraf Internasional (RSBI) - SMK	-	-	140	179	300
	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal - SMA	-	-	100	100	100
	Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal - SMK	-	-	200	317	341
	Rasio Jumlah Siswa SMK:SMA	30:70	32:68	35:65	44:56	46:54
	Rasio Kesetaraan Gender (%)	93,8	93,9	94,5	94,6	95,6
	Sertifikat Kompetensi yang Diterbitkan (lembar)	-	-	-	625.000	675.000
	Medali Emas Olimpiade Internasional	0	6	34	23	36

2.1.4 Pendidikan Tinggi

Pada jenjang pendidikan tinggi terjadi peningkatan APK dari 14,62% pada tahun 2004 menjadi 17,75% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 18,50% pada tahun 2009. Capaian peningkatan APK pendidikan tinggi vokasi adalah dari 1,47% pada tahun 2004 menjadi 3,8% pada tahun 2008.

Untuk tahun 2008 sertifikat kompetensi pendidikan tinggi mencapai 193,206 lembar, sedangkan pada tahun 2007 mencapai 144,292 lembar. Perkembangan persentase dosen berkualifikasi S2/S3 pada perguruan tinggi negeri sejak tahun 2004 sampai 2008 mengalami fluktuasi. Perkiraan capaian tahun 2009 mencapai 70,43%. Sertifikasi dosen baru dilaksanakan pada tahun 2008 dan pencapaiannya baru sebesar 7,4%. Jumlah perguruan tinggi pada peringkat dunia, perkembangannya mengalami fluktuasi dari tahun 2004-2008.

Jumlah paten yang berhasil diraih perguruan tinggi senantiasa meningkat dari hanya 5 paten pada tahun 2004 menjadi 43 paten pada tahun 2008. Publikasi internasional oleh dosen perguruan tinggi mengalami peningkatan. Dari tahun 2003 ke tahun 2004, peningkatan jumlah publikasinya adalah sebesar 5%, sedangkan dari tahun 2007 ke tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah publikasi internasional sebesar 43%. Statistik tentang paten dan publikasi internasional ini menunjukkan bahwa iklim penelitian yang berkualitas semakin membaik. Rasio gender pada jenjang pendidikan tinggi juga naik dari 90,1% pada tahun 2004 menjadi 102,3% pada tahun 2008.

Prestasi mahasiswa Indonesia di ajang internasional menunjukkan hasil yang fluktuatif. Jumlah medali emas yang diperoleh pada tahun 2006 adalah 27 buah, pada tahun 2007 adalah 0 dan pada tahun 2008 diperoleh 29 medali emas.

Tabel 2.4 Capaian Pendidikan Tinggi Tahun 2004 – 2008

Program	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008	
Pendidikan Tinggi	APK Pendidikan Tinggi(%)	14,62	15	16,7	17,25	17,75	
	APK Pendidikan Tinggi Vokasi(%)	1,47	3,31	4,96	3,86	3,8	
	Sertifikat yang diterbitkan (lembar) - Pendidikan Tinggi (Vokasi dan Profesi)	-	-	-	144,292	193,206	
	Dosen Berkualifikasi S2/S3(%)	50	50	54,02	50,64	52,05	
	Dosen Bersertifikat Pendidik (%)	-	-	-	-	7,4	
	Perguruan Tinggi Top 500 dunia (peringkat)						
	<=300	0	0	3	0	1	
	301<=x<=400	0	1	0	3	2	
	401<=x<=500	0	2	1	3	0	
	>=500	0	0	0	0	3	
	Perguruan Tinggi Berakreditasi OECD			1 (UT)	1 (UT)	1 (UT)	1 (UT)
	Paten yang Diperoleh	5	4	11	32	43	
	Kenaikan Publikasi Internasional (%)	5	7,5	25	43	43	
	Rasio Kesetaraan Gender	90,1	90,4	99,8	99,4	102,3	
	Medali Emas Olimpiade Internasional	0	0	27	0	29	

2.1.5 Pendidikan Nonformal

Program pendidikan nonformal dan informal juga menunjukkan peningkatan hasil yang menggembirakan. Sertifikat kompetensi pendidikan nonformal mengalami peningkatan dari sebesar 42.117 sertifikat pada tahun 2007 menjadi 43.059 sertifikat pada tahun 2008. Tingkat literasi penduduk usia lebih dari 15 tahun meningkat dari

89,79% pada tahun 2004 menjadi 94,03% pada tahun 2008. Rasio kesetaraan gender tingkat literasi pada pendidikan nonformal meningkat dari 92,7% pada tahun 2004 menjadi 96,8% pada tahun 2008 (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Capaian Pendidikan Jenjang Pendidikan Non Formal pada Tahun 2004 – 2008

Program	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008
Pendidikan Nonformal	Sertifikat Kompetensi yang Diterbitkan (lembar)	-	-	35,177	42,117	43,059
	Tingkat Literasi > 15 tahun(%)	89,79	90,45	91,93	92,8	94,03
	Rasio Kesetaraan Gender tingkat literasi(%)	92,7	93,4	94,7	94,9	96,8

2.1.6 Tata Kelola

Opini audit keuangan BPK pada tahun 2008 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Rasio temuan BPK dan Itjen tentang penyimpangan di Kemendiknas mengalami penurunan. Rasio temuan BPK sebesar 0,7 pada tahun 2004 turun menjadi 0,22 pada tahun 2008, sedangkan rasio temuan itjen turun dari 0,3 pada tahun 2004 menjadi 0,04 pada tahun 2008. Aplikasi e-Administrasi dari tahun 2006 hingga tahun 2008 mengalami peningkatan yaitu dari sebesar 3 aplikasi menjadi 14 aplikasi. Pencapaian satuan kerja eselon II dan UPT dalam pelayanan prima bersertifikat ISO 9001:2000 telah berhasil terpenuhi di tahun 2008 (Tabel 2.6.).

Tabel 2.6 Capaian Tata Kelola Pendidikan pada Tahun 2004 – 2008

Jenjang Pendidikan	Indikator Kinerja	2004	2005	2006	2007	2008
Tata- kelola	Opini Audit Keuangan BPK	Belum ada opini	Belum ada opini	Disclaimer	Disclaimer	WDP
	Rasio Temuan BPK tentang Penyimpangan di Kemendiknas terhadap Objek yang Diperiksa (%)	0,7	0,49	0,36	0,03	0,22
	Rasio Temuan Itjen tentang Penyimpangan di Kemendiknas terhadap Objek yang Diperiksa (%)	0,3	0,1	0,3	0,17	0,04
	Aplikasi e-Administrasi	-	-	3 Aplikasi	13 Aplikasi	14 Aplikasi
	Satker Eselon II Bersertifikat ISO 9001:2000	-	-	2 dari 42	24 dari 42	42 dari 42
	UPT Bersertifikat ISO 9001:2000	-	11 dari 47	16 dari 47	24 dari 47	47 dari 47

2.1.7 Aspirasi Masyarakat

Capaian pembangunan pendidikan secara nasional telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan pembangunan tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembangunan pendidikan, khususnya untuk lima tahun ke depan. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan pembangunan pendidikan seperti disparitas capaian antarwilayah, antargender, dan antarpendapatan penduduk.

Potensi dan permasalahan pembangunan pendidikan tersebut sebagian besar dijaring dari pemangku kepentingan melalui serangkaian *Focus Group Discussion*. Komposisi keterwakilan pemangku kepentingan tersebut antara lain adalah Kemendiknas, Kementerian Agama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, gubernur, bupati, kepala dinas pendidikan, rektor, kepala sekolah, dosen, guru, organisasi pendidik dan tenaga kependidikan, organisasi massa/yayasan/lembaga swadaya masyarakat, pengamat PAUD, pengamat pendidikan dasar dan menengah, pengamat pendidikan tinggi, budayawan, pengamat teknologi, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, media massa, serta industri manufaktur dan industri jasa pemasaran. Ringkasan hasil identifikasi permasalahan dan kaitannya dengan tantangan pembangunan pendidikan ke depan disajikan pada Lampiran.

2.2 Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Nasional

Pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap pendidikan dijelaskan di bawah ini.

Sosial, Budaya dan Lingkungan

Kondisi sosial, budaya, dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) jumlah penduduk yang makin tinggi menempatkan Indonesia dalam posisi yang makin penting dalam percaturan global, (2) angka HDI Indonesia meningkat dari tahun ke tahun tetapi masih di bawah mayoritas negara di Asia Tenggara, (3) masih tingginya kesenjangan antargender, antara penduduk kaya dan miskin, antara perkotaan dan perdesaan, antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, dan antarjenis kelamin, (4) masih rendahnya peringkat Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang

menduduki urutan ke-93 dari 177 negara (UNDP 2007/2008), (5) perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, (6) adanya ketidakseimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga, (7) masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (8) masih rendahnya kualitas SDM Indonesia untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*).

Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, (2) masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, (3) basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan, (4) makin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja, (5) munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional, (6) masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam, (7) pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai, dan (8) ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain.

Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) kesenjangan literasi TIK antarwilayah, (2) kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global, (3) terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di lembaga pendidikan, (4) semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, (5) semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagai pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, (6) perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan (7) perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan

norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

Politik dan Pertahanan dan Keamanan.

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1) ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, (2) ketidakselarasan peraturan perundangan yang berdampak pada penyelenggaraan pendidikan, (3) kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, (4) implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal, (5) terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah, (6) keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan, (7) ancaman disintegrasi bangsa akibat dari ketidakdewasaan dalam berdemokrasi, (8) ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan (9) komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

2.3 Tantangan Pembangunan Pendidikan 2010 -- 2014

Berdasarkan analisis faktor eksternal, Internal, potensi, dan permasalahan pendidikan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan. Tantangan-tantangan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Melengkapi peraturan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan;
- (2) Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Millenium Development Goals (MDGs)*, *Education For All (EFA)*, dan *Education for Sustainable Development (EfSD)*;
- (3) Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil, dan rawan bencana;
- (4) Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan;

- (5) Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga;
- (6) Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme;
- (7) Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah;
- (8) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global;
- (9) Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- (10) Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
- (11) Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
- (12) Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi;
- (13) Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah;
- (14) Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (15) Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP);
- (16) Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional;
- (17) Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan *parenting education* dan *homeschooling*;
- (18) Mengembangkan kebijakan dalam penyelenggaraan PAUD;
- (19) Mengembangkan kebijakan yang kondusif untuk menghasilkan perguruan tinggi berdaya saing global (*World Class University/WCU*);
- (20) Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

3.1 Visi dan Misi Kementerian Pendidikan Nasional

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional, Kemendiknas mempunyai visi 2025 untuk menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna).

Visi Kemendiknas 2025:

Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

(Insan Kamil/Insan Paripurna)

Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Tabel 3.1 memberikan deskripsi lengkap yang dimaksud dengan insan cerdas dan kompetitif.

Tabel 3.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas		Makna Insan Indonesia Kompetitif
Cerdas spiritual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul. 	<ul style="list-style-type: none"> Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemangat juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun dan pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajaran sepanjang hayat Menjadi rahmat bagi semesta alam
Cerdas emosional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial yang (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) demokratis; (c) empatik dan simpatik; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. 	
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, inovatif dan imajinatif. 	
Cerdas kinestetis	<ul style="list-style-type: none"> Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya-tahan, sigap, terampil, dan trengginas. Aktualisasi insan adiraga. 	

Cita-cita Kemendiknas dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara optimal. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat berbasis pengetahuan.

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional seperti dijelaskan pada Bab I. Tema pembangunan yang kedua (2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan fokus tersebut, Visi Kemendiknas 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Visi Kemendiknas 2014:

**“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional
untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif “**

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidikan yang:

- (1) **tersedia** secara merata di seluruh pelosok nusantara;
- (2) **terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
- (3) **berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
- (4) **setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
- (5) menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2014, Misi Kemendiknas 2010--2014 dikemas dalam "Misi 5K" sebagai berikut.

KODE	MISI
M1	Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2	Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3	Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4	Meningkatkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
M5	Meningkatkan Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan

3.2 Tata Nilai Kemendiknas

Kemendiknas menyadari bahwa visi dan misi tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai yang dimaksud adalah **amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilan.**

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010--2014, dari ke enam tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto Kemendiknas.

"Melayani Semua dengan Amanah"

3.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2010--2014

Untuk merealisasikan visi dan misi Kemendiknas, perlu dirumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2010--2014 yang lebih jelas menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

3.3.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Kemendiknas tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2014 Kemendiknas dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2010--2014. Dengan demikian, tujuan strategis Kemendiknas 2010--2014 adalah sebagai berikut.

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T1	Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota
T2	Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota
T3	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota.
T4	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi.
T5	Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
T6	Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional

3.3.2 Sasaran Strategis Tahun 2010-2014

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S1.1	APK PAUD nasional mencapai 72,9%, sekurang-kurangnya 75% provinsi mencapai APK \geq 60%, sekurang-kurangnya 75% kota mencapai APK \geq 75%, dan sekurang-kurangnya 75% kabupaten mencapai APK \geq 50%.
S1.2	Kualifikasi untuk pendidik PAUD formal (TK/TKLB) diharapkan 85% berpendidikan minimal S-1/D-4 dan 85% bersertifikat, sedangkan untuk Pendidik PAUD nonformal diharapkan telah dilatih sekurang-kurangnya 55%.
S1.3	Seluruh satuan pendidikan anak usia dini formal menerapkan sistem pembelajaran yang membangun karakter (kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan toleransi) dan menyenangkan bagi anak

2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S2.1	APM SD/MI/Paket A nasional mencapai 96%; sekurang-kurangnya 85% provinsi mencapai APM \geq 95%; sekurang-kurangnya 90% kota mencapai APM \geq 96%, dan sekurang-kurangnya 90% kabupaten mencapai APM \geq 94%;
S2.2	APS Kelompok Usia 7-12 Tahun mencapai 99,9%
S2.3	APK SMP/MTs/Paket B nasional mencapai 110%; sekurang-kurangnya 90% provinsi mencapai APK \geq 95%; sekurang-kurangnya 80% kota mencapai APK \geq 115%, dan sekurang-kurangnya 85% kabupaten mencapai APK \geq 90%;
S2.4	APM SMP/MTS/SMPLB/Paket B/Sederajat mencapai 76,8%
S2.5	APS Kelompok Usia 13-15 Tahun 96%
S2.6	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SD/SDLB dan SMP/SMPLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan

S2.7	Angka Putus Sekolah SD maksimal 0,7% dan SMP maksimal 1%, angka melanjutkan SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B sekurang-kurangnya 97%;
S2.8	Angka Melanjutkan Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Sederajat 93,50%
S2.9	Sekurang-kurangnya 90% SD/SDLB dan 90% SMP/SMPLB diakreditasi;
S2.10	Sekurang-kurangnya 15% SD/SDLB dan 27% SMP/SMPLB terakreditasi minimal B;
S2.11	Sekurang-kurangnya 40% SD/SDLB dan 60% SMP/SMPLB melaksanakan e-pembelajaran;
S2.12	Sekurang-kurangnya 50% kabupaten/kota memiliki SD SBI atau RSBI;
S2.13	Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMP SBI atau RSBI;
S2.14	Sekurang-kurangnya 88% Guru SD/SDLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 80% bersertifikat;
S2.15	Sekurang-kurangnya 98% Guru SMP/SMPLB berkualifikasi S-1/D-4 dan 90% bersertifikat;
S2.16	Sekurang-kurangnya 60% Kab/Kota Telah Memiliki Rasio Pendidik dan Peserta Didik SD 1:20 Sampai 1:28 dan SMP 1:20 Sampai 1:32;

3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T3.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S3.1	APK nasional melampaui 85%, sekurang-kurangnya 60% provinsi mencapai APK minimal 80%, sekurang-kurangnya 65% kota mencapai APK minimal 85%, dan sekurang-kurangnya 70% kabupaten mencapai APK minimal 65%;
S3.2	Sekurang-kurangnya 95% SMA/SMLB berakreditasi, dan 40%-nya berakreditasi minimal B;
S3.3	Sekurang-kurangnya 90% SMK berakreditasi, dan 30%-nya berakreditasi minimal B;
S3.4	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMLB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan
S3.5	Sekurang-kurangnya 60% kabupaten/kota memiliki SMA dan SMK SBI atau RSBI;
S3.6	Sekurang-kurangnya 98% guru SMA/SMLB/SMK berkualifikasi S-1/D-4, dan sekurang-kurangnya 90% bersertifikat;
S3.7	Seluruh SMK bersertifikat ISO 9001:2008;
S3.8	Sekurang-kurangnya 75% SMA/SMLB dan 70% SMK melaksanakan e-pembelajaran;
S3.9	70% Lulusan SMK Bekerja pada Tahun Kelulusan
S3.10	Seluruh SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan
S3.11	Seluruh Kepala Sekolah dan seluruh Pengawas SMA/SMALB dan SMK mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan

4) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T4.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S4.1	APK PT dan PTA usia 19-23 tahun mencapai 30%
S4.2	100% PTN dan 50% PTS memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008
S4.3	Sekurang-kurangnya 90% prodi PT berakreditasi dan 63% berakreditasi minimal B
S4.4	Sekurang-kurangnya 3 PT masuk peringkat 300 terbaik dunia dan sekurang-kurangnya 11 PT (kumulatif) masuk dalam peringkat 600 terbaik dunia versi THES, sekurang-kurangnya 12 PT masuk dalam 200 terbaik Asia versi THES
S4.5	Sekurang-kurangnya 85% dosen program S-1 dan program diploma berkualifikasi minimal S-2
S4.6	Sekurang-kurangnya 90% dosen pasca sarjana (S-2, profesi, spesialis, dan S-3) berkualifikasi S-3
S4.7	Sekurang-kurangnya 75% dosen PT telah bersertifikat profesi

5) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T5.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S5.1	Sekurang-kurangnya 30% program keahlian lembaga kursus dan pelatihan berakreditasi, dan 25% lulusan program kecakapan hidup (PKH) bersertifikat kompetensi;
S5.2	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah mengarusutamakan gender dalam pendidikan;
S5.3	Sekurang-kurangnya 50% kab/kota telah memberikan layanan fasilitasi <i>parenting education</i>

6) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T6.

KODE	SASARAN STRATEGIS
S6.1	Opini audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai tahun 2012
S6.2	Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya 75

7) Sasaran strategis gabungan

Penetapan sasaran ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang berkualitas dan relevan serta berkesetaraan gender dengan memperhatikan inklusifitas di semua provinsi, kabupaten, dan kota akan memberikan efek resultan yang dinyatakan dalam sasaran-sasaran strategis gabungan sebagai berikut. Sasaran strategis gabungan ini diperlukan terutama untuk mengukur indeks pembangunan manusia.

KODE	SASARAN STRATEGIS
SG.1	APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi sekurang-kurangnya 86,3%,
SG.2	Rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,25 tahun
SG.3	Tingkat literasi nasional usia \geq 15 tahun 95,8%

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kemendiknas, serta mengacu pada RPJMN 2010--2014 dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan sampai tahun 2009. Strategi dan arah kebijakan ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang Pendidikan untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2010--2014 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di pusat dan di daerah terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan terlihat adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan layanan prima pendidikan nasional. Kebutuhan tersebut mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

4.1 Strategi Pembangunan Pendidikan Tahun 2010--2014

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan pendidikan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana, serta sistem dan prosedur yang bermutu. Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antarwilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat.

4.1.1 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T1

Tujuan strategis T1, yaitu tersedia dan terjangkau layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

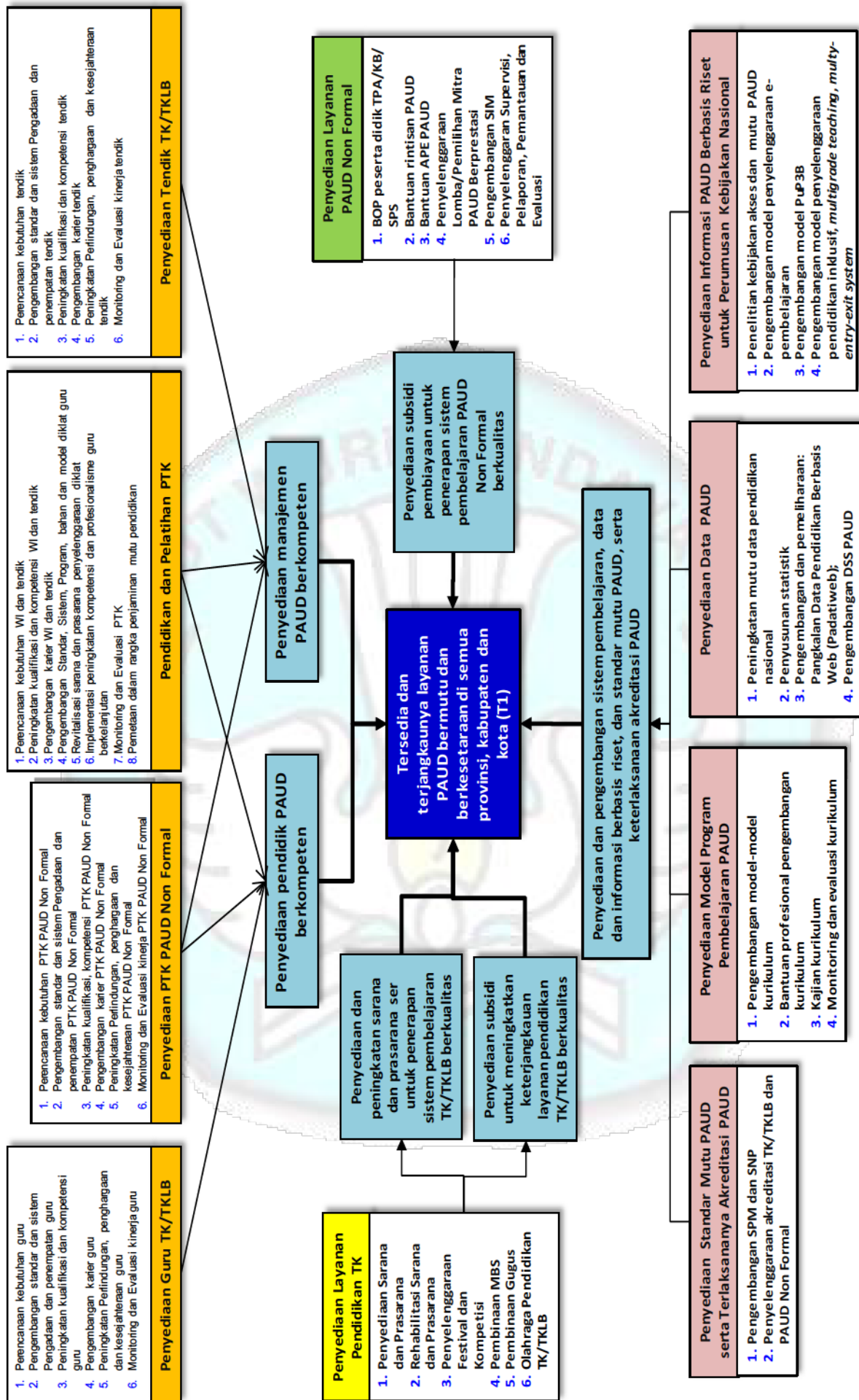
- (1) Penyediaan pendidik PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB berkompeten dan penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten;
- (2) Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (6) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD Non Formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T1 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.1.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1 ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T1

KODE	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	APK PAUD	53.7	56.7	60.1	63.6	67.4	72.9
2	Persentase Provinsi Mencapai APK 60	24.2	34.4	44.5	54.7	64.8	75.0
3	Persentase Kota Mencapai APK 75	28.3	37.6	47.0	56.3	65.7	75.0
4	Persentase Kabupaten Mencapai APK 50	28.4	37.7	47.0	56.4	65.7	75.0
5	Persentase Guru PAUD Formal Berkualifikasi S-1/D-4	14.5	15.3	16.4	22.5	55	85.0
6	Persentase Guru PAUD Formal Bersertifikat	9.7	12	13	22	60	85.0
7	Persentase Tutor PAUD Non Formal Mengikuti PPB	5	15	25	35	45	55
8	Persentase Kepala TK mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
9	Persentase Pengawas PAUD mengikuti PPB	-	10	25	50	75	100



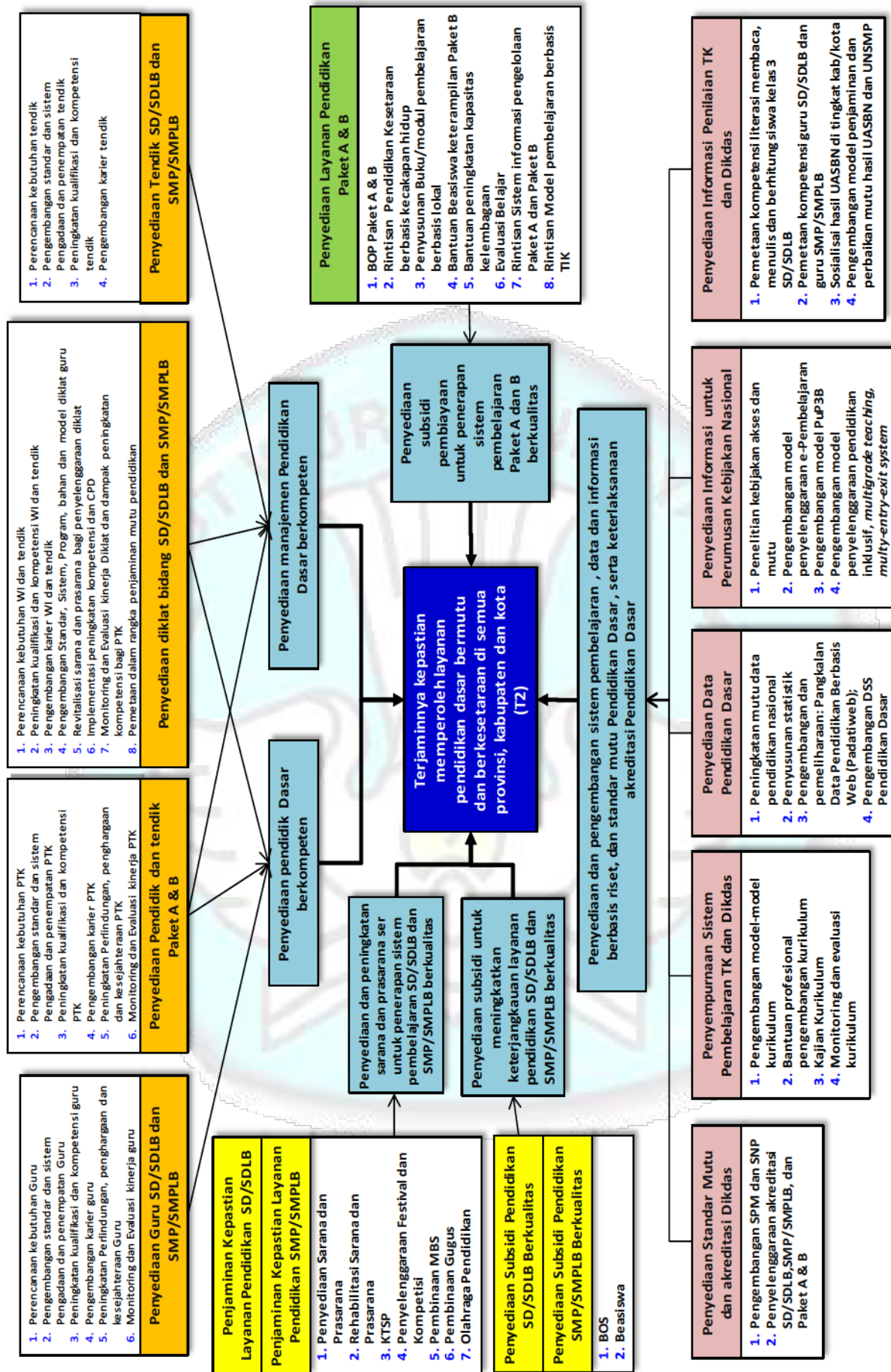
Gambar 4.1: Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T1

4.1.2 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T2

Tujuan strategis T2, yaitu terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan pendidik Pendidikan Dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta tutor Paket A dan Paket B berkompeten;
- (2) Penyediaan manajemen SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Paket A dan Paket B berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan dasar, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan dasar;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (6) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T2 yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2: Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T2

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2 ditunjukkan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T2

KODE	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
1	APK SD/SDLB/MI/Paket A	117.0	117.2	117.6	118.2	118.6	119.1
2	APM SD/SDLB/MI/Paket A	95.2	95.2	95.3	95.7	95.8	96.0
3	Persentase Provinsi Mencapai APM \geq 95	57.5	63.0	68.5	74.0	79.5	85.0
4	Persentase Kota Mencapai APM \geq 96	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0
5	Persentase Kabupaten Mencapai APM \geq 94	70.0	74.0	78.0	82.0	86.0	90.0
6	APS Kelompok Usia 7-12 Tahun	97.90	98.10	98.70	99.20	99.85	99.9
7	Persentase Pengawas SD/SDLB mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
8	Persentase Kepala Sekolah SD/SDLB mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
9	Persentase satuan pendidikan SD/SDLB menerapkan pembelajaran yang membangun karakter	-	10	30	50	75	100
10	Persentase Peserta Didik SD/SDLB Putus Sekolah	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7
11	Persentase Lulusan SD/SDLB yang Melanjutkan	90.0	91.4	92.8	94.2	95.6	97.0
12	Persentase SD/SDLB Berakreditasi	65.4	70.2	75.2	80.1	85.1	90.0
13	Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B	8.2	9.6	10.9	12.3	13.6	15.0
14	Persentase SD/SDLB Menerapkan E-Pembelajaran	3.0	10.4	17.8	25.2	32.6	40.0
15	Persentase SD/SDLB Memiliki Fasilitas Internet	8.0	14.4	20.8	27.2	33.6	40.0
16	Persentase Kabupaten/Kota Memiliki SD SBI/RSBI	28.0	39.4	50.8	62.2	73.6	85.0
17	Persentase Guru SD/SDLB Berkualifikasi S-1/D-4	24.6	37.28	49.96	62.64	75.32	88.0
18	Persentase Guru SD/SDLB Bersertifikat	14.0	26.3	40.4	54.9	67.5	80.0
19	APK Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B	98.3	99.3	101.5	103.9	106.8	110.0
20	APM Nasional SMP/SMPLB/MTs/Paket B	73.3	74	74.7	75.4	76.1	76.8
21	APS Kelompok Usia 13-15 Tahun	87.9	89.5	91.1	92.8	94.4	96.0
22	Persentase Provinsi Mencapai APK \geq 95	63.6	68.9	74.2	79.4	84.7	90.0
23	Persentase Kota Mencapai APK \geq 115	43.0	50.4	57.8	65.2	72.6	80.0
24	Persentase Kabupaten Mencapai APK \geq 90	55.0	61.0	67.0	73.0	79.0	85.0
25	Persentase Peserta Didik SMP/SMPLB Putus Sekolah	1.99	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0
26	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi	61	66.8	72.6	78.4	84.2	90.0
27	Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B	19.0	20.6	22.2	23.8	25.4	27.0
27	Persentase SMP/SMPLB Menerapkan E-Pembelajaran	10	20	30	40	50	60.0
28	Persentase SMP/SMPLB Memiliki Fasilitas Internet				100	100	100

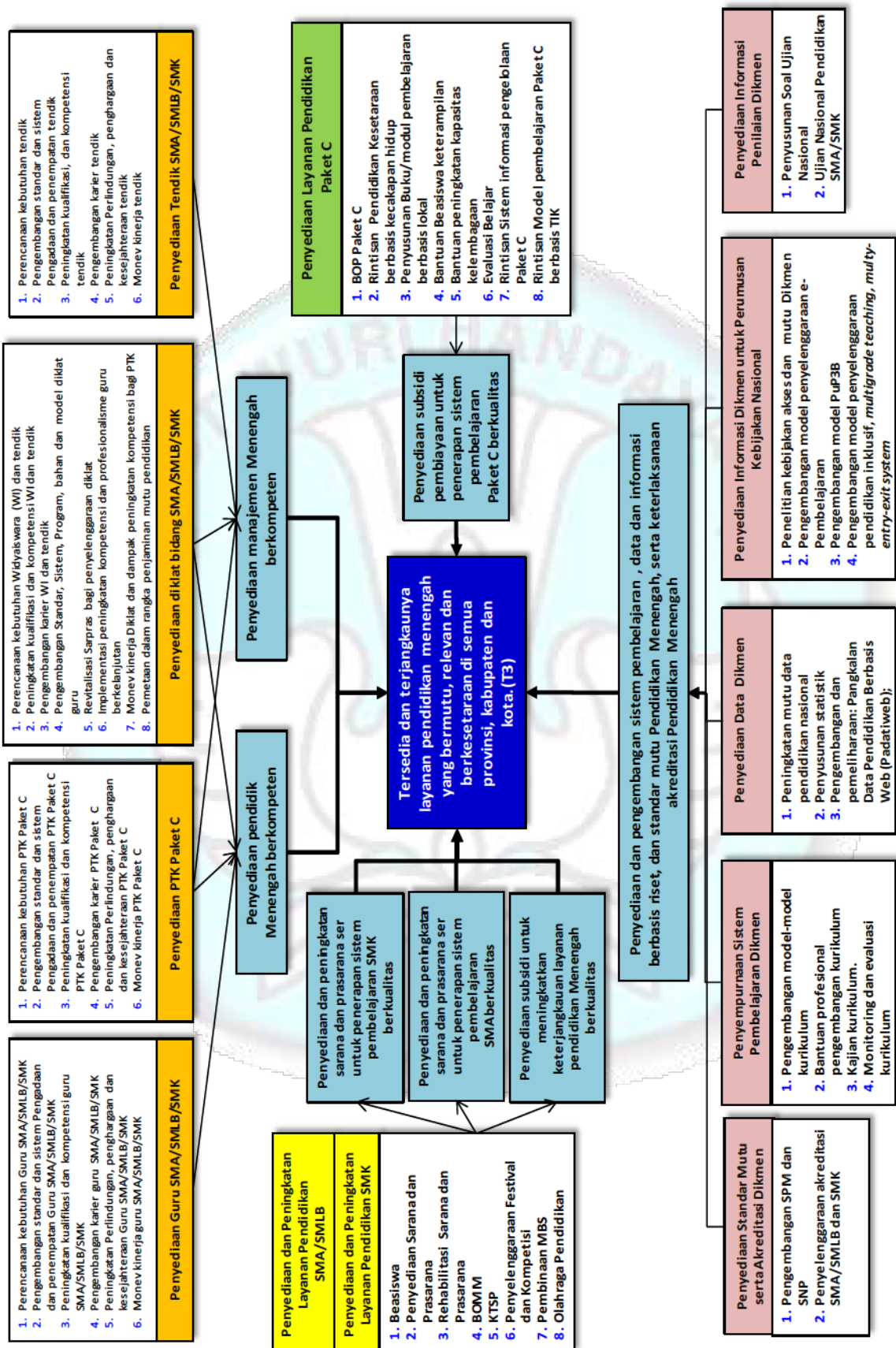
KODE	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
29	Persentase Kabupaten/Kota Memiliki SMP SBI/RSBI	43.7	50.0	56.2	62.5	68.7	75.0
30	Persentase Guru SMP/SMPLB Berkualifikasi S1/D4	73.4	77.1	82.8	87.2	92.3	98.0
31	Persentase Guru SMP/SMPLB Bersertifikat	32.8	44.0	56.0	67.0	79.0	90.0
32	Persentase Pengawas SMP/SMPLB mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
33	Persentase Kepala Sekolah SMP/SMPLB mengikuti PPB	-	10	25	45	70	100
34	Persentase satuan pendidikan SMP/SMPLB menerapkan pembelajaran yang membangun karakter	-	10	30	50	75	100

4.1.3 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T3

Tujuan strategis T3, yaitu tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru SMA/SMLB/SMK serta tutor Paket C berkompeten;
- (2) Penyediaan manajemen SMA/SMLB/SMK serta Paket C berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi;
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan menengah, serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan menengah;
- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (5) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK berkualitas yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (6) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;
- (7) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.3 berikut.



Gambar 4.3 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T3

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3 ditunjukkan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T3

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	APK Nasional SMA/SMK/SMLB/MA/Paket C	69.6	73.0	76.0	79.0	82.0	85.0
2	Persentase Provinsi Mencapai APK Minimal 80	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0
3	Persentase Kota Mencapai APK Minimal 85	35.0	41.0	47.0	53.0	59.0	65.0
4	Persentase Kabupaten Mencapai APK Minimal 65	40.0	46.0	52.0	58.0	64.0	70.0
5	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi	64.7	70.7	76.8	82.9	88.9	95.0
6	Persentase SMA/SMLB Berakreditasi Minimal B	19.2	23.4	27.5	31.7	35.8	40.0
7	Persentase SMA/SMLB Menerapkan e-Pembelajaran	27.0	36.6	46.2	55.8	65.4	75.0
8	Persentase SMA/SMALB/SMK memiliki Internet				100	100	100
9	Persentase Kab/Kota memiliki SMA/SMLB SBI/RSBI	18.0	28.4	38.8	49.2	59.6	70.0
10	Persentase Guru SMA/SMLB Berkualifikasi S-1/D-4	91.2	92.2	93.9	95.8	97.3	98.0
11	Persentase guru SMA/SMLB Bersertifikat	41.0	51.0	61.0	70.0	80.0	90.0
12	Persentase SMK Berakreditasi	70.0	74.0	78.0	82.0	86.0	90.0
13	Persentase SMK Berakreditasi \geq B	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0
14	Persentase SMK Menerapkan E-Pembelajaran	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0
15	Persentase Kab/Kota Memiliki SMK RSBI/SBI	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
16	Persentase SMK Bersertifikat ISO 9001:2008	6	15	35	55	75	100
17	Persentase Guru SMK Berkualifikasi S-1/D-4	85.8	87.6	89.5	93.6	95.4	98.0
18	Persentase Guru SMK Bersertifikat	32.0	44.0	55.0	67.0	78.0	90.0
19	Persentase Kepala Sekolah SMA/SMK/SMLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	-	10	25	45	70	100
20	Persentase Pengawas SMA/SMK/SMLB mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan	-	10	25	45	70	100
21	Persentase satuan pendidikan SMA/SMK/SMLB menerapkan pembelajaran yang membangun karakter	-	10	30	50	75	100

4.1.4 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T4

Tujuan strategis T4, yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing;
- (2) Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel;
- (3) Penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi;

- (4) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi berkualitas dan berdaya saing yang merata di seluruh provinsi;
- (5) Peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;
- (6) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi berkualitas yang merata di seluruh provinsi.

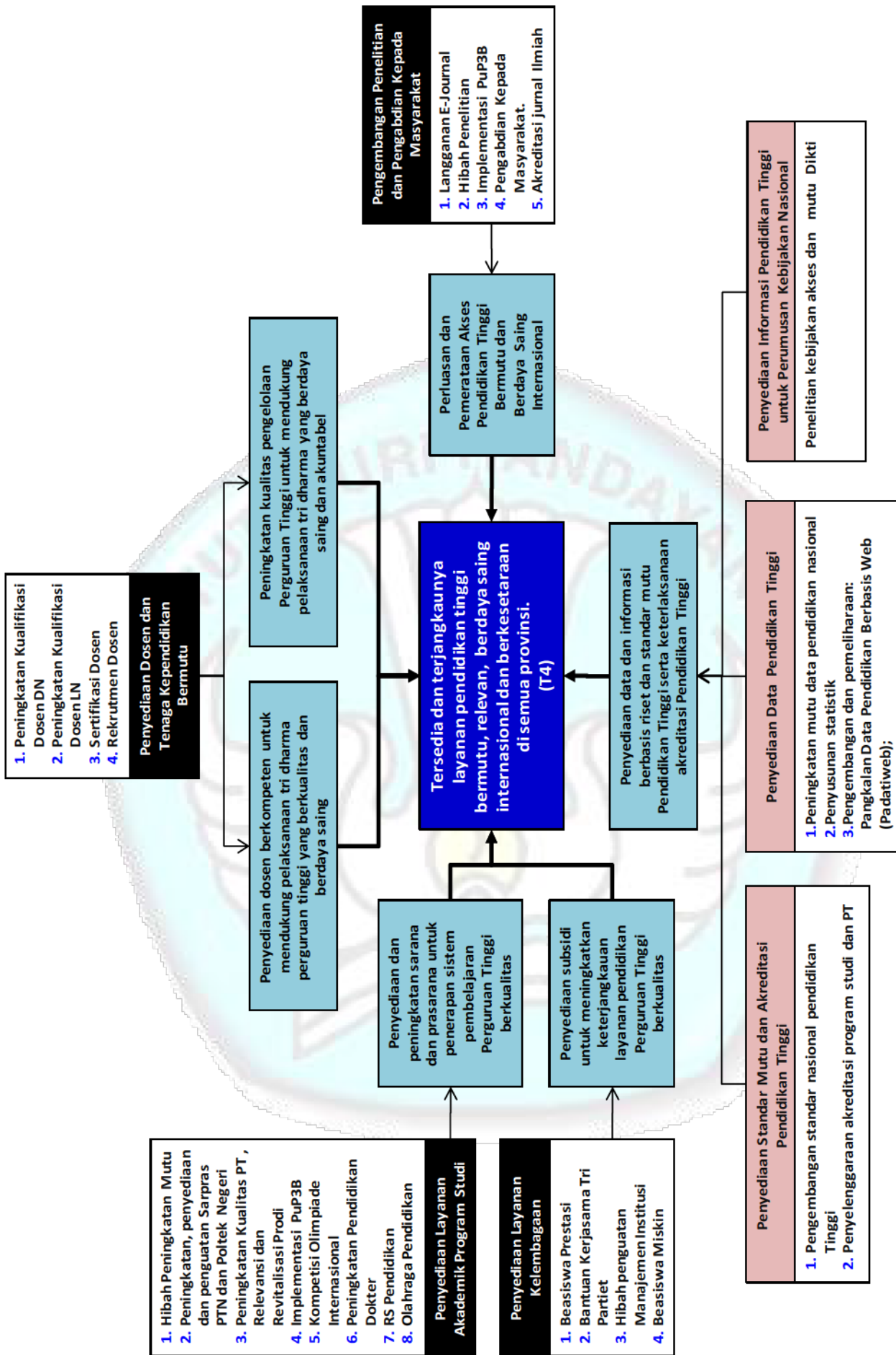
Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.4.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T4 ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T4

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	APK PT dan PTA Usia 19-23 Thn *)	23.5	24.8	26.1	27.4	28.7	30.0
2	Persentase Prodi PT Berakreditasi	69.6	73.7	77.8	81.8	85.9	90.0
3	Persentase Prodi PT Berakreditasi minimal B	44.4	48.1	51.8	55.6	59.3	63.0
4	Jumlah PT 300 Terbaik Dunia Versi THES	1	1	2	2	3	3
5	Jumlah PT 600 Terbaik Dunia Versi THES	3	3	5	6	8	11
6	Jumlah PT 200 Terbaik Asia Versi THES	8	8	9	10	11	12
7	Persentase Dosen S-1/Diploma Berkualifikasi S-2	57.8	62.5	67.5	73.5	79.5	85.0
8	Persentase Dosen Pasca Berkualifikasi S-3	56.2	60.0	65.0	72.5	80.0	90.0
9	Persentase Dosen PT Bersertifikat	15.4	23.0	36.0	49.0	62.0	75.0
10	Persentase PTN bersertifikat ISO 9001:2008	17	33	50	67	83	100
11	Persentase PTS bersertifikat ISO 9001:2008	10	15	25	35	40	50

*) Kisaran usia peserta didik pendidikan tinggi disesuaikan dengan rata-rata lama bersekolah dari semula 19-24 tahun menjadi 19-23 tahun



Gambar 4.4 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T4

4.1.6 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T5

Tujuan strategis T5, yaitu tersedia dan terjangkau layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

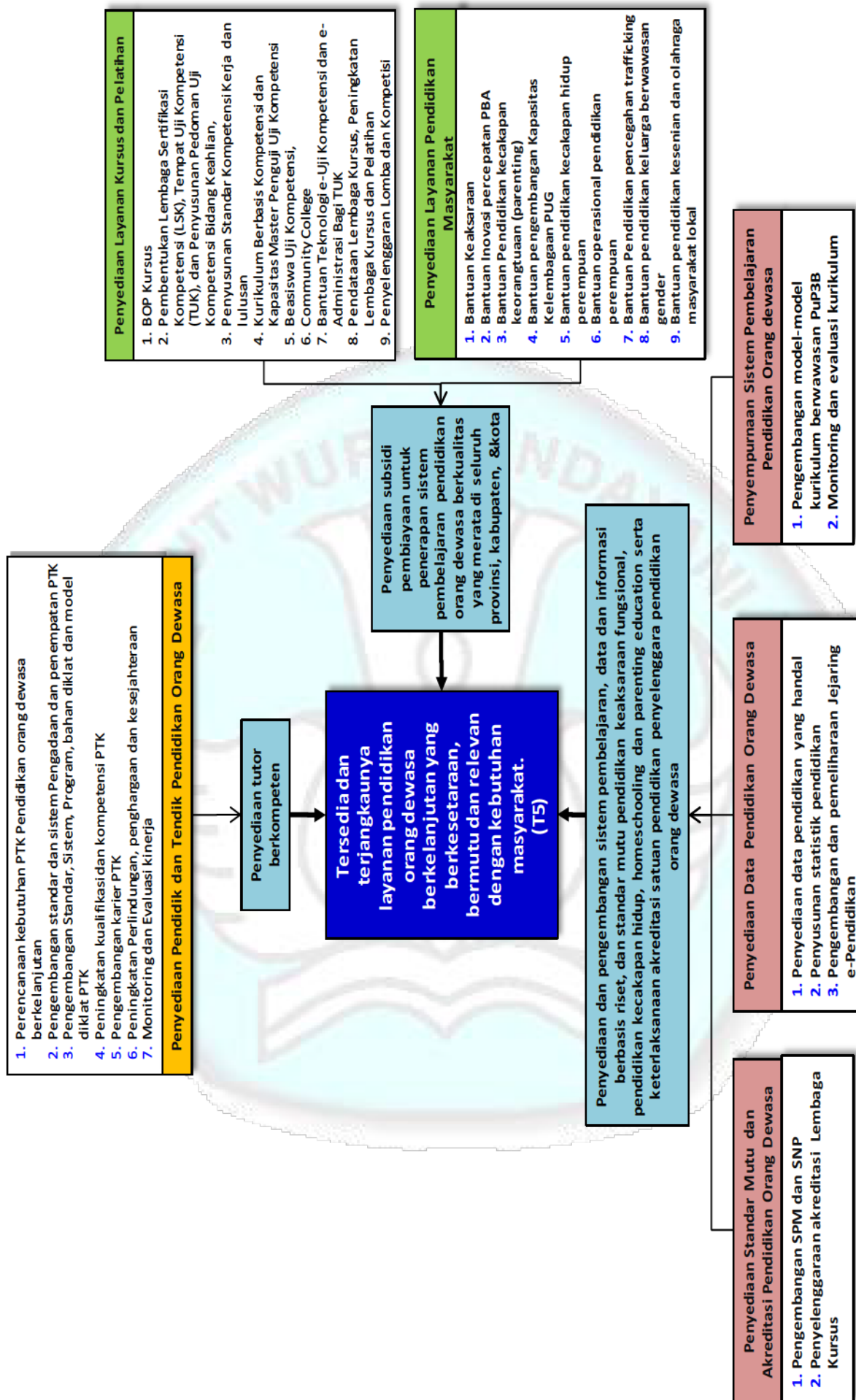
- (1) Penyediaan tutor berkompeten yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup;
- (2) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education* serta keterlaksanaan akreditasi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa;
- (3) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.5.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5 ditunjukkan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5. Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T5

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Tingkat Literasi Penduduk Usia \geq 15 Tahun	94.7	95.0	95.2	95.4	95.6	95.8
2	Persentase Provinsi dengan Tingkat Literasi \geq 95	69.7	74.8	79.8	84.9	89.9	95.0
3	Persentase Kota dengan Tingkat Literasi \geq 95	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0
4	Persentase Kab dengan Tingkat Literasi \geq 95	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0
5	Persentase Program Keahlian LKP Berakreditasi	3	6	11	17	24	30
6	Persentase PKBM Berakreditasi	1.3	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0
7	Persentase Kab/Kota yang Mengarusutamakan Gender	5.0	14.0	23.0	32.0	41.0	50.0
8	Persentase Kab/Kota yang menerapkan <i>parenting education</i>	0	10	20	30	40	50



Gambar 4.5 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T5

4.1.6 Strategi Pencapaian Tujuan Strategis T6

Tujuan strategis T6, yaitu tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional, dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut.

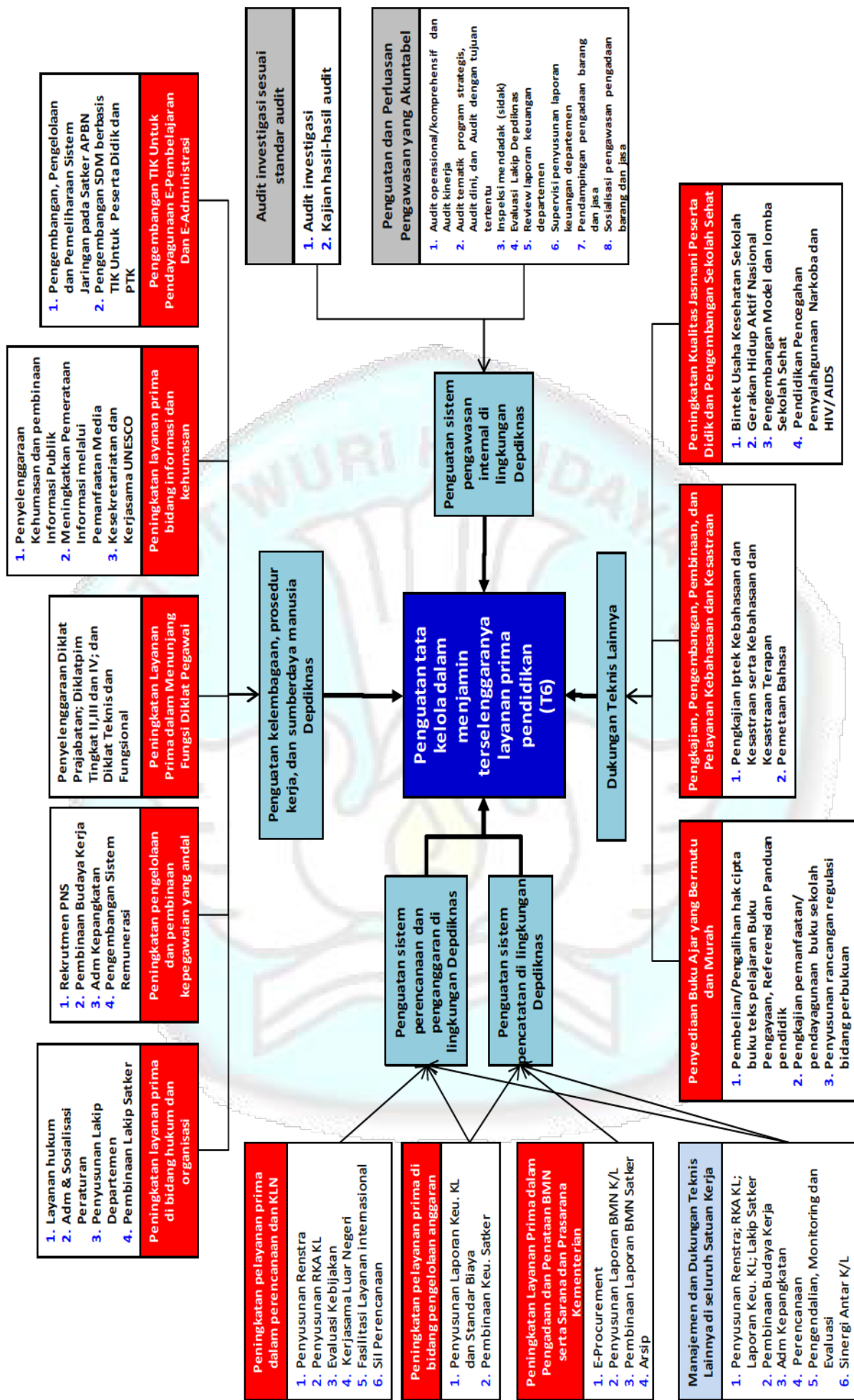
- (1) Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumberdaya manusia Kemendiknas
- (2) Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kemendiknas
- (3) Penguatan sistem pencatatan di lingkungan Kemendiknas
- (4) Penguatan sistem pengawasan internal di lingkungan Kemendiknas

Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2010--2014 dapat dijabarkan pada Gambar 4.6.

Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6 ditunjukkan pada Tabel 4.6

Tabel 4.6. Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T6

KODE	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
1	Opini Audit BPK RI	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Skor LAKIP	75	75	75	75	75	75



Gambar 4.6 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis T6

4.1.7 Efek Resultan Strategi II, III dan IV

Pembangunan pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan pendidikan memberikan kontribusi langsung dalam meningkatkan parameter tingkat literasi serta jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah yang diukur dari APK gabungan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Kondisi saat ini, tingkat literasi penduduk usia 15 tahun ke atas di Indonesia sudah mencapai 95% dan ditargetkan pada tahun 2014 akan mencapai 98%. Dengan mencapai tingkat literasi 98%, Indonesia sudah dapat sejajar dengan negara-negara maju.

APK gabungan pendidikan dasar, menengah dan tinggi pada tahun 2009 adalah sebesar 78,5%. Pada tahun 2014, melalui penerapan strategi II, III, dan IV akan memberikan efek resultan pada peningkatan APK gabungan mencapai sekurang-kurangnya 86.3% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Sasaran Strategis Efek Resultan Strategi II, III, dan IV

NO	SASARAN STRATEGIS	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
SG.1	APK gabungan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi	78,5	79,8	81,3	82,8	84,3	86,3
SG.2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	7.60	7.75	7.85	8.10	8.25	7.60
SG.3	Tingkat literasi nasional usia \geq 15 tahun	94.7	95.0	95.2	95.4	95.6	95.8

4.1.7 Strategi Umum

Dari seluruh strategi pembangunan pendidikan tersebut dapat dirumuskan ke dalam strategi umum yang tertulis pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rumusan Strategi Umum

NO	KOMPONEN SISTEM PENDIDIKAN	KODE	STRATEGI UMUM
1	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	ST1.1	Penyediaan tenaga pendidik berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
		ST1.2	Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
2	Pembelajaran dan Penilaian	ST2.1	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
		ST2.2	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal.
3	Sarana dan Prasarana	ST3.1	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
4	Pendanaan	ST4.1	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
		ST4.2	Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
5	Tata Kelola	ST5.1	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan nasional.
		ST5.2	Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan Kemendiknas.
		ST5.3	Penguatan akuntabilitas pengelolaan aset milik negara di lingkungan Kemendiknas.
		ST5.4	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Kemendiknas.

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010--2014

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan periode lima tahun yang akan datang. Keterkaitan strategi umum dan arah kebijakan tertulis dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

KODE	STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN
ST1.1	Penyediaan tenaga pendidik berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.	a. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik b. Peningkatan mutu lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lulusannya
ST1.2	Penyediaan manajemen satuan pendidikan berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	c. Pemberdayaan Kepala sekolah dan pengawas sekolah

KODE	STRATEGI UMUM	ARAH KEBIJAKAN
ST2.1	Penyediaan sistem pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan	d. Penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa e. Pengembangan metodologi pendidikan yang membangun manusia yang berjiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha
ST2.2	Penyediaan data dan informasi serta akreditasi pendidikan yang handal	f. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan
ST3.1	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota	g. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan h. Penyediaan buku teks murah
ST4.1	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan formal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.	i. Rasionalisasi pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat j. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha
ST4.2	Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran non formal dan informal berkualitas yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.	k. Penguatan dan perluasan pendidikan non formal dan informal
ST5.1	Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis pendidikan nasional.	l. Reformasi birokrasi m. Koordinasi antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta pusat dan daerah
ST5.2	Penguatan akuntabilitas sistem keuangan di lingkungan Kemendiknas	
ST5.3	Penguatan akuntabilitas pengelolaan aset milik negara di lingkungan Kemendiknas.	
ST5.4	Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Kemendiknas	
STG1.1	Gabungan Strategi Umum ST1.1, ST1.2, ST3.1, ST4.1, dan ST4.2	n. Akselerasi Pembangunan Pendidikan di daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Bencana
STG1.2	Gabungan Strategi ST1.1, ST2.1, dan ST3.1	o. Penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri

Arah kebijakan di atas sebagian sama dengan kebijakan terobosan yang dipergunakan Kemendiknas selama periode 2005--2009. Kebijakan terobosan yang dilanjutkan adalah kebijakan yang telah dilaksanakan dengan berhasil dengan beberapa penyesuaian yang menyatakan penekanan pada periode 2010--2014. Selain itu, juga perlu diperkuat dengan berbagai kebijakan terobosan baru sesuai dengan tuntutan yang ada untuk dijadikan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010--2014. Penjelasan dari arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.1 Peningkatan Kualifikasi dan Sertifikasi Pendidik

Undang-Undang RI No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru dan dosen sebagai profesi. Guru harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-1/D-4 dan bersertifikat pendidik, sedangkan dosen harus memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S-2/S-3 dan bersertifikat pendidik. Pemerintah harus menyelesaikan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik selambat-lambatnya pada akhir tahun 2014. Selain itu, langkah ini dilakukan untuk memastikan regenerasi guru yang berkompeten mengingat dalam kurun waktu lima tahun ke depan diperkirakan sekitar 700 ribu guru akan pensiun. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2010--2014 Kemendiknas akan mempertahankan kebijakan-kebijakan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru yang antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Pengembangan sistem rekrutmen guru dengan pemberian beasiswa ikatan dinas pandu bakat;
- (2) Peningkatan sistem rekrutmen guru berkualifikasi S1/D4 yang berkompeten;
- (3) Pemberian beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi S-1/D-4 dan peningkatan kualifikasi dosen menjadi S-2/S-3;
- (4) Penertiban penyelenggaraan sertifikasi pendidik sesuai dengan peraturan perundangan;
- (5) Peningkatan peran perguruan tinggi dalam pembinaan profesionalisme guru berkelanjutan melalui kegiatan KKG/MGMP.

4.2.2 Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Lulusannya

Peningkatan kualitas dan kompetensi guru bergantung pada kualitas lembaga penyedia tenaga pendidik. Penerapan Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 mengharuskan ketersediaan LPTK sebagai lembaga yang bertugas menghasilkan calon tenaga kependidikan dan menyelenggarakan sertifikasi pendidik. Untuk menjamin ketersediaan guru yang berkompeten diperlukan peningkatan mutu LPTK. Peningkatan mutu LPTK dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dosen LPTK yang berkompeten;
- (2) Pengetatan persyaratan perizinan dan akreditasi LPTK;
- (3) Penertiban LPTK yang tidak berizin dan/atau tidak berakreditasi;
- (4) Peningkatan sarana dan prasarana LPTK.

4.2.3 Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Selain tenaga pendidik, kepala sekolah dan pengawas sekolah memegang peranan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Permasalahan yang dihadapi kepala sekolah adalah lemahnya kompetensi manajerial, sedangkan yang dihadapi pengawas sekolah adalah lemahnya kompetensi kepengawasan. Secara khusus, kepala sekolah dasar menghadapi permasalahan tingginya beban kerja karena tidak mempunyai tenaga administrasi sekolah. Pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Pemberian beasiswa S-1 dan S-2 bagi kepala sekolah dan pengawas sekolah;
- (2) Penyelenggaraan diklat manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas untuk kepala sekolah dan diklat pengawasan yang berkualitas bagi pengawas sekolah;
- (3) Revitalisasi organisasi profesi tenaga kependidikan MKKS/MKPS;
- (4) Mendorong pemerintah daerah kab/kota untuk menyediakan tenaga administrasi sekolah di setiap sekolah dasar.

4.2.4 Penerapan Metodologi Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter Bangsa

Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, porno-grafi dan pornoaksi, plagiarisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Menanamkan pendidikan moral yang mengintegrasikan muatan agama, budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan *soft skills* yang meningkatkan akhlak mulia dan menumbuhkan karakter berbangsa dan bernegara;
- (3) Menumbuhkan budaya peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban melalui pembelajaran aktif di lapangan;
- (4) Penilaian prestasi keteladanan peserta didik yang mempertimbangkan aspek akhlak mulia dan karakter berbangsa dan bernegara.

4.2.5 Pengembangan Metodologi Pendidikan yang Membangun Manusia yang Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha

Dalam mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK) tahun 2010-2014, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu dirumuskan kebijakan pengintergrasian aspek yang menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha dalam metodologi pendidikan. Pengembangan metodologi pendidikan ini dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Melakukan kajian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan peserta didik sedini mungkin;
- (2) Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada peserta didik sedini mungkin;
- (3) Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan ekonomi kreatif antar penyelenggara pendidikan;
- (4) Peningkatan jumlah dan perbaikan kualitas dan lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan informal yang mendukung penciptaan insan kreatif dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- (5) Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif;
- (6) Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- (7) Fasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri.

4.2.6 Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan

Meningkatnya partisipasi pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan sistem evaluasi pendidikan yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah belum digunakannya hasil Ujian Nasional pendidikan menengah untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Hal ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ujian nasional, substansi Ujian Nasional belum mengukur pencapaian hasil belajar peserta

didik yang sebenarnya, dan belum terpadunya hasil ujian nasional dengan ujian masuk perguruan tinggi. Untuk itu, diperlukan kebijakan antara lain sebagai berikut.

- (1) Penyempurnaan sistem penyelenggaraan dan pengawasan Ujian Nasional untuk seluruh jenjang pendidikan;
- (2) Penyempurnaan substansi Ujian Nasional yang mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik meliputi aspek penilaian kognitif, afektif dan psikomotor;
- (3) Penyempurnaan sistem pemrosesan hasil Ujian Nasional;
- (4) Penyusunan sistem yang menjamin keterpaduan hasil Ujian Nasional jenjang pendidikan menengah dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi.

4.2.7 Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di Bidang Pendidikan

Pendayagunaan TIK diyakini dapat menunjang upaya peningkatan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik terhadap pendidikan. Penerapan TIK untuk pendidikan oleh Kemendiknas dapat memperluas keterjangkauan pendidikan, serta sekaligus penguatan tata kelola.

Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi tuntutan global berdampak pada semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang pendidikan, meningkatnya kebutuhan untuk berbagi informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, serta perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi. Kondisi di atas menuntut diberlakukannya kebijakan di bidang TIK.

Namun, masih adanya kesenjangan literasi TIK antarwilayah di satu sisi dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI di sisi lainnya mengharuskan integrasi penggunaan TIK dalam pembelajaran yang mendidik. Pada tahun 2010--2014, penguatan pemanfaatan TIK untuk e-pembelajaran, e-manajemen dan e-layanan dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana TIK serta muatan pembelajaran berbasis TIK untuk penguatan dan perluasan e-pembelajaran pada semua jenjang pendidikan
- (2) Pengembangan e-manajemen, e-pelaporan, dan e-layanan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan layanan publik.

- (3) Pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan untuk mempermudah dalam berbagi informasi dan pengetahuan antar peserta didik dan tenaga pendidik
- (4) Pengembangan pusat sumber belajar berbasis TIK pada pendidikan dasar dan menengah
- (5) Peningkatan kemampuan SDM untuk mendukung pendayagunaan TIK di pusat dan daerah.

4.2.8 Penyediaan Buku Teks Murah

Dalam rangka meningkatkan jumlah terbitan buku dan mendorong kreativitas serta motivasi penulis, Kemendiknas akan meneruskan program pembelian hak cipta buku teks pelajaran yang mendukung program buku teks murah. Penyediaan buku teks pelajaran yang bermutu, mudah diperoleh, dengan harga yang terjangkau serta meniadakan monopoli penulisan, penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku telah diatur melalui Permendiknas No. 2 Tahun 2008 tentang Buku.

Namun, reformasi perbukuan yang dilakukan belum sepenuhnya berdampak pada penyediaan buku teks murah kepada seluruh peserta didik. Pada tahun 2010--2014, penyediaan buku teks murah dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan subsidi biaya buku kepada peserta didik yang menggunakan buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh Kemendiknas.
- (2) Mempermudah akses bagi satuan pendidikan untuk mengunduh buku sekolah elektronik yang telah dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas.
- (3) Mengevaluasi sistem penilaian buku-buku yang dibeli hak ciptanya oleh Kemendiknas untuk meningkatkan penggunaan buku-buku teks tersebut.
- (4) Mendorong satuan pendidikan untuk memanfaatkan buku teks yang hak ciptanya sudah dibeli oleh Kemendiknas.

4.2.9 Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dalam periode pembangunan 2005--2009, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOS buku, Bantuan Khusus Murid (BKM), dan beasiswa dari SD hingga perguruan tinggi telah terbukti secara signifikan menurunkan angka putus sekolah dan meringankan beban orang tua dalam menyediakan biaya pendidikan. Khusus pada jenjang pendidikan tinggi, kebijakan pendanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan cakupan, kualitas, dan relevansi.

Fokus pengembangan bidang penelitian dan pengabdian masyarakat lebih diarahkan pada peningkatan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang berpotensi menjadi publikasi ilmiah internasional sehingga dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Rasionalisasi pendanaan ini dilakukan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Pemetaan struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan keragaman wilayah;
- (2) Pengaturan sistem pembiayaan pendidikan yang proporsional dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat;
- (3) Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan kepada peserta didik miskin dengan memperhatikan disparitas antarwilayah dan antargender;
- (4) Peningkatan intensitas penelitian dan publikasi internasional;
- (5) Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat pada pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatnya daya saing.

4.2.10 Pemberdayaan Masyarakat, Dunia Usaha, dan Dunia Industri

Kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian masih rendah. Hal ini terjadi, karena belum adanya pola kemitraan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, pendidikan tidak dapat berdiri sendiri lepas dari keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri, baik proses pendidikannya, pendidiknya, dan maupun peserta didiknya. Untuk mengatasi hal itu perlu dilakukan beberapa kebijakan yang antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan relevansi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri;
- (2) Optimisasi pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk bidang pendidikan;
- (3) Pembentukan sistem yang mengatur kemitraan sinergis dengan organisasi kemasyarakatan seperti penyelenggaraan satuan pendidikan dan dengan organisasi profesi seperti penyusunan program sertifikasi profesi;

- (4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas;
- (5) Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait dengan kebutuhan SDM;
- (6) Pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat, dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.

4.2.11 Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan Informal

Program pendidikan nonformal dan informal sangat strategis dalam upaya untuk menurunkan buta aksara dan meningkatkan kecakapan hidup masyarakat berkesetaraan gender. Hal ini sejalan dengan komitmen internasional dalam pemberantasan buta aksara. Selain itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan perlu ditingkatkan budaya baca masyarakat. Penguatan dan perluasan ini dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penguatan dan perluasan program pembelajaran langsung di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- (2) Penguatan dan perluasan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa;
- (3) Penguatan dan perluasan budaya baca melalui penyediaan taman bacaan, bahan bacaan dan sumber informasi lain yang mudah, murah, dan merata serta sarana pendukungnya;
- (4) Penguatan dan perluasan pendidikan nonformal dan informal untuk mengurangi disparitas antargender;
- (5) Pemberian fasilitasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuan (*parenting education*) dan *homeschooling*.

4.2.12 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemendiknas menjadi salah satu dari 13 K/L yang harus menyelesaikan reformasi birokrasi pada tahun 2010/2011. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab yang semakin besar karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD.

Berdasarkan kajian awal reformasi birokrasi pada tahun 2009, reformasi birokrasi dilaksanakan antara lain melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Restrukturisasi organisasi yang mendukung visi dan misi Kemendiknas;
- (2) Penyempurnaan tata laksana;
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Pengembangan sistem pengukuran dan remunerasi berbasis kinerja;
- (5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

4.2.13 Koordinasi Antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah serta Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih dirasa banyak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar-K/L maupun antar pusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja pendidikan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur pembagian urusan antara Kemendiknas, K/L lainnya, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Koordinasi ini dijalankan dengan mengacu antara lain pada kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Peningkatan koordinasi antara Kemendiknas dengan K/L terkait untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan
- (2) Peningkatan koordinasi antara Kemendiknas dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota serta satuan pendidikan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pendidikan

4.2.14 Akselerasi Pembangunan Pendidikan di Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Rawan Bencana

Pembangunan pendidikan di daerah perbatasan dan tertinggal termasuk daerah rawan bencana, perlu dilakukan secara khusus untuk menjamin keberpihakan dan kepastian kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut untuk mendapatkan pelayanan pendidikan. Tuntutan keadilan dan kesatuan bangsa dan negara serta adanya konvensi internasional tentang pendidikan untuk semua, mengharuskan pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan kepada setiap warga negara dimanapun mereka berada di NKRI ini. Pembangunan pendidikan di daerah

perbatasan dan tertinggal serta rawan bencana dilakukan melalui kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dengan tunjangan khusus di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan TK-SD satu atap, SD-SMP satu atap, dan sekolah berasrama di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana;
- (3) Penyediaan subsidi bagi siswa untuk mendapat pendidikan formal dan non formal di daerah perbatasan, tertinggal, dan rawan bencana.

4.2.15 Penyeragaman Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Hasil pendidikan harus mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyeragaman pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kebutuhan tersebut memiliki sejumlah parameter yang harus secara tepat disesuaikan dengan pasokan lulusan layanan pendidikan, seperti jumlah, kompetensi dan lokasi. Kemendiknas harus mampu menciptakan dan menjaga sistem standarisasi penyelenggaraan pendidikan. Program tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut.

- (1) Menyeragaman rencana pengembangan layanan pendidikan dengan rencana pengembangan industri, rencana pengembangan wilayah, rencana investasi;
- (2) Mengembangkan sinergitas antar K/L yang terkait dengan pasokan dan serapan tenaga kerja;
- (3) Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan pengembangan ekonomi di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai *cluster* industri;
- (4) Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam pengembangan ekonomi;
- (5) Meningkatkan kualitas penelitian yang dapat menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri dan menjadikannya sebagai prioritas penelitian nasional.

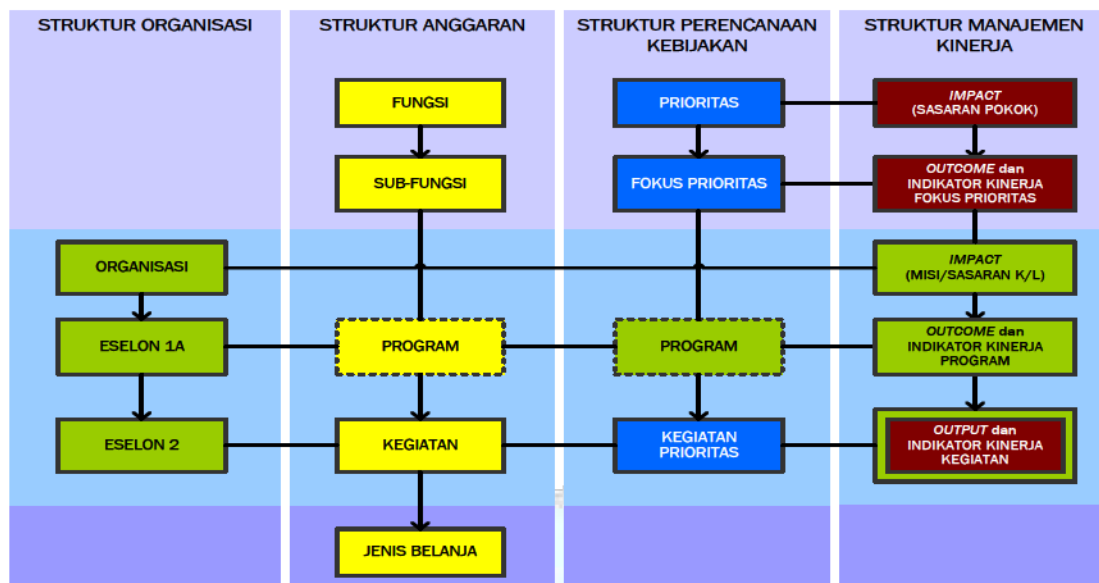
BAB V

PROGRAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010--2014

5.1 Restrukturisasi Program dan Kegiatan Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Pendidikan Nasional dipilih menjadi salah satu dari enam kementerian/lembaga yang menjadi proyek percontohan untuk melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Ketentuan tersebut tertuang dalam Nota Keuangan 2009 (Lampiran Pidato Presiden Agustus 2008) dan diperkuat dengan Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No: 0298/D.8/01/2009, tanggal 19 Januari 2009. Arsitektur restrukturisasi program dan kegiatan tersebut disajikan pada Gambar 5.1. Adapun landasan hukum dari restrukturisasi perencanaan dan penganggaran ini adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra 2010--2014 menjadi keharusan bagi setiap kementerian/ lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu *output* dan *outcome* dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin *accountable*.

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (*input*) untuk setiap unit kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap eselon I diharapkan menetapkan satu atau dua program, sedangkan eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Program di setiap eselon I dan kegiatan di seluruh eselon II harus mencerminkan Program Prioritas Nasional (Gambar 5.1).



Gambar 5.1 Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Renstra juga memperhatikan kemampuan fiskal untuk memenuhi amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Renstra 2010--2014 ini disusun dengan menggunakan berbagai asumsi pertumbuhan ekonomi, serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh eselon I dan eselon II dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Dengan demikian, akan tampak kesenjangan antara pendanaan minimal 20% APBN dengan kondisi ideal. Tantangan pemerintah adalah bagaimana memperkecil kesenjangan dalam arti penyediaan anggaran menuju kondisi ideal. Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur.

5.2 Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, otonomi, dan desentralisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU

Sisdiknas) merupakan respons terhadap tuntutan reformasi di bidang pendidikan. Sejalan dengan prinsip desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

UU Sisdiknas menetapkan bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

5.3 Pengelompokan Program

Jika mengacu kepada strukturisasi program dan kegiatan tersebut, Kemendiknas telah menyusun program-program pembangunan pendidikan yang dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2014. Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Pengelompokan program tersebut adalah sebagai berikut.

KODE	PROGRAM
P1	Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) dan Pendidikan Dasar
P2	Pendidikan Menengah
P3	Pendidikan Tinggi
P4	Pendidikan Nonformal dan Informal
P5	Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
P6	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas
P7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendiknas
P8	Penelitian dan pengembangan Kemendiknas.

Uraian dari setiap program di atas, diberikan pada subbab di bawah ini.

5.4 Program Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar

Program pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar dilakukan untuk mendukung tujuan:

- (1) Tersedia dan terjangkau layanan pendidikan TK bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota (T1); serta
- (2) Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota (T2).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran TK/TKLB bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST3.1);
- (2) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan TK/TKLB bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.1);
- (3) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST3.1);
- (4) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.1).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan TK dan Dasar

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU1.1	APK TK/TKLB	29.3	30.6	32.0	33.5	35.0	36.6
IKU1.1.1	PROPINSI BER-APK > 36.58%	6.1	19.8	33.6	47.4	61.2	75.0
IKU1.1.2	KOTA BER-APK > 36.58%	22.7	33.1	43.6	54.1	64.5	75.0
IKU1.1.3	KABUPATEN > BER-APK 36.58%	26.0	35.8	45.6	55.4	65.2	75.0
IKU1.2	PERSENTASE SATUAN TK/TKLB BERAKREDITASI	48.2	55.6	62.9	70.3	77.6	85.0
IKU1.3	APM SD/SDLB	82.94	82.94	83.01	83.29	83.40	83.57
IKU1.3.1	PROPINSI BER-APM > 83.57%	81.8	82.5	83.1	83.7	84.4	85.0
IKU1.3.2	KOTA BER-APM > 83.57%	85.3	86.2	87.2	88.1	89.1	90.0
IKU1.3.3	KABUPATEN > BER-APM 83.57%	71.1	74.9	78.7	82.5	86.2	90.0
IKU1.4	DISPARITAS APK PENDIDIKAN DASAR ANTAR KAB/KOTA	12	12	10	8	5	3
IKU1.5	PERSENTASE PESERTA DIDIK SD/SDLB PUTUS SEKOLAH	1.7	1.5	1.3	1.1	0.9	0.7
IKU1.6	PERSENTASE LULUSAN SD/SDLB YANG MELANJUTKAN KE SMP/SMPLB	90.0	91.4	92.8	94.2	95.6	97.0
IKU1.7	PERSENTASE SD MEMILIKI PERPUSTAKAAN	19.0	43	57	80	94	100
IKU1.8	PERSENTASE SD MEMILIKI SARANA	10	28	46	74	92	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
	KOMPUTER						
IKU1.9	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI SD SBI/RSBI	28.0	39.4	50.8	62.2	73.6	85.0
IKU1.10	PERSENTASE SD/SDLB MENERAPKAN KTSP DG BAIK	32.0	41.6	51.2	60.8	70.4	80.0
IKU 1.11	PERSENTASE SD/SDLB BERSTANDAR SNP AKREDITASI MINIMAL B	30	35	40	50	60	70
IKU1.12	APK SMP/SMPLB	71.7	72.0	73.3	73.7	75.4	76.5
IKU1.12.1	PROPINSI BER-APK > 76.53%	36.4	47.1	57.8	68.5	79.3	90.0
IKU1.12.2	KOTA BER-APK > 76.53%	89.5	87.6	85.7	83.8	81.9	80.0
IKU1.12.3	KABUPATEN > BER-APK 76.53%	34.8	44.8	54.9	64.9	75.0	85.0
IKU1.13	APM SMP/SMPLB	55.37	55.97	56.8	57.1	57.7	58.2
IKU1.13.1	PROPINSI BER-APM > 58.17%	3.0	20.4	37.8	55.2	72.6	90.0
IKU1.13.2	KOTA BER-APM > 58.17%	28.4	38.7	49.1	59.4	69.7	80.0
IKU1.13.3	KABUPATEN > BER-APM 58.17%	3.6	19.9	36.2	52.4	68.7	85.0
IKU1.14	RASIO KESETARAAN GENDER SMP/SMPLB	97.0	97.2	97.4	97.6	97.8	98.0
IKU1.15	PERSENTASE PESERTA DIDIK SMP/SMPLB PUTUS SEKOLAH	1.99	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0
IKU1.16	PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. KOM/TIK	38.5	45.5	52.6	59.6	66.7	73.7
IKU1.17	PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. IPA	72.5	77.5	82.5	87.5	92.5	97.5
IKU1.18	PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI PERPUSTAKAAN	79.5	83.6	87.7	91.8	95.9	100.0
IKU1.19	PERSENTASE KOTA MEMILIKI SMP SBI/RSBI	20	33	46	59	72	85
IKU1.20	PERSENTASE KABUPATEN MEMILIKI SMP SBI/RSBI	44	50	56	63	69	75
IKU1.21	PERSENTASE SMP/SMPLB MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK	33.0	44.4	55.8	67.2	78.6	90.0

Pencapaian target Program Pendidikan TK dan Dasar dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

- (1) Penyediaan Layanan Pendidikan TK
- (2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
- (3) Penyediaan Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas
- (4) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP
- (5) Penyediaan Subsidi Pendidikan SMP/SMPLB Berkualitas
- (6) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK TKLB/SDLB/SMPLB
- (7) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan TK dan Pendidikan Dasar

5.5 Program Pendidikan Menengah

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan tersedia dan terjangkau layanan pendidikan menengah yang bermutu, relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi,

kabupaten, dan kota (T3). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMA bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST3.1);
- (2) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran SMK bermutu yang berbasis keunggulan lokal dan relevan dengan kebutuhan daerah yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST3.1);
- (3) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan SMA/SMLB/SMK bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.1).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU2.1	APK SMA/SMLB/SMK	58.6	61.8	64.6	66.4	68.3	70.7
IKU2.1.1	PROPINSI BER-APK > 70.68%	27.3	39.8	52.4	64.9	77.5	90.0
IKU2.1.2	KOTA BER-APK > 70.68%	71.6	73.3	74.9	76.6	78.3	80.0
IKU2.1.3	KABUPATEN > BER-APK 70.68%	18.3	31.6	45.0	58.3	71.7	85.0
IKU2.2	RASIO KESETARAAN GENDER SMA/SMK/SMLB	72	77	81	86	91	95
IKU2.3	PERSENTASE SMA/SMLB YANG MEMILIKI E-PERPUSTAKAAN	5	10	15	20	25	30
IKU2.4	PERSENTASE SMA/SMLB YANG MEMILIKI LABORATORIUM FISIKA, KIMIA, dan BIOLOGI.	38	52	65	79	92	100
IKU2.5	PERSENTASE SMA/SMLB YANG MEMILIKI LABORATORIUM MULTIMEDIA	3.5	10.0	20.0	35.0	55.0	75.0
IKU2.6	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI SMA SBI/RSBI	18.0	28.4	38.8	49.2	59.6	70.0
IKU2.7	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI SMA BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL	5.0	12.0	19.0	26.0	33.0	40.0
IKU2.8	PERSENTASE SMA/SMLB BERWAWASAN PUP3B	0.0	16.0	32.0	48.0	64.0	80.0
IKU2.9	PERSENTASE SMA/SMLB MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK	60.0	67.0	74.0	81.0	88.0	95.0
IKU2.10	JUMLAH SMA/SMLB BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	0.4	7.0	13.5	20.0	26.6	33.1
IKU2.11	PERSENTASE SMK MEMILIKI PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS MULTIMEDIA.	10	20	40	60	80	100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU2.12	PERSENTASE SMK MEMILIKI BENGKEL KERJA SESUAI DENGAN STANDAR SARANA PRASARANA SMK	60	68	76	84	92	100
IKU2.13	PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATOIRUM SAINS YANG RELEVAN SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	34	47	60	73	86	100
IKU2.14	PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATORIUM BAHASA SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	43	54	66	77	89	100
IKU2.15	PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATORIUM MULTIMEDIA SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	63	70	78	85	93	100
IKU2.16	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI SMK RSBI/SBI	60.0	62.0	64.0	66.0	68.0	70.0
IKU2.17	PERSENTASE KAB/KOTA DG SMK BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL	40.0	49.0	58.0	67.0	76.0	85.0
IKU2.18	PERSENTASE SMK BERWAWASAN PUP3B	0.0	16.0	32.0	48.0	64.0	80.0
IKU2.19	PERSENTASE SMK MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK	50.0	57.0	64.0	71.0	78.0	85.0
IKU2.20	PERSENTASE SMK BERSERTIFIKAT ISO 9001:2000/ 9001:2008	7.0	25.6	44.2	62.8	81.4	100.0
IKU2.21	PERSENTASE SMK BERKEMITRAAN DG INDUSTRI KREATIF	19.2	23.4	27.5	31.7	35.8	40.0

Pencapaian target Program Pendidikan Menengah dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA/SMLB;
- (2) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK;
- (3) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SMA/SMLB;
- (4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Menengah.

5.6 Program Pendidikan Tinggi

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan tersedia dan terjangkau layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional, dan berkesetaraan di semua provinsi (T4).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dosen berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing (ST1.1);
- (2) Peningkatan mutu pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan tridharma yang berdaya saing dan akuntabel (ST1.2);

- (3) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem pembelajaran perguruan tinggi bermutu dan berdaya saing yang merata di seluruh provinsi (ST3.1);
- (4) Peningkatan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing internasional, dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara;
- (5) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan perguruan tinggi bermutu yang merata di seluruh provinsi (ST4.1).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Tinggi

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU3.1	APK PT DAN PTA USIA 19-23 THN *)	21.60%	22.80%	25.10%	26.75%	28.60%	30.0%
IKU3.2	RASIO KESETARAAN GENDER PT	116.7%	111.8%	107.9%	104.6%	104.5%	104.0%
IKU3.3	JUMLAH PTN MENJADI BHPP	0	7	7	12	27	60
IKU3.4	JUMLAH PTS BHPPM	0	50	150	250	400	600
IKU3.5	JUMLAH PTN BERBADAN HUKUM BEROPINI WTP	6	7	9	11	20	37
IKU3.6	JUMLAH PTS BHPPM BEROPINI WTP	0	5	25	75	125	200
IKU3.7	JUMLAH PTN SERTIFIKAT ISO 9001:2008	17%	33%	67%	83%	100%	100%
IKU3.8	JUMLAH PTS SERTIFIKAT ISO 9001:2008	10%	15%	25%	35%	40%	50%
IKU3.9	PERSENTASE PRODI PT BERAKREDITASI MINIMAL B	64.8%	67.8%	70.9%	73.9%	77.0%	80.0%
IKU3.10	JUMLAH PRODI BERAKREDITASI INTERNASIONAL	0	3	3	5	5	7
IKU3.11	JUMLAH PT 300 TERBAIK DUNIA VERSI THES	1	1	2	2	3	3
IKU3.12	JUMLAH PT 500 TERBAIK DUNIA VERSI THES	3	3	5	6	8	11
IKU3.13	JUMLAH PT 200 TERBAIK ASIA VERSI THES	8	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
IKU3.14	JUMLAH PT BERBINTANG 4-5 VERSI QS STAR	0	6.0	9.0	13.0	16.0	20.0
IKU3.15	JUMLAH PT BERBINTANG 1-3 VERSI QS STAR	0	15.0	90.0	150.0	200.0	250.0
IKU3.16	JUMLAH PT BERWAWASAN PUP3B	11	69.0	127.0	184.0	242.0	300.0
IKU3.17	JUMLAH PT BERSERTIFIKAT ISO 17025 (ATAU SETARA)	6	9	13	17	22	27
IKU3.18	JUMLAH PT ANGGOTA GDLN	363	390.0	418.0	445.0	473.0	500.0
IKU3.19	RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S-1	17.20%	19%	21%	24%	27%	30.0%
IKU3.20	APK PRODI SAINS NATURAL DAN TEKNOLOGI (USIA 19-23 TAHUN)	3.63%	4.1%	5.0%	6.0%	8.0%	10.0%
IKU3.21	PERSENTASE DOSEN PROGRAM S-1/DIPLOMA BERKUALIFIKASI MINIMAL S-2	57.8%	62.5%	67.5%	75.0%	82.50%	90%
IKU3.22	PERSENTASE DOSEN PROGRAM PASCA BERKUALIFIKASI S-3	56.2%	60.0%	65.0%	75%	82.50%	90.0%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU3.23	PERSENTASE DOSEN PT BERSERTIFIKAT	15.4%	23.0%	36.0%	49.0%	62.0%	75.0%
IKU3.24	PERSENTASE PT BERAKSES E-JURNAL	23.3%	32.6%	42.0%	51.3%	60.7%	70.0%
IKU3.25	PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI NASIONAL	6.0%	14.8%	23.6%	32.4%	41.2%	50.0%
IKU3.26	PERSENTASE DOSEN PASCA DG PUBLIKASI INTERNASIONAL	0.2%	1.20%	2.20%	3.70%	4.90%	6.5%
IKU3.27	JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN	65	75	95	110	130	150
IKU3.28	PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA BEASISWA	6%	10%	15%	20%	20%	20%

Pencapaian target Program Pendidikan Tinggi dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Penyediaan Layanan Akademik Program Studi;
- (2) Penyediaan Layanan Kelembagaan;
- (3) Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu;
- (4) Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Tinggi.

5.7 Program Pendidikan Nonformal dan Informal

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- (1) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1);
- (2) Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2);
- (3) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu dan Relevan dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3);
- (4) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran PAUD Non Formal bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.2);
- (2) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket A dan B bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.2);
- (3) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran Paket C bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.2);
- (4) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk penerapan sistem pembelajaran pendidikan orang dewasa bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota (ST4.2).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Indikator Kinerja Utama Program Pendidikan Nonformal dan Informal

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU4.1	APK PAUD NON FORMAL	10.68	11.31	11.94	12.57	13.20	13.83
IKU4.2	PERSENTASE SATUAN PAUD NONFORMAL BERAKREDITASI	0.0	0.0	2.5	6.0	10.0	15.0
IKU4.3	APK PAKET A	0.50	0.56	0.57	0.58	0.58	0.57
IKU4.4	APK PAKET B	3.78	3.75	3.75	3.73	3.74	3.75
IKU4.5	APK PAKET C	1.92	1.99	2.05	2.11	2.17	2.22
IKU4.6	PERSENTASE BUTA AKSARA > 15 TAHUN	5.7	5.4	5.2	4.8	4.5	4.2
IKU4.6.1	PERSENTASE PROVINSI DENGAN TINGKAT BUTA AKSARA < 4.2%	69.7	74.8	79.8	84.9	89.9	95.0
IKU4.6.2	PERSENTASE KOTA DENGAN TINGKAT BUTA AKSARA < 4.2%	70.0	75.0	80.0	85.0	90.0	95.0
IKU4.6.3	PERSENTASE KAB DENGAN TINGKAT BUTA AKSARA < 4.2%	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	85.0
IKU4.7	RASIO KESETARAAN GENDER PENUNTASAN BUTA AKSARA	97.3	97.6	97.8	98.0	98.0	98.0
IKU4.8	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI SKB	75.9	78.9	81.9	84.9	87.9	90.0
IKU4.9	PERSENTASE KECAMATAN YANG TELAH MEMILIKI PKBM	40.0	48.0	56.0	64.0	72.0	80.0
IKU4.10	PERSENTASE KECAMATAN YANG TELAH MEMILIKI TBM	40.0	48.0	56.0	64.0	72.0	80.0
IKU4.11	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MENGARUSUTAMAKAN GENDER	5.0	14.0	23.0	32.0	41.0	50.0
IKU4.12	PERSENTASE LULUSAN PKH BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	4	5	10	15	20	25
IKU4.13	PERSENTASE PEMEGANG SUKMA MENEMPUH PKH	2	5	9	16	19	20
IKU4.14	PERSENTASE REMAJA 16-35TH TAK SEKOLAH MENGIKUTI PKH	12.0	15.6	19.2	22.8	26.4	30.0
IKU 4.15	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PARENTING EDUCATION	0%	0%	10%	20%	35%	50%
IKU 4.16	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYEDIAKAN LAYANAN FASILITASI HOMESCHOOLING	0%	0%	10%	20%	35%	50%

Pencapaian target Program Pendidikan Nonformal dan Informal dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Penyediaan Layanan PAUD Non Formal;
- (2) Penyediaan Layanan Pendidikan Kesetaraan;
- (3) Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan;
- (4) Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat;
- (5) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Nonformal dan Informal;

5.8 Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- (1) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1);
- (2) Terjaminnya Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2);
- (3) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3);
- (4) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut:

- (1) Penyediaan pendidik PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten/kota yang meliputi pemenuhan guru TK/TKLB berkompeten; penyediaan tutor PAUD nonformal berkompeten (ST1.1);
- (2) Penyediaan manajemen PAUD berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi (ST2.1);
- (3) Penyediaan pendidik pendidikan dasar berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta tutor Paket A dan Paket B berkompeten (ST1.1);
- (4) Penyediaan manajemen SD/SDLB dan SMP/SMPLB serta Paket A dan Paket B berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi (ST2.1).
- (5) Penyediaan pendidik pendidikan menengah berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan guru SMA/SMLB/SMK serta tutor Paket C berkompeten (ST1.1);
- (6) Penyediaan manajemen SMA/SMLB/SMK serta Paket C berkompeten yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan kepala satuan pendidikan, pengawas, dan tenaga administrasi (ST2.1);
- (7) Penyediaan tutor berkompeten yang merata antarprovinsi, kabupaten, dan kota yang meliputi pemenuhan tutor keaksaraan fungsional dan pendidikan kecakapan hidup berkompeten (ST1.1);

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5

Indikator Kinerja Utama Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU5.1	PERSENTASE GURU TK/TKLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	14.49	15.30	16.40	22.50	55	85.00
IKU5.2	PERSENTASE PENDIDIK PAUD NON FORMAL BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D-4	5	7	10	15	20	25
IKU5.3	PERSENTASE GURU TK/TKLB FORMAL BERSERTIFIKAT PENDIDIK	9.70	12	13	22	60	85.00
IKU5.4	PERSENTASE GURU TK/TKLB MENGIKUTI PPB	5	15	25	35	45	55
IKU5.5	PERSENTASE TUTOR PAUD NON FORMAL MENGIKUTI PPB	5	15	25	35	45	55
IKU5.6	PERSENTASE KEPALA TK/TKLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	45	70	90
IKU5.7	PERSENTASE TK/TKLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	53	60	67	74	80	90
IKU5.8	PERSENTASE GURU SD/SDLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	24.59	35.60	46.30	57.90	68	82.00
IKU5.9	PERSENTASE GURU SD/SDLB BERSERTIFIKAT PENDIDIK	14.00	26.30	40.40	54.90	67.50	80.00
IKU5.10	PERSENTASE GURU SD/SDLB MENGIKUTI PPB	14.00	25.30	37.3	51.30	65.30	80.00
IKU5.11	PERSENTASE TUTOR PAKET A MENGIKUTI PPB	6.00	15.80	25.60	35.40	45.20	55.00
IKU5.12	PERSENTASE KEPALA SD/SDLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	45	70	90
IKU5.13	PERSENTASE PENGAWAS SD/SDLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	50	70	95
IKU5.14	PERSENTASE SD/SDLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	70	75	80	85	90	95
IKU5.15	PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4	73.39	77.10	82.80	87.20	92.30	98.00
IKU5.16	PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERSERTIFIKAT PENDIDIK	32.80	44.00	56.00	67.00	79.00	90.00
IKU5.17	PERSENTASE GURU SMP/SMPLB MENGIKUTI PPB	32.80	44.00	56.00	67.00	79.00	90.00
IKU5.18	PERSENTASE TUTOR PAKET B MENGIKUTI PPB	7.00	16.60	26.20	35.80	45.40	55.00
IKU5.19	PERSENTASE KEPALA SMP/SMPLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	45	70	90
IKU5.20	PERSENTASE PENGAWAS SMP/SMPLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	50	75	90
IKU5.21	PERSENTASE SMP/SMPLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	66	71	76	81	86	92
IKU5.22	PERSENTASE GURU SMA/SMLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	91.16	92.20	93.90	95.80	97.30	98.00
IKU5.23	PERSENTASE GURU SMA/SMLB BERSERTIFIKAT PENDIDIK	41.00	51.00	61.00	70.00	80.00	90.00
IKU5.24	PERSENTASE GURU SMA /SMLB YANG MENGIKUTI PPB	41.00	51.00	61.00	70.00	80.00	90.00
IKU5.25	PERSENTASE TUTOR PAKET C YANG MENGIKUTI PPB	5.00	14.00	23.00	32.00	41.00	50.00
IKU5.26	PERSENTASE KEPALA SMA/SMLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	45	70	90
IKU5.27	PERSENTASE PENGAWAS SMA/SMLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	50	75	90
IKU5.28	PERSENTASE SMA/SMLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	69	74	79	87	92	95.

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU5.29	PERSENTASE GURU SMK BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	85.77	87.60	89.50	93.60	95.40	98.00
IKU5.30	PERSENTASE GURU SMK BERSERTIFIKAT PENDIDIK	32.00	44.00	55.00	67.00	78.00	90.00
IKU5.31	PERSENTASE GURU SMK BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	15.00	18.00	21.00	24.00	27.00	30.00
IKU5.32	PERSENTASE GURU SMK YANG MENGIKUTI PPB	32.00	44.00	55.00	67.00	78.00	90.00
IKU5.33	PERSENTASE KEPALA SMK MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	45	70	90
IKU5.34	PERSENTASE PENGAWAS SMK MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5	10	25	50	75	95
IKU5.35	PERSENTASE TUTOR PAKET C KEJURUAN YANG MENGIKUTI PPB	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	25.00
IKU5.36	PERSENTASE SMK YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	69	75	81	86	90	95
IKU5.37	PERSENTASE TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN MENGIKUTI PPB	30.00	38.00	46.00	54.00	62.00	70.00
IKU5.38	PERSENTASE PENDIDIK KURSUS MENGIKUTI DIKLAT KOMPETENSI	10.00	19.00	28.00	37.00	46.00	55.00
IKU5.39	PERSENTASE PAMONG BELAJAR MENGIKUTI PPB	50	52	54	56	58	60
IKU5.40	PERSENTASE PENILIK YANG MENGIKUTI PPB	50	60	70	75	85	90
IKU5.41	PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG MENGIKUTI DIKLAT KOMPETENSI	45	55	60	65	75	80
IKU5.42	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMPEROLEH KESEJAHTERAAN	5	10	15	20	25	30

Pencapaian target Program Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Penyediaan Guru untuk Seluruh Jenjang Pendidikan;
- (2) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal;
- (3) Peningkatan mutu dan Pembinaan lembaga diklat dan penjaminan mutu pendidikan;
- (4) Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (5) Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;
- (6) Penyediaan Tenaga Kependidikan Formal untuk Seluruh Jenjang Pendidikan;
- (7) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PMPTK.

5.9 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T6). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penguatan kelembagaan, prosedur kerja, dan sumberdaya manusia Kemendiknas (ST5.1);

(2) Penguatan sistem perencanaan di lingkungan Kemendiknas (ST5.2);

(3) Penguatan sistem pencatatan di lingkungan Kemendiknas (ST5.3).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6

Indikator Kinerja Utama Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU.6.1	PERSENTASE SATKER UPT PUSAT DI DAERAH YANG MENERAPKAN STANDAR ISO 9001-2008	10	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0
IKU.6.2	PERSENTASE SATKER DI LINGKUNGAN UNIT UTAMA YANG MENERAPKAN STANDAR ISO 9001-2008	0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
IKU.6.3	SKOR LAKIP KEMENTERIAN	75	76	77	77	78	79
IKU.6.4	LAPORAN KEUANGAN UNIT-UNIT UTAMA TERINTEGRASI/TERKONSOLIDASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75,5	100	100	100	100	100
IKU.6.5	PERSENTASE UNIT UTAMA YANG MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA	40	50.0	75.0	100.0	100.0	100.0
IKU.6.6	PERSENTASE SATUAN KERJA YANG TINGKAT KEHADIRAN PEGAWAINYA TIDAK KURANG DARI 99% (BASIS : OH)	30	95.0	98.0	99.0	100.0	100.0
IKU.6.7	PERSENTASE SATKER KEMENTERIAN TERKONEKSI SECARA DARING (<i>ONLINE</i>)	90	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
IKU.6.8	TINGKAT PENERAPAN E-ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN (PERSEN)	84	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0
IKU.6.9	SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN (<i>DECISION SUPPORT SYSTEM</i>) DITERAPKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SECARA OPTIMAL.	60	80	100	100	100	100
IKU.6.10	SISTEM REMUNERASI BERBASIS KINERJA DITERAPKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN	0	0	0	100	100	100
IKU.6.11	PERSENTASE MATA PELAJARAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG HAK CIPTA BUKU TEKSNYA TELAH DIBELI (N TOTAL= 885 JILID MAPEL)	29	52,0	64,0	76,0	88.0	100.0
IKU.6.12	JUMLAH BAHASA DAERAH TERPETAKAN (N total = 746)	38	510	590	670	725	746
IKU.6.13	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN UNIT KERJA TERKONEKSI KE SISTEM PEMBELAJARAN DARING (<i>ONLINE</i>)	35	28.0	40.0	52.0	64.0	76.0
IKU.6.14	PERSENTASE PROVINSI YANG MEMILIKI MINIMAL SATU SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH YANG TELAH MENJADI PERCONTOHAN SEKOLAH SEHAT	21	50	75	100	100	100
IKU.6.15	PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN YANG DISAHKAN OLEH DEPKEU PADA BULAN PERTAMA SETIAP TAHUNNYA (TANPA BLOKIR)	90	90	95	98	98	98
IKU.6.16	PERSENTASE KERJA SAMA BILATERAL, REGIONAL, DAN MULTILATERAL BIDANG PENDIDIKAN YANG DITINDAKLANJUTI	70%	90%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian target Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendiknas dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

- (1) Peningkatan Layanan Prima dalam Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendiknas;
- (2) Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pelayanan Umum Kementerian;
- (3) Peningkatan Layanan Prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana dan Prasarana Kementerian;
- (4) Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran;
- (5) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian yang Andal;
- (6) Peningkatan Layanan Prima di Bidang Hukum dan Organisasi;
- (7) Peningkatan Layanan Prima di Bidang Informasi dan Kehumasan;
- (8) Peningkatan Layanan Prima dalam Menunjang Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
- (9) Penyediaan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah;
- (10) Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendayagunaan E-Pembelajaran dan E-Administrasi;
- (11) Pengkajian, Pengembangan, Pembinaan, dan Pelayanan Kebahasaan dan Kesastraan;
- (12) Peningkatan Kualitas Jasmani Peserta Didik dan Pengembangan Sekolah Sehat;
- (13) Pengembangan Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh (PTJJ) di Asia Tenggara.

5.10 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendiknas

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan (T6). Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi Penguatan Sistem Pengawasan Internal (ST5.4). Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7

Indikator Kinerja Utama Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendiknas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009) (%)	TAHUN				
			2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
IKU7.1	PERSENTASE SATKER DENGAN TEMUAN AUDIT BERKONSEKUENSI PENYETORAN KE KAS NEGARA > 500 JUTA	21.0	18.0	15.0	12.0	9.0	6.0
IKU7.2	PERSENTASE SATKER DI LINGKUNGAN KEMENDIKNAS MEMILIKI SPI	8.5	45	80	100	100	100
IKU7.3	PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT	72,2	73,3	75.1	76.9	78.8	80.7

Pencapaian target Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendiknas dicapai melalui kegiatan berikut.

1. Penguatan dan Perluasan Pengawasan yang Akuntabel Wilayah I, II, III, dan IV;
2. Audit Investigasi;
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Inspektorat Jenderal.

5.11 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

Program ini dilakukan untuk mendukung tujuan sebagai berikut.

- (1) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan PAUD Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T1);
- (2) Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T2);
- (3) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Menengah yang Bermutu, Relevan, dan Berkesetaraan di Semua Provinsi, Kabupaten dan Kota (T3);
- (4) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Tinggi Bermutu, Relevan, Berdaya Saing Internasional dan Berkesetaraan di Semua Provinsi (T4);
- (5) Tersedia dan Terjangkaunya Layanan Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang Bermutu dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat (T5).

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

- (1) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu PAUD, serta keterlaksanaan akreditasi PAUD (ST2.1, ST2.2);
- (2) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu Pendidikan Dasar, serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Dasar (ST2.1, ST2.2);
- (3) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu Pendidikan Menengah, serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Menengah (ST2.1, ST2.2);
- (4) Penyediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu Pendidikan Tinggi serta keterlaksanaan akreditasi Pendidikan Tinggi (ST2.1, ST2.2);
- (5) Penyediaan dan pengembangan sistem pembelajaran, data dan informasi berbasis riset, dan standar mutu pendidikan keaksaraan fungsional, pendidikan kecakapan hidup, *homeschooling* dan *parenting education* serta keterlaksanaan akreditasi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan orang dewasa (ST2.1, ST2.2).

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.8.

Tabel 5.8 Indikator Kinerja Utama Program Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2009)	TAHUN				
			2010	2011	2012	2013	2014
IKU8.1	PERSENTASE SATUAN PAUD FORMAL DIAKREDITASI	48.2%	55.6%	62.9%	70.3%	77.6%	85.0%
IKU8.2	PERSENTASE SATUAN PAUD NONFORMAL DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	2.5%	6.0%	10.0%	15.0%
IKU8.3	PERSENTASE SD/SDLB DIAKREDITASI	65.4%	70.2%	75.2%	80.1%	85.1%	90.0%
IKU8.4	PERSENTASE PROGRAM PAKET A DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	27.0%	40.0%
IKU8.5	PERSENTASE SMP/SMPLB DIAKREDITASI	0.61	66.8%	72.6%	78.4%	84.2%	90.0%
IKU8.6	PERSENTASE PROGRAM PAKET B DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	27.0%	40.0%
IKU8.7	PERSENTASE SMA/SMLB DIAKREDITASI	64.7%	70.7%	76.8%	82.9%	88.9%	95.0%
IKU8.8	PERSENTASE PROGRAM PAKET C DIAKREDITASI	2.0%	5.0%	10.0%	22.0%	35.0%	50.0%
IKU8.9	PERSENTASE PROGRAM PAKET C KEJURUAN DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	25.0%
IKU8.10	PERSENTASE PRODI PT DIAKREDITASI	69.6%	73.7%	77.8%	81.8%	85.9%	90.0%
IKU8.11	JUMLAH PRODI DIAKREDITASI INTERNASIONAL	47	47	57	57	57	94
IKU8.12	PERSENTASE PROGRAM KEAHLIAN LKP DIAKREDITASI	3%	6%	11%	17%	24%	30%
IKU8.13	PERSENTASE PKBM DIAKREDITASI	1.3%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%
IKU8.14	JUMLAH MODEL PEMBELAJARAN PAUD	2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
IKU8.15	PERSENTASE PAUD YANG MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN SECARA MANDIRI	24%	31%	38%	45%	52%	60%
IKU8.16	JUMLAH MODEL KURIKULUM DIKDAS	17	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
IKU8.17	PERSENTASE SATUAN DIKDAS YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM SECARA MANDIRI	32%	39%	46%	53%	60%	67%
IKU8.18	JUMLAH MODEL KURIKULUM DIKMEN	7	11	11	11	11	11
IKU8.19	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM SECARA MANDIRI	33,5%	46%	57%	68%	79%	90%

Pencapaian target Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dicapai melalui kegiatan berikut.

- (1) Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi;
- (2) Penyempurnaan Sistem Pembelajaran;
- (3) Penyediaan Data Pendidikan;
- (4) Penyediaan Informasi untuk Perumusan Kebijakan Pendidikan;
- (5) Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan;
- (6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas.

BAB VI

KERANGKA IMPLEMENTASI

Guna mendukung keberhasilan yang terukur implementasi program-program pendidikan nasional perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut : (i) Strategi Pendanaan Pendidikan; (ii) Sistem Koordinasi, Tata kelola dan Pengawasan Internal; (iii) Sistem Pemantauan dan Evaluasi dan (iv) Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu.

6.1 Strategi Pendanaan Pendidikan

6.1.1 Prinsip Pendanaan Pendidikan

UUD RI 1945 dalam Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut UU Sisdiknas menetapkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Untuk memperkuat penyediaan dan pengelolaan dana pendidikan, pemerintah melalui UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menetapkan bahwa seluruh satuan pendidikan formal harus berbentuk BHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan mengatur pembagian tanggung jawab pendanaan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar, menengah dan tinggi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk satuan pendidikan. Dalam hal ini ada komponen pendanaan yang menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, pemerintah daerah, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah seperti dijabar pada Tabel 6.1

Tabel 6.1
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan
Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Pemerintah/Pemda	
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemerintah/Pemda	Pemerintah/Pemda/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Pemerintah/Pemda/Masy./Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Pemerintah/Pemda	
2.	Biaya Non Personalia	Pemerintah/Pemda	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Pemerintah/Pemda	
VI	Pendanaan Pendidikan di Luar Negeri	Pemerintah	

Bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ada komponen pendanaan yang ditanggung oleh penyelenggara/masyarakat yang bersangkutan dan ada pula yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah seperti disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Pembagian Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan Oleh Penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
I	Biaya Investasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	Tambahan sampai Menjadi SBI/Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
II	Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Investasi Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Investasi Selain Lahan	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	

No	JENIS BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	
		PENDIDIKAN DASAR	PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI
III	Biaya Operasi Satuan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
2.	Biaya Non Personalia		
a.	Sekolah Standar Nasional	Pemda	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Masy.
b.	SBI/ Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	
IV	Biaya Operasi Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau Pengelolaan Pendidikan		
1.	Biaya Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
2.	Biaya Non Personalia	Penyelenggara/Satuan Pendidikan	
V	Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa	Penyelenggara/Satuan Pendidikan/Orang Tua/Masy. di luar orang tua/Pemerintah/Pemda/Pihak Asing	

Selain oleh penyelenggara dan satuan pendidikan, pendanaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik. Tanggung jawab tersebut adalah (a) biaya pribadi peserta didik; (b) pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (c) pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; (d) pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan (e) pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pendanaan Pendidikan dapat diperoleh juga dari masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dengan syarat diberikan secara sukarela, dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan, dan diaudit oleh akuntan publik serta diumumkan secara transparan di

media cetak berskala nasional dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Pendidikan Nasional apabila jumlahnya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

6.1.2 Skenario Pendanaan Pendidikan Nasional

Skenario pendanaan pendidikan dalam kurun waktu 2010--2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 dan UU Sisdiknas serta melanjutkan fungsi dan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005—2025, yaitu (a) memperjelas pemihakan terhadap masyarakat miskin; (b) penguatan desentralisasi dan otonomi pendidikan; dan (c) insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pelaksanaan ketiga fungsi pendanaan pendidikan tersebut bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian tanggung jawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Sejak tahun anggaran 2009 amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas (sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 13 Tahun 2008) telah dipenuhi oleh pemerintah dengan menyediakan anggaran pendidikan 20% dari APBN. Total anggaran tahun 2009 mencapai Rp207 triliun atau 20% dari APBN sebesar Rp1.037 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4% dan tingkat inflasi 3,5%. Berikutnya APBN tahun 2010 diperkirakan mencapai Rp1.038 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% dan tingkat inflasi 5%. Pada tahun 2014 diperkirakan APBN akan mencapai Rp1.583 triliun dengan asumsi pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2% dan tingkat inflasi 4%.

Perkiraan anggaran pembangunan pendidikan untuk melaksanakan fokus prioritas program pembangunan pendidikan nasional pada Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, dan kementerian lain serta anggaran pendidikan yang dialokasikan ke provinsi, kabupaten, dan kota dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang ditargetkan pemerintah dalam RPJMN 2010--2014 adalah seperti dirangkum dalam Tabel 6.3.

Tabel 6.3. Perkiraan Penerimaan dan Anggaran Pendidikan

Komponen Anggaran Fungsi Pendidikan	Anggaran (RpMilyar)				
	2010	2011	2012	2013	2014
I Alokasi Pemerintah Pusat	83.687,15	94.520,42	103.860,11	114.747,05	128.898,37
1. Departemen Pendidikan Nasional	55.208,39 ¹⁾	64.468,06 ¹⁾	72.008,56 ¹⁾	80.838,16 ¹⁾	92.633,06 ¹⁾
a BOS dan BOMM	17.066,46	17.321,14	17.575,82	17.830,50	18.085,17
b Tunjangan Profesi Dosen Kumulatif	912,00	1.681,00	2.560,00	3.668,00	4.878,00
c Tunjangan Profesi Guru Non PNS Kumulatif	1.342,69	2.025,34	3.345,66	4.520,43	5.980,65
d Tunjangan Profesi Guru Tahun Berjalan	4.608,55	6.952,26	11.484,45	15.517,07	20.529,47
e Kegiatan Prioritas dan Pemenuhan SNP	7.958,83	8.380,65	8.799,68	9.195,66	9.637,06
f Belanja Mengikat	7.612,61	8.234,57	8.856,53	9.478,49	10.100,45
g PNBP	6.416,13	6.756,18	7.093,99	7.413,22	7.769,06
h Kegiatan Prioritas Renstra lainnya	9.291,12	13.116,92	12.292,43	13.214,79	15.653,21
i Renumerasi Berbasis Kinerja	-	2.520,00	2.646,00	2.778,30	2.917,22
2. Departemen Agama	23.853,44	25.403,92 ²⁾	27.182,19	29.220,86	31.558,53
3. 14 K/L Lainnya	4.625,32	4.648,44 ³⁾	4.669,36	4.688,04	4.706,79
4. Bagian Anggaran 069	-	-	-	-	-
II Transfer Ke Daerah	126.363,10	144.366,42	161.594,46	180.214,91	201.891,29
1 DBH Pendidikan	617,00	691,93	777,39	873,30	988,43
2 DAK Pendidikan	12.566,60	12.629,43	12.692,58	12.057,95	11.455,05
3 DAU Pendidikan	110.890,40	128.634,63	145.593,56	164.638,83	186.676,02
a Non Gaji	9.538,10	10.491,91	11.541,10	12.695,21	13.964,73
b Gaji	84.557,40	93.013,14	102.314,45	112.545,90	123.800,49
c Tunjangan Profesi	8.854,90	17.149,88	23.722,39	31.350,05	40.830,93
d Tambahan Tunjangan Kependidikan	7.940,00	7.979,70	8.015,61	8.047,67	8.079,86
4 Dana Otonomi Khusus Pendidikan	2.289,10	2.410,42	2.530,94	2.644,84	2.771,79
Anggaran Fungsi Pendidikan	210.050,25	238.886,84	265.454,57	294.961,96	330.789,66
ESTIMASI APBN	1.047.665,90	1.174.899,69	1.319.999,80	1.482.854,77	1.678.354,34
Anggaran Fungsi Pendidikan 20% ASUMSI AGRESIF	209.533,18	234.979,94	263.999,96	296.570,95	335.670,87
PERTUMBUHAN EKONOMI	5,5%	6,5%	7,0%	7,5%	8,0%
INFLASI	5,1%	5,3%	5,0%	4,5%	4,8%

Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2014, anggaran pendidikan dalam APBN mencapai Rp326,73 triliun dengan distribusi Rp124,93 triliun merupakan anggaran pendidikan yang ada di dalam anggaran belanja pusat dan Rp201,79 triliun yang ditransfer ke dalam belanja daerah melalui DAU, DAK, dana otonomi khusus pendidikan, dan dana bagi hasil.

6.2 Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan antarinstansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di lingkungan kemendiknas.

6.2.1. Koordinasi Perencanaan Pendidikan Nasional

Kegiatan koordinasi penyusunan Renstra pendidikan secara nasional dilakukan melalui forum rembuk nasional, musyawarah perencanaan nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan pendidikan lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi perencanaan pendidikan adalah Kemendiknas, Kementerian Agama, Kementerian lain, Kementerian Keuangan, Bappenas, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota, serta perguruan tinggi, yang menyusun Renstra pendidikan secara otonomi.

6.2.2. Tata Kelola

Implementasi Renstra Kementerian Pendidikan Nasional 2010--2014 oleh Kemendiknas, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran IKK pendidikan nasional. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra.

6.2.3. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat Kementerian, dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk Dinas Pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan terhadap semua peraturan yang berlaku. Pengawasan internal bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem tata kelola Kementerian dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya unit pengawas internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra Kemendiknas.

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu (i) atasan langsung; dan unit pengawasan independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit pengawasan Kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan yang bertanggung jawab kepada DPR-RI.

6.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

6.3.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra

Kemendiknas 2010--2014 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program pendidikan nasional di setiap satuan, jenjang, jenis, dan jalur pendidikan secara berkala.

6.3.2 Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sah dan andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (3) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan kemitraan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten dan kota, cabang dinas pendidikan kecamatan, dan satuan pendidikan.

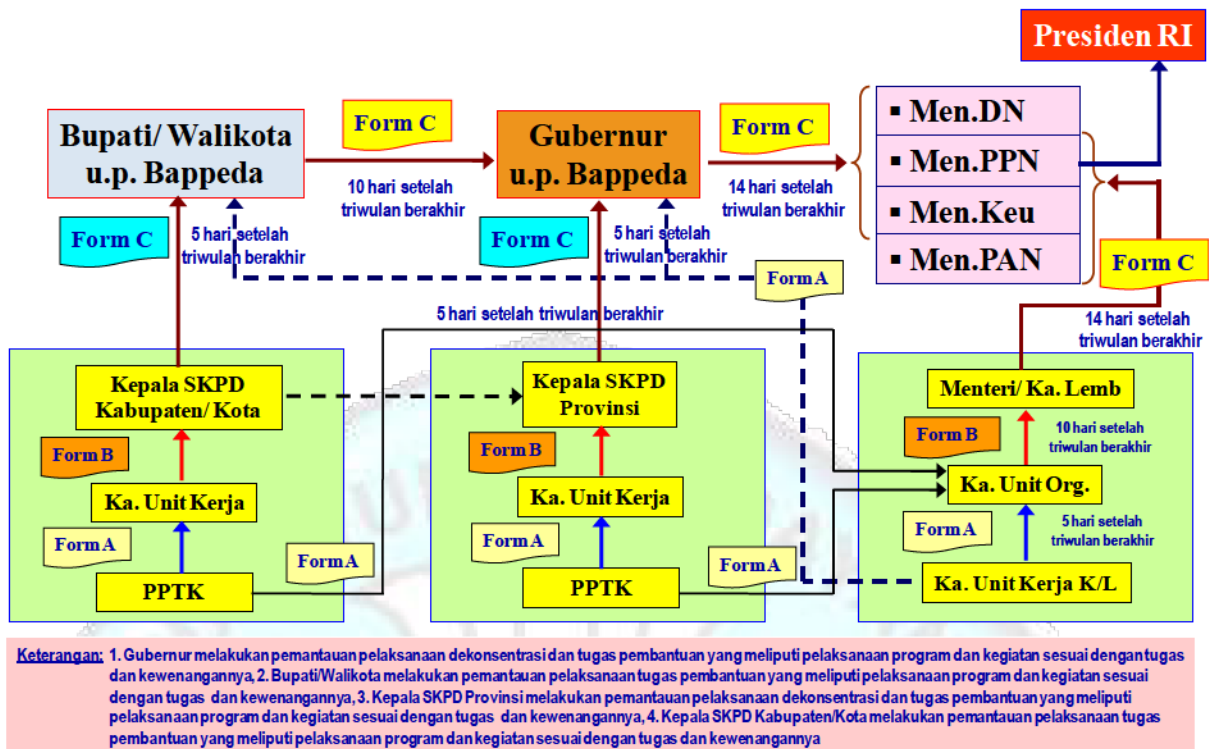
6.3.3 Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah berjalan di lingkungan Kemendiknas meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan triwulanan, (b) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemendiknas, (c) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (d) evaluasi kinerja tengah periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemendiknas, (e) evaluasi akhir masa Renstra.

6.3.4 Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan dapat dilihat pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan rencana pembangunan pendidikan

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai masukan bagi BSNP, BAN-SM, BAN-PT, BAN-PNF, dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan dan evaluasi program, kegiatan serta hasil belajar tingkat nasional.

6.3.5 Pemantauan dan Evaluasi Renstra oleh SKPD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Satuan Pendidikan

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai berikut.

a. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan provinsi; (b) memperbaiki kinerja aparatur pemda kabupaten dan kota, kecamatan, dan satuan pendidikan; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target pembangunan pendidikan pada kabupaten dan kota tersebut sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2010-2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan pendidikan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan pendidikan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Pendidikan

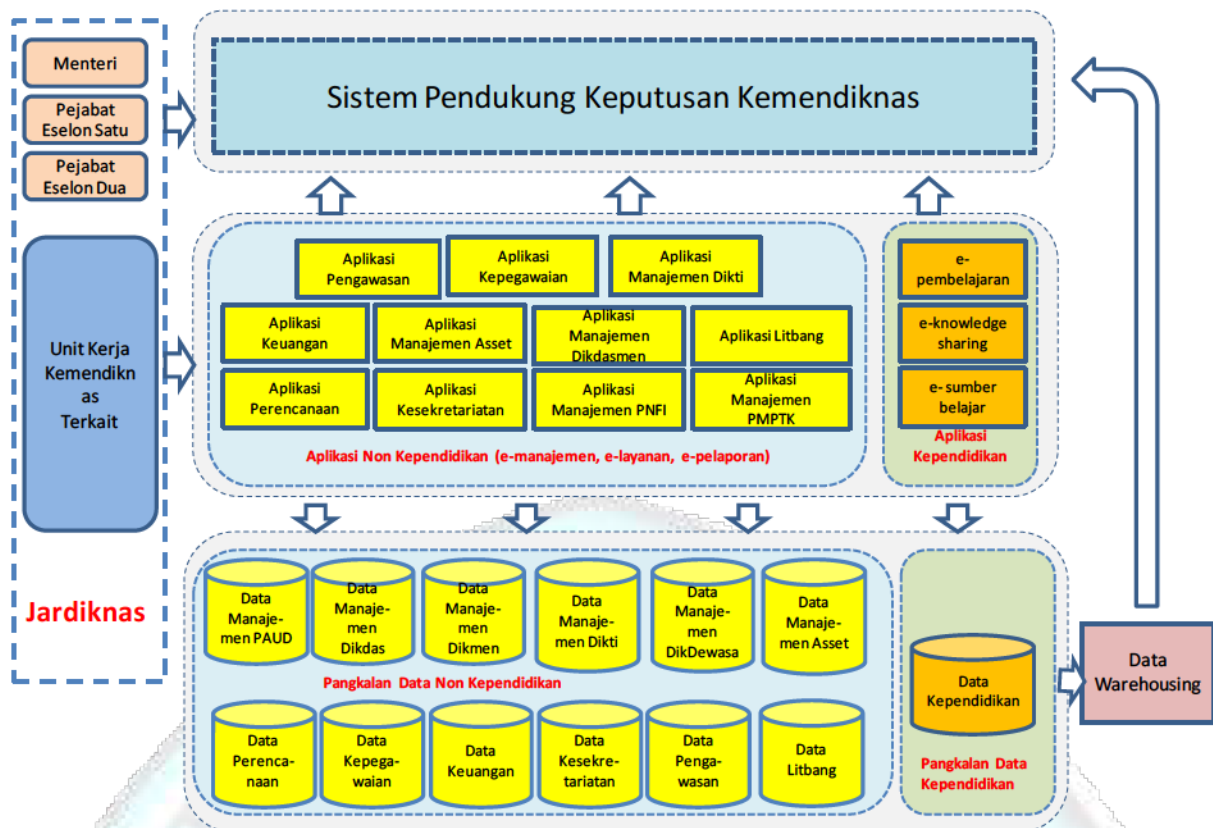
Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan pendidikan adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan pendidikan yang bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja.

d. Pemantauan dan Evaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

Pemantauan yang dilakukan BSNP bertujuan untuk mengevaluasi capaian Standar Nasional Pendidikan. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar nasional yang dijadikan dasar dalam mengembangkan model intervensi, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga mencapai standar nasional serta membantu BAN-SM, BAN- PNF, dan BAN-PT dalam mengakreditasi satuan pendidikan.

6.4 Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu

Dalam rangka mendukung tercapainya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik, diperlukan sistem dan teknologi informasi secara terpadu yang mampu meningkatkan pelayanan dan mendukung penyediaan informasi dan pelaporan bagi penentu kebijakan pendidikan dan pemangku kepentingan serta penyelenggaraan pembelajaran secara tepat, transparan, akuntabel, dan efisien. Gambar 6.2 menunjukkan arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendiknas sesuai dengan Permendiknas No 38 tahun 2008.



Gambar 6.2. Arsitektur Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas

Untuk mengimplementasikan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu di lingkungan Kemendiknas perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut (i) Strategi Pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus selaras dengan Visi dan Misi Kemendiknas (ii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus mampu mendukung manajemen Kemendiknas dalam mengambil keputusan secara cepat, efisien dan efektif termasuk mengatur wewenang pendistribusian informasi. (iii) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus fleksibel untuk mengantisipasi berbagai perubahan termasuk dilakukannya reformasi birokrasi dan organisasi. (iv) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus menjamin keamanan dan kesahihan data serta menjamin efisiensi pengelolaan pangkalan data sehingga tidak terjadi *data redundancy*. (v) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus mampu menjadi sarana untuk mendukung pemberian layanan pendidikan termasuk e-pembelajaran, *e-knowledge sharing* dan e-sumber belajar; (vi) Sistem dan Teknologi Informasi Kemendiknas harus mendukung tercapainya Sistem Tata Kelola Kemendiknas termasuk sistem pengawasan dan evaluasi, pelaporan yang handal, efektif dan efisien; (viii) Guna menjamin keterpaduan perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan Master Plan Sistem dan Teknologi Informasi Terpadu Kemendiknas yang selaras dengan Rencana Strategis Kemendiknas.

Daftar Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Pendidikan Tahun 2010--2014

Aspek	Akar Permasalahan	Rekomendasi Stakeholder	Keterkaitan dengan Tantangan
Peraturan Turunan	Belum tersedianya peraturan perundangan turunan dari Undang-undang di bidang Pendidikan	Perlu nya melakukan koordinasi dengan K/L terkait untuk mempercepat penerbitan peraturan perundangan turunan di bidang pendidikan	Melengkapi peraturan perundangan turunan yang diamanatkan undang-undang di bidang pendidikan. [TT1]
Literasi Keaksaraan	Masih terdapat provinsi yang angka literasinya di bawah target nasional	Perlu program literasi yang lebih intensif	Mengembangkan kebijakan terobosan untuk Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), dan Education for Sustainable Development (EfSD). [TT2]
Kualitas Pendidikan Indonesia di kancah global	Masih rendahnya prestasi pendidikan Indonesia dalam kancah internasional seperti TIMSS dan PISA	Peningkatan kualitas sistem pendidikan secara menyeluruh.	Mengembangkan kebijakan terobosan untuk Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium Development Goals (MDGs), Education For All (EFA), dan Education for Sustainable Development (EfSD). [TT2]
Pendidikan di daerah terdepan, terpencil dan rawan bencana	Kurangnya perhatian kesejahteraan pada guru-guru di daerah terdepan, terpencil dan rawan bencana	Perlu adanya tunjangan khusus untuk guru-guru di daerah terdepan, terpencil dan rawan bencana yang didasarkan pada indeks kemahalan	Menjamin tingkat kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan di daerah terdepan, terpencil dan rawan bencana [TT3]
Hak untuk memperoleh akses pendidikan pada masyarakat miskin	Masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belum memperoleh akses pendidikan	Perlu nya jaminan akses pendidikan bagi masyarakat miskin	Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses pendidikan berkualitas seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan [TT4]
Muatan materi kurikulum	Kurikulum pendidikan sarat dengan materi tambahan yang tidak relevan dengan proses tumbuh kembang anak.	Perlu nya muatan materi kurikulum mengacu kepada standar isi dan memperhatikan potensi peserta didik	Menerapkan Standar Nasional Pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara olahpikir, olahraga, olahhati, dan olahraga; [TT5]
Perekrutan dan penempatan tenaga pendidik	Belum sepenuhnya pelaksanaan peraturan perundangan terkait perekrutan dan penempatan tenaga pendidik	Peningkatan koordinasi terkait perekrutan dan penempatan tenaga pendidik	Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme. [TT6]

Aspek	Akar Permasalahan	Rekomendasi Stakeholder	Keterkaitan dengan Tantangan
Perekrutan dan penempatan tenaga pendidik	Masih adanya tenaga pendidik tidak relevan dengan latar belakang pendidikan	Peningkatan koordinasi terkait perekrutan dan penempatan tenaga pendidik	Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme. [TT6]
Kinerja Guru dan Dosen tersertifikasi.	Belum tampaknya peningkatan kinerja guru dan dosen yang tersertifikasi.	Perlu adanya evaluasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap guru dan dosen yang tersertifikasi.	Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme. [TT6]
Remunerasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Belum diterapkannya remunerasi yang mempertimbangkan prestasi	Perlu adanya sistem remunerasi berbasis kinerja	Mengembangkan kebijakan pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan dengan memperhatikan profesionalisme. [TT6]
Partisipasi Pendidikan	Tingginya disparitas angka partisipasi antarwilayah	Memfasilitasi pemerataan akses pendidikan	Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah [TT7]
Rasio guru terhadap peserta didik	Tingginya disparitas Rasio guru terhadap peserta didik antarwilayah	Pemerataan distribusi guru	Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah [TT7]
Kualifikasi Guru	Terjadinya Disparitas kualifikasi guru	Pemberian perluasan akses bagi guru untuk studi lanjut	Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah [TT7]
Standar Pelayanan Minimal di Perguruan Tinggi	Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Perguruan Tinggi.	Perlu nya SPM untuk penjaminan kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi.	Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah [TT7]
Penyelenggaraan pendidikan dasar menengah	Masih terdapat ketidakmerataan bantuan pendidikan terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat	Perlu pemerataan bantuan pendidikan terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat	Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah [TT7]
Kategori satuan pendidikan	Masih terdapat tingginya disparitas kategori satuan pendidikan dan antarwilayah	Prioritas peningkatan kualitas sekolah diperuntukkan bagi satuan pendidikan yang belum berkategori SPM.	Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah [TT7]

Aspek	Akar Permasalahan	Rekomendasi Stakeholder	Keterkaitan dengan Tantangan
Kategori satuan pendidikan	Belum efektifnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh setiap pemerintah kabupaten dan pemerintah kota	Prioritas peningkatan kualitas sekolah diprioritaskan bagi satuan pendidikan yang belum berkategori SPM.	Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antargender dan antarwilayah [TT7]
Kualitas lulusan SMK	Kualitas tenaga terampil menengah lulusan SMK belum selaras dengan kebutuhan lapangan kerja.	Meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan SMK .	Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan/vokasi untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global. [TT8]
SDM Kreatif	Pengembangan kreativitas belum mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan	Perlu nya pengembangan kreativitas peserta didik dalam pendidikan	Menghasilkan SDM kreatif melalui pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan ekonomi kreatif. [TT9]
Pembiayaan Pendidikan	Masih terdapat biaya pendidikan yang belum terjangkau oleh masyarakat miskin	Perlu pengaturan pembiayaan pendidikan yang proporsional dengan pendapatan orang tua	Mengimplementasikan struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat. [TT10]
Pembiayaan Pendidikan	Belum tepatnya dasar alokasi pemberian bantuan pendidikan	Peningkatan keefektifan bantuan pendidikan kepada peserta didik yang miskin	
Penggangan	Belum optimalnya penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah.	Perlu nya upaya-upaya terobosan untuk mendorong optimalisasi penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah	Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. [TT11]
Peran Masyarakat dan Dunia Industri	Rendahnya kontribusi dunia usaha dan dunia industri dalam pengembangan pendidikan dan penelitian	Perlu dikembangkan pola kemitraan pendanaan pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri, organisasi masyarakat	Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi [TT12]
Keselarasan Program Pendidikan dan Lapangan pekerjaan	Belum selarasnya program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja	Diperlukan pemetaan dan relevansi antara program pendidikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan.	Meningkatkan kemitraan yang sinergis dengan dunia usaha dan industri, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi [TT12]

Aspek	Akar Permasalahan	Rekomendasi Stakeholder	Keterkaitan dengan Tantangan
Anggaran Pendidikan di Daerah	Kuranganya komitmen pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan anggaran fungsi pendidikan 20% dari belanja daerah	Peninjauan ulang alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan melalui koordinasi dengan K/L terkait dan Pemerintah Daerah.	Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah [TT13]
Pendataan pendidikan	Belum adanya sistem pendataan pendidikan yang sah	Revitalisasi sistem pendataan pendidikan di lingkungan Depdiknas, lintas K/L, dan antar pusat dan daerah	Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah [TT13]
Keselarasan Program Pendidikan dan Lapangan pekerjaan	Belum selarasnya program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja	Koordinasi antar K/L dalam menelaraskan program pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja	Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah [TT13]
Akhlak	Adanya penyalahgunaan narkoba dan kemerosotan moral dan jati diri bangsa	Instensifikasi pendidikan moral dan melakukan koordinasi dengan K/L terkait.	Mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan muatan budi pekerti, kebanggaan warga negara, peduli kebersihan, peduli lingkungan, dan peduli ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan [TT14]
Globalisasi Pendidikan	Maraknya pendirian dan operasi lembaga pendidikan asing yang tidak berkualitas.	Mempertegas peraturan pendirian dan operasi lembaga pendidikan asing	Menjamin efisiensi pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP) [TT15]
Ujian Nasional	Masih terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional	Perlu penyempurnaan sistem penyelenggaraan dan pengawasan Ujian Nasional	Memperbaiki dan meningkatkan Kredibilitas sistem Ujian Nasional [TT16]
Parenting education dan homeschooling	Belum adanya jaminan kualitas penyelenggaraan parenting education dan homeschooling	Perlu upaya memfasilitasi penyelenggaraan parenting education dan homeschooling	Mengembangkan kebijakan yang kondusif dalam penyelenggaraan parenting education dan homeschooling [TT17]
Penyelenggaraan PAUD	Belum meratanya kualitas penyelenggaraan PAUD	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan PAUD	Mengembangkan kebijakan yang kondusif dalam penyelenggaraan PAUD [TT18]
Kerjasama Pendidikan dengan lembaga pendidikan asing	Sedikitnya Perguruan Tinggi yang mendapatkan pengakuan internasional	Perlu kebijakan yang kondusif dalam meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi menuju pengakuan internasional	Mengembangkan Kebijakan yang kondusif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi menjadi World Class University (WCU) [TT19]

Aspek	Akar Permasalahan	Rekomendasi Stakeholder	Keterkaitan dengan Tantangan
Profesionalisme Dosen	Belum seimbangnya kegiatan tridharma dosen terutama minimnya kegiatan penelitian dan sedikitnya jumlah publikasi internasional	Perlunya perluasan akses untuk melakukan kegiatan penelitian dan meningkatkan kompetensi penulisan publikasi internasional	Mengembangkan Kebijakan yang kondusif untuk mewujudkan Perguruan Tinggi menjadi World Class University (WCU) [TT19]
Pemanfaatan TIK	Rendahnya pemanfaatan dan penyebarluasan pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan	Perlunya upaya-upaya Terobosan untuk lebih mendorong pemanfaatan TIK di bidang Pendidikan	Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas pemanfaatan TIK di bidang pendidikan [TT20]

[nomor] : Menunjukkan nomor tantangan

**REKAPITULASI KEBUTUHAN ANGGARAN KEMENDIKNAS
TAHUN 2010-2014**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
1	PROGRAM PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN PENDIDIKAN DASAR	20.172	23.167	24.397	25.457	26.575	119.769
1,1	PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN TK	350	468	485	501	518	2.322
1,2	PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD	1.153	1.619	2.395	2.929	3.537	11.633
1,3	PENYEDIAAN SUBSIDI PENDIDIKAN SD/SDLB BERKUALITAS	11.094	12.256	12.141	12.081	12.027	59.599
1,4	PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SMP/SMP LB	1.688	2.185	2.515	2.936	3.360	12.685
1,5	PENYEDIAAN SUBSIDI PENDIDIKAN SMP/SMP LB BERKUALITAS	5.518	6.252	6.457	6.589	6.696	31.512
1,6	PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK TKLB/SDLB/SMP LB	127	134	140	145	151	697
1,7	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PENDIDIKAN TK DAN PENDIDIKAN DASAR	241	253	264	275	286	1.320
2	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	2.606	3.308	3.462	3.653	3.891	16.918
2,1	PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN SMK	1.408	1.798	1.879	2.004	2.154	9.243
2,2	PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN SMA/SMLB	989	1.290	1.354	1.410	1.488	6.531
2,3	PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SMA/SMLB	106	111	116	121	126	579
2,4	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	103	108	113	118	123	566
3	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	19.561	20.565	21.797	23.538	25.185	110.646
3,1	PENYEDIAAN LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI	2.886	2.991	3.196	3.397	3.610	16.079
3,2	PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU	2.238	2.611	2.997	3.402	3.964	15.212
3,3	PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN	907	979	1.049	1.091	1.185	5.211
3,4	PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	469	542	623	745	926	3.304
3,5	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PENDIDIKAN DIKTI	13.061	13.443	13.933	14.904	15.500	70.840
4	PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL	2.455	2.931	3.128	3.334	3.593	15.442
4,1	PENYEDIAAN LAYANAN PAUD NONFORMAL	750	1.115	1.201	1.297	1.397	5.761
4,2	PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN	745	785	824	860	934	4.148
4,3	PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	388	413	435	459	487	2.182
4,4	PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN	297	329	367	404	450	1.847
4,5	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL	275	288	301	313	326	1.503

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	7.913	11.668	16.136	21.506	29.770	86.993
5,1	PENYEDIAAN GURU UNTUK SELURUH JENJANG PENDIDIKAN	5.134	7.624	11.634	16.486	24.223	65.101
5,2	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	163	179	195	212	225	974
5,3	PENINGKATAN MUTU DAN PEMBINAAN LEMBAGA DIKLAT DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	124	188	217	246	276	1.051
5,4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	401	945	988	1.028	1.070	4.432
5,5	PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	1.944	2.573	2.933	3.353	3.785	14.588
5,6	PENYEDIAAN TENAGA KEPENDIDIKAN FORMAL UNTUK SELURUH JENJANG PENDIDIKAN	72	79	87	95	104	436
5,7	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PMPTK	75	79	82	86	89	410
6	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDIKNAS	1.232	1.336	1.522	1.708	1.897	7.696
6,1	PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA DALAM PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	182	186	190	195	212	965
6,2	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DALAM MENUNJANG FUNGSI PELAYANAN UMUM KEMENTERIAN	172	176	180	184	188	900
6,3	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DALAM PENGADAAN DAN PENATAAN BMN SERTA SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN	5,5	5,8	6,0	6,3	6,5	30
6,4	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DI BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN	124	128	132	136	140	661
6,5	PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN YANG ANDAL	28	29	31	32	33	153
6,6	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DI BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI	21	22	23	24	25	115
6,7	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DI BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN	35,35	37	39	40	42	194
6,8	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DALAM MENUNJANG FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI.	43	45	47	49	51	237
6,9	PENYEDIAAN BUKU AJAR YANG BERMUTU DAN MURAH	114	118	122	126	130	610

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN					TOTAL
		2010	2011	2012	2013	2014	
6.10	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDAYAGUNAAN E-PEMBELAJARAN DAN E-ADMINISTRASI	368	445	604	762	910	3.089
6.11	PENKAJIAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELAYANAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	102	105	108	111	114	540
6.12	PENINGKATAN KUALITAS JASMANI PESERTA DIDIK DAN PELAYANAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	25	26	27	29	30	137
6.13	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH (PTJJ) DI ASIA TENGGARA	12	13	13	14	14	66
7	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENDIKNAS	222	231	240	249	260	1.201
7,1	PENGUATAN DAN PERLUASAN PENGAWASAN YANG AKUNTABEL WILAYAH I	32,9	34	36	37	39	180
7,2	PENGUATAN DAN PERLUASAN PENGAWASAN YANG AKUNTABEL WILAYAH II	33	34	36	37	39	180
7,3	PENGUATAN DAN PERLUASAN PENGAWASAN YANG AKUNTABEL WILAYAH III	33	34	36	37	39	180
7,4	PENGUATAN DAN PERLUASAN PENGAWASAN YANG AKUNTABEL WILAYAH IV	33	34	36	37	39	180
7,5	AUDIT INVESTIGASI	3	3	3	3	3	15
7,6	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA ITJEN	88	90	93	96	101	467
8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	1.048	1.263	1.327	1.393	1.462	6.492
8,1	FASILITASI STANDAR MUTU DAN PELAKSANAAN AKREDITASI	728	917	962	1.010	1.056	4.673
8,2	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDIKNAS	75	79	83	86	90	413
8,3	PENYEMPURNAAN SISTEM PEMBELAJARAN	50	63	67	71	77	329
8,4	PENYEDIAAN DATA PENDIDIKAN	131	137	144	152	160	724
8,5	PENYEDIAAN INFORMASI UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN NASIONAL	21	22	23	24	25	115
8,6	PENYEDIAAN INFORMASI HASIL PENILAIAN PENDIDIKAN	42	44	47	50	54	238
TOTAL		55.208	64.468	72.009	80.838	92.633	365.156

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Program Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar	IKU1.1	APK TK/TKLB	29,3%	30,6%	32,0%	33,5%	35,0%	36,6%	20.172	23.167	24.397	25.457	26.575
		IKU1.1.1	PROPINSI BER-APK > 36,58%	6,1%	19,8%	33,6%	47,4%	61,2%	75,0%					
		IKU1.1.2	KOTA BER-APK > 36,58%	22,7%	33,1%	43,6%	54,1%	64,5%	75,0%					
		IKU1.1.3	KABUPATEN > BER-APK 36,58%	26,0%	35,8%	45,6%	55,4%	65,2%	75,0%					
		IKU1.2	PERSENTASE SATUAN TK/TKLB BERAKREDITASI	48,2%	55,6%	62,9%	70,3%	77,6%	85,0%					
		IKU1.3	APM SD/SDLB	82,94%	82,94%	83,01%	83,29%	83,40%	83,57%					
		IKU1.3.1	PROPINSI BER-APM > 83,57%	81,8%	82,5%	83,1%	83,7%	84,4%	85,0%					
		IKU1.3.2	KOTA BER-APM > 83,57%	85,3%	86,2%	87,2%	88,1%	89,1%	90,0%					
		IKU1.3.3	KABUPATEN > BER-APM 83,57%	71,1%	74,9%	78,7%	82,5%	86,2%	90,0%					
		IKU1.4	DISPARITAS APK PENDIDIKAN DASAR ANTAR KAB/KOTA	12%	12%	10%	8%	5%	3%					
		IKU1.5	PERSENTASE PESERTA DIDIK SD/SDLB PUTUS SEKOLAH	1,7%	1,5%	1,3%	1,1%	0,9%	0,7%					
		IKU1.6	PERSENTASE LULUSAN SD/SDLB YANG MELANJUTKAN KE SMP/SMPLB	90,0%	91,4%	92,8%	94,2%	95,6%	97,0%					
		IKU1.7	PERSENTASE SD MEMILIKI PERPUSTAKAAN	19,0%	43%	57%	80%	94%	100%					
		IKU1.8	PERSENTASE SD MEMILIKI SARANA KOMPUTER	10%	28%	46%	74%	92%	100%					
		IKU1.9	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI SD SBI/RSBI	28,0%	39,4%	50,8%	62,2%	73,6%	85,0%					
IKU1.10	PERSENTASE SD/SDLB MENERAPKAN KTSP DG BAIK	32,0%	41,6%	51,2%	60,8%	70,4%	80,0%							
IKU 1.11	PERSENTASE SD/SDLB BERSTANDAR SNP AKREDITASIMINIMAL B	30%	35%	40%	50%	60%	70%							
IKU1.12	APK SMP/SMPLB	71,7%	72,0%	73,3%	73,7%	75,4%	76,5%							
IKU1.12.1	PROPINSI BER-APK > 76,53%	36,4%	47,1%	57,8%	68,5%	79,3%	90,0%							
IKU1.12.2	KOTA BER-APK > 76,53%	89,5%	87,6%	85,7%	83,8%	81,9%	80,0%							
IKU1.12.3	KABUPATEN > BER-APK 76,53%	34,8%	44,8%	54,9%	64,9%	75,0%	85,0%							
IKU1.13	APM SMP/SMPLB	55,37%	55,97%	56,8%	57,1%	57,7%	58,2%							
IKU1.13.1	PROPINSI BER-APM > 58,17%	3,0%	20,4%	37,8%	55,2%	72,6%	90,0%							
IKU1.13.2	KOTA BER-APM > 58,17%	28,4%	38,7%	49,1%	59,4%	69,7%	80,0%							
IKU1.13.3	KABUPATEN > BER-APM 58,17%	3,6%	19,9%	36,2%	52,4%	68,7%	85,0%							
IKU1.14	RASIO KESETARAAN GENDER SMP/SMPLB	97,0%	97,2%	97,4%	97,6%	97,8%	98,0%							
IKU1.15	PERSENTASE PESERTA DIDIK SMP/SMPLB PUTUS SEKOLAH	1,99%	1,8%	1,6%	1,4%	1,2%	1,0%							
IKU1.16	PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. KOM/TK	38,5%	45,5%	52,6%	59,6%	66,7%	73,7%							
IKU1.17	PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. IPA	72,5%	77,5%	82,5%	87,5%	92,5%	97,5%							
IKU1.18	PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI PERPUSTAKAAN	79,5%	83,6%	87,7%	91,8%	95,9%	100,0%							
IKU1.19	PERSENTASE KOTA MEMILIKI SMP SBI/RSBI	20%	33%	46%	59%	72%	85%							
IKU1.20	PERSENTASE KABUPATEN MEMILIKI SMP SBI/RSBI	44%	50%	56%	63%	69%	75%							
IKU1.21	PERSENTASE SMP/SMPLB MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK	33,0%	44,4%	55,8%	67,2%	78,6%	90,0%							
1.1	PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN TK	IKK.1.1.1	APK TK/TKLB	29,3%	30,6%	32,0%	33,5%	35,0%	36,6%	350	468	485	501	518
		IKK.1.1.1.1	PROPINSI BER-APM > 36,58%	6,1%	19,8%	33,6%	47,4%	61,2%	75,0%					
		IKK.1.1.1.2	KOTA BER-APM > 36,58%	22,7%	33,1%	43,6%	54,1%	64,5%	75,0%					
		IKK.1.1.1.3	KABUPATEN > BER-APM 36,58%	26,0%	35,8%	45,6%	55,4%	65,2%	75,0%					

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)							
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014				
1,2	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	IKK.1.1.2 RASIO JUMLAH PESERTA DIDIK PEREMPUAN: LAKHLAKI	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98								
		IKK.1.1.3 PERSENTASE TK BERAKREDITASI	24,4%	55,6	62,9	70,3	77,6	85,0									
		IKK.1.2.1 APM SD/SDLB	82,94%	82,94%	83,01%	83,29%	83,40%	83,57%									
		IKK.1.2.1.1 PROPINSI BER-APM > 83,57%	81,8%	82,5%	83,1%	83,7%	84,4%	85,0%									
		IKK.1.2.1.2 KOTA BER-APM > 83,57%	85,3%	86,2%	87,2%	88,1%	89,1%	90,0%									
		IKK.1.2.1.3 KABUPATEN > BER-APM 83,57%	71,1%	74,9%	78,7%	82,5%	86,2%	90,0%									
		IKK.1.2.2 PERSENTASE PESERTA DIDIK SD PUTUS SEKOLAH	1,70%	1,50%	1,30%	1,10%	0,90%	0,70%									
		IKK.1.2.3 PERSENTASE LULUSAN SD MELANJUTKAN PENDIDIKAN	90,0%	91,4%	92,8%	94,2%	95,6%	97,0%									
		IKK.1.2.4 RASIO JUMLAH PESERTA DIDIK PEREMPUAN: LAKHLAKI PADA SD	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98	>0,98									
		IKK.1.2.5 PERSENTASE SD BERAKREDITASI MINIMAL B	30%	33%	36%	39%	42%	45%									
		IKK.1.2.6 PERSENTASE SD MEMILIKI PERPUSTAKAAN	36,8%	43,2%	53,0%	64,0%	75%	85%									
		IKK.1.2.7 PERSENTASE SD MEMILIKI SARANA KOMPUTER	20%	28%	46%	60%	75%	90%									
		IKK.1.2.8 PERSENTASE KOTA MEMILIKI MINIMAL SATU SD RSBI/SBI	60%	64%	73%	87%	96%	100%									
		IKK.1.2.9 PERSENTASE KABUPATEN MEMILIKI MINIMAL SATU SD RSBI/SBI	20%	35%	50%	65%	80%	90%									
IKK.1.2.10 NILAI TOTAL TERTIMBANG MEDALI EMAS, PERAK, DAN PERunggu DARI KOMPETISI INTERNASIONAL TINGKAT SD	140	141	151	152	156	160											
1,3	PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SD	IKK.1.2.12 PERSENTASE SD MENERAPKAN E-PEMBELAJARAN	10%	16%	22%	28%	34%	40%									
		IKK.1.2.13 PERSENTASE SD BERWAWASAN PUP3B	0	6%	12%	18%	24%	30%									
		IKK.1.2.14 PERSENTASE SD MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK	80%	90%	95%	97%	97%	97%									
		IKK.1.2.22 RASIO RUANG KELAS - SISWA JENJANG SD	5%	10%	15%	20%	25%	30%									
		IKK.1.2.15 PERSENTASE SD YANG MEMILIKI FASILITAS INTERNET	50%	55%	60%	70%	80%	90%									
		IKK.1.2.16 PERSENTASE SD MELAKSANAKAN MBS DENGAN BAIK	20%	31%	42%	53%	64%	75%									
		IKK.1.2.17 PERSENTASE SD YANG PERENCANAAN DAN PEMBELAJARAN APBS DISETUJUI OLEH KOMITE SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH															
		IKK.1.3.1 APM SD/SDLB	82,94%	82,94%	83,01%	83,29%	83,40%	83,57%									
		IKK.1.3.2 JUMLAH SISWA SD/SDLB SASARAN BOS	27.547.341	27.672.820	27.973.000	28.006.000	28.085.000	28.211.000									
		IKK.1.3.3 JUMLAH SISWA SD/SDLB SASARAN BEASISWA MISKIN	2.754.734	2.767.282	3.916.220	3.640.780	3.370.200	3.103.210									
		IKK.1.3.4 JUMLAH SISWA SD/SDLB SASARAN BANTUAN RUKU			27.973.000	28.006.000	28.085.000	28.211.000									
		1,4	PENJAMINAN KEPASTIAN LAYANAN PENDIDIKAN SMP/SMPLB	IKK.1.4.1 APK SMP/SMPLB	71,7%	72,0%	73,3%	73,7%	75,4%	76,5%							
				IKK.1.4.1.1 PROPINSI BER-APK > 76,53%	36,4%	47,1%	57,8%	68,5%	79,3%	90,0%							
				IKK.1.4.1.2 KOTA BER-APK > 76,53%	89,5%	87,6%	85,7%	83,8%	81,9%	80,0%							
IKK.1.4.1.3 KABUPATEN > BER-APK 76,53%	34,8%			44,8%	54,9%	64,9%	75,0%	85,0%									
IKK.1.4.2 APM SMP/SMPLB	55,4%			56,0%	56,8%	57,1%	57,7%	58,2%									
IKK.1.4.4 PROPINSI BER-APM > 58,17%	3,0%	20,4%	37,8%	55,2%	72,6%	90,0%											

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
IKK.1.4.		KOTA BER-APM > 58.17%	28,4%	38,7%	49,1%	59,4%	69,7%	80,0%							
IKK.1.4.		KABUPATEN > BER-APM 58.17%	3,6%	19,9%	36,2%	52,4%	68,7%	85,0%							
IKK.1.4.3		PERSENTASE PESERTA DIDIK SMP PUTUS SEKOLAH	2,0%	1,8%	1,6%	1,4%	1,2%	1,0%							
IKK.1.4.4		DISPARITAS APK ANTARA KABUPATEN-KOTA	22,31	21,90	21,49	21,08	20,67	20,26							
IKK.1.4.5		RASIO JUMLAH PESERTA DIDIK BEREMPULAN/LAKI-LAKI	49:51	1	1	1	1	1							
IKK.1.4.6		JUMLAH SISWA MISKIN YANG MEMPEROLEH BEASISWA SISWA MISKIN	751.193	751.193	762.461	773.898	785.506	797.289							
IKK.1.4.7		RATA-RATA NASIONAL NILAI UN SMP	7	7	7	7	7	7							
IKK.1.4.8		ANGKA KELULUSAN SMP	93,4%	94,0%	94,8%	95,7%	96,4%	97,0%							
IKK.1.4.9		ANGKA MELANJUTKAN LULUSAN SMP/SMP/PLB	87,9%	88,3%	89,1%	90,3%	92,0%	93,5%							
IKK.1.4.10		PEROLEHAN MEDALI DALAM ISO (EMAS; PERAK; PERUNGGU)	2:4:1	2:5:2	2:6:3	3:5:2	3:5:3	4:5:5							
IKK.1.4.11		NILAI TOTAL TERTIBANG MEDALI EMAS, PERAK, DAN PERUNGGU DARI KOMPETISI INTERNASIONAL TINGKAT SMP	9	14	17	23	27	30							
IKK.1.4.12		PERSENTASE SMP YANG MENERAPKAN PEMBELAJARAN DENGAN PENDEKATAN CTL BERBASIS ITIK	8,0%	21,4%	34,8%	48,2%	61,6%	75,0%							
IKK.1.4.13		PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI RUANG DAN ALAT LAB. BAHASA	8,94%	21,3%	33,7%	46,1%	58,5%	70,9%							
IKK.1.4.14		PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI ALAT KESENIAN	10%	30%	50%	70%	85%	100%							
IKK.1.4.15		PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI ALAT PERAGA MATEMATIKA	10%	25%	40%	55%	70%	85%							
IKK.1.4.16		PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI ALAT PERAGA IPS	15%	25%	40%	55%	70%	85%							
IKK.1.4.17		PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. KOM	38,5%	45,5%	52,6%	59,6%	66,7%	73,7%							
IKK.1.4.18		PERSENTASE KOTA MEMILIKI SMP RSBI/SBI	20,0%	33,0%	46,0%	59,0%	72,0%	85,0%							
IKK.1.4.19		PERSENTASE KABUPATEN MEMILIKI SMP RSBI/SBI	43,7%	50,0%	56,2%	62,5%	68,7%	75,0%							
IKK.1.4.20		PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI LAB. IPA	72,5%	77,5%	82,5%	87,5%	92,5%	97,5%							
IKK.1.4.21		PERSENTASE SMP YANG MEMILIKI PERPUSTAKAAN	79,5%	83,6%	87,7%	91,8%	95,9%	100,0%							
IKK.1.4.22		PERSENTASE SMP BERAKREDITASI MINIMAL B	19,0%	20,6%	22,2%	23,8%	25,4%	27,0%							
IKK.1.4.23		RASIO RUANG KELAS - SISWA JENJANG SMP	1 : 35	1 : 34	1 : 34	1 : 33	1 : 33	1 : 32							
IKK.1.4.24		JUMLAH KABUPATEN YANG MEMILIKI MINIMAL SATU SMP DENGAN RUANG OLAH RAGA	100	150	200	300	400	500							
IKK.1.4.25		PERSENTASE SMP MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK	33,0%	44,4%	55,8%	67,2%	78,6%	90,0%							
IKK.1.5.1	1.5	PENYEDIAAN SUBSIDI PENDIDIKAN SMP/SMP/PLB BERKUALITAS	71,7%	72,0%	73,3%	73,7%	75,4%	76,5%	5.518,1	6.252	6.457	6.589	6.696		
IKK.1.5.2		JUMLAH SISWA SMP/SMP/PLB SASARAN BOS	9.276.556	9.660.639	9.985.000	10.354.000	10.632.000	10.870.000							
IKK.1.5.3		JUMLAH SISWA SMP/SMP/PLB SASARAN BEASISWA MISKIN	927.656	966.064	1.395.100	1.346.020	1.275.840	1.195.700							

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
1.6	PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK TKLB/SDLB/SMP/PLB	IKK.1.3.4	JUMLAH SISWA SMP/SMPLB SASARAN BANTUAN BUKU	-	9.965.000	10.354.000	10.632.000	10.870.000	127	134	140	145	151	
		IKK.1.6.1	PERSENTASE ANAK CACAT TERTAMPUNG PADA TKLB DAN SDLB	28,9%	29,6%	30,7%	31,8%	33,0%	34,4%					
		IKK.1.6.2	ANGKA PUTUS SEKOLAH SISWA SDKH/SDLB	12,7%	11,7%	10,0%	9,5%	9,0%	8,5%					
		IKK.1.6.3	ANGKA MELANJUTKAN SISWA SDKH/SDLB YANG MELANJUTKAN SMPKH/SMPLB DAN ATAU SMP PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (SMP PLK).	87,3%	88,3%	90,0%	90,5%	91,0%	91,5%					
		IKK.1.6.4	PERSENTASE ANAK KEBUTUHAN KHUSUS YANG TERTAMPUNG PADA PENDIDIKAN SD PLK	1,0%	1,4%	1,9%	2,3%	2,7%	3,1%					
		IKK.1.6.5	ANGKA PUTUS SEKOLAH SISWA SD PLK	30,0%	25%	22%	19%	16%	14%					
		IKK.1.6.6	ANGKA MELANJUTKAN (TRANSITION RATES) SISWA SD PLK YANG MELANJUTKAN SMPKH/SMPLB DAN ATAU SMP PLK	70,0%	75,0%	78,0%	81,0%	84,0%	86,0%					
		IKK.1.6.7	PERSENTASE SDKH/SDLB MEMENUHI KRITERIA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) DENGAN AKREDITASI MINIMAL B	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%	30,0%	40,0%					
		IKK.1.6.8	PERSENTASE GURU SDKH/SDLB BERKUALIFIKASI S1/D4	40,8%	45,0%	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%					
		IKK.1.6.9	PERSENTASE GURU SDKH/SDLB BERSERTIFIKAT	2,5%	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%					
		IKK.1.6.10	PERSENTASE ANAK LUAR BIASA TERTAMPUNG PADA SMPKH/SMPLB	14,80%	15,7%	16,5%	17,5%	18,2%	18,9%					
		IKK.1.6.11	ANGKA PUTUS SEKOLAH (DROP OUT RATES) SISWA SMPKH/SMPLB	16,0%	15,0%	13,0%	11,0%	9,5%	8,5%					
		IKK.1.6.12	ANGKA MELANJUTKAN (TRANSITION RATES) SISWA SMP/PLB YANG MELANJUTKAN SMAKH/SMLB DAN ATAU SMA PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (SMA PLK)	84,0%	85,0%	87,0%	89,0%	90,5%	91,5%					
		IKK.1.6.13	PERSENTASE ANAK KEBUTUHAN KHUSUS YANG TERTAMPUNG PADA PENDIDIKAN SMP PLK	1,0%	2,2%	3,3%	4,4%	5,5%	6,6%					
		IKK.1.6.14	ANGKA PUTUS SEKOLAH (DROP OUT RATES) SISWA SMP PLK	30,0%	25,0%	22,0%	20,0%	18,0%	16,0%					
		IKK.1.6.15	ANGKA MELANJUTKAN (TRANSITION RATES) SISWA SMP PLK YANG MELANJUTKAN SMAKH/SMLB DAN ATAU SMA PLK	70,0%	75,0%	78,0%	80,0%	82,0%	84,0%					
		IKK.1.6.16	PERSENTASE GURU SMPKH/SMPLB BERKUALIFIKASI S1/D4	40,8%	45,0%	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%					
		IKK.1.6.17	PERSENTASE SMPKH/SMPLB YANG MENERAPKAN KTSP DALAM PROGRAM PEMBELAJARAN	5,0%	15,0%	25,0%	35,0%	45,0%	60,0%					
		IKK.1.6.18	PERSENTASE GURU SMPKH/SMPLB BERSERTIFIKAT	2,5%	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%					
		IKK.1.6.19	PERSENTASE ANAK CACAT TERTAMPUNG PADA TKLB/TKLB	17,2%	18,2%	19,5%	20,7%	22,0%	23,3%					
IKK.1.6.20	ANGKA PUTUS SEKOLAH (DROP OUT RATES) SISWA TKKH/TKLB BERDASARKAN JENDER	15,0%	10,0%	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%							

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
IKK.1.6.21		ANGKA MELANJUTKAN (TRANSITION RATES) SISWA TKKH/TKLB YANG MELANJUTKAN KE SD KHUSUS (SDKH)/SDLB DAN SD PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (SD.PLK)	85,0%	90,0%	95,0%	97,0%	98,0%							
IKK.1.6.22		PERSentase ANAK KEBUTUHAN KHUSUS YANG TERTAMPUNG PADA PENDIDIKAN TK PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (TK.PLK)	2,6%	3,3%	4,5%	5,4%	6,4%							
IKK.1.6.23		ANGKA PUTUS SEKOLAH (DROP OUT RATES) SISWA TK.PLK	15,0%	20,0%	18,0%	16,0%	14,0%							
IKK.1.6.24		ANGKA MELANJUTKAN (TRANSITION RATES) SISWA TK PLK YANG MELANJUTKAN KE SDKH/SDLB DAN SD.PLK	85,0%	80,0%	82,0%	84,0%	86,0%							
IKK.1.6.25		JUMLAH ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) YANG MENERIMA BEASISWA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS	99.754	99.754,0	99.854	99.954	100.054	100.154						
IKK.1.6.26		PROSENTASE TK/TKLB YANG MENYELENGGARAKAN TK INKLUSIF	1,0%	7,1%	7,2%	7,3%	7,4%	7,5%						
IKK.1.6.27		PROSENTASE SD/SDLB YANG MENYELENGGARAKAN SD INKLUSIF	0,4%	2,1%	3,2%	4,8%	10,3%	16,6%						
IKK.1.6.28		PROSENTASE SMP/SMPB YANG MENYELENGGARAKAN SMP INKLUSIF	3,8%	4,9%	5,7%	6,5%	7,3%	10,6%						
IKK.1.6.29		PROSENTASE SD YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM CERDAS DAN BERBAKAT ISTIMEWA (CI BI)	2,0%	3,5%	4,5%	5,0%	5,5%	6,5%						
IKK.1.6.30		PROSENTASE SMP YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM CERDAS DAN BERBAKAT ISTIMEWA (CI BI)	2,1%	3,0%	4,5%	5,0%	6,0%	7,5%						
IKK.1.6.30		JUMLAH SLB YANG MENYELENGGARAKAN E LEARNING (SDLB & SMPB)	365	389	415	437	461	485						
IKK.1.6.31		JUMLAH SLB YANG DIKEMBANGKAN MENJADI SENTRA PK DAN PLK (SLB.RSBI/SBI)	54	59	64	69	74	79						
IKK.1.6.32		JUMLAH SLB YANG MEMILIKI PUSAT ASSESMEN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	2	2	12	22	32	42						
IKK.1.6.33		JUMLAH SLB (SDLB DAN SMPB) YANG MEMILIKI PERLUSTAKAAN JE PERLUSTAKAAN	75	75,00	85,00	100,00	120,00	145,00						
IKK.1.6.34		JUMLAH SLB YANG TELAH MENDAPAT SERTIFIKASI SO.9001:2008	13	33	43	53	65	75						
IKK.1.6.35		PROSENTASI SLB YANG MEMILIKI LABORATORIUM (MIPA, BAHASA DAN KOMPUTER) YANG AKSESABLE BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	5,0%	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%						
IKK.1.6.36		PROSENTASE SLB YANG MENGEMBANGKAN PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI KETERAMPILAN KHUSUS	40%	40%	50%	50%	70%	80%						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
1,7	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PENDIDIKAN TK DAN PENDIDIKAN DASAR	IKK.1.7.1	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEPENGAWAIAAN	3	3	3	3	3	3	241	253	264	275	286	
		IKK.1.7.2	PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (PERSEN)		100%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.1.7.3	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BMN (PERSEN)	90	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.1.7.8	PERSENTASE SATKER BERDAYA-SERAP > 95%	46.30%	51.0%	55.8%	60.5%	65.3%	70%						
		IKK.1.7.9	MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA	0%	45%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.1.7.10	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEUANGAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.1.7.11	PERSENTASE SATKER LAPORAN KEUANGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU	97%	99%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.1.7.12	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBI	0%	5%	18%	35%	55%	75%						
		IKK.1.7.13	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN BMN	75%	80%	85%	90%	95%	100%						
		IKK.1.7.14	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEPEGAWAIAAN & UMUM	0%	50%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.1.7.15	BERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI	232	233	234	235	236	237						
IKK.1.7.16	PERSENTASE DEWAN PENDIDIKAN KAB/KOTA YANG TELAH BERFUNGSI DENGAN BAIK	20%	36%	52%	68%	84%	100%								
2	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	IKU2.1	APK SMA/SMILB/SMK	58.6%	61.8%	64.6%	66.4%	68.3%	70.7%	2.606	3.308	3.462	3.653	3.891	
		IKU2.1.1	PROPOSISI BER-APK > 70.68%	27,3%	39,8%	52,4%	64,9%	77,5%	80,0%						
		IKU2.1.2	KOTA BER-APK > 70.68%	71,6%	73,3%	74,9%	76,6%	78,3%	80,0%						
		IKU2.1.3	KABUPATEN > BER-APK 70.68%	18,3%	31,6%	45,0%	58,3%	71,7%	85,0%						
		IKU2.2	RASIO KESETARAAN GENDER SMA/SMK/SMILB	72%	77%	81%	86%	91%	95%						
		IKU2.3	PERSENTASE SMA/SMILB YANG MEMILIKI E-PERPUSTAKAAN	5%	10%	15%	20%	25%	30%						
		IKU2.4	PERSENTASE SMA/SMILB YANG MEMILIKI LABORATORIUM FISIKA, KIMIA, dan BIOLOGI.	38%	52%	65%	79%	92%	100%						
		IKU2.5	PERSENTASE SMA/SMILB YANG MEMILIKI LABORATORIUM MULTIMEDIA	3,5%	10,0%	20,0%	35,0%	55,0%	75,0%						
		IKU2.6	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI SMA SBI/RSBI	18,0%	28,4%	38,8%	49,2%	59,6%	70,0%						
		IKU2.7	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI SMA BERBASIS KEJANGGULAN LOKAL	5,0%	12,0%	19,0%	26,0%	33,0%	40,0%						
		IKU2.8	PERSENTASE SMA/SMILB BERWAWASAN PUP3B	0,0%	16,0%	32,0%	48,0%	64,0%	80,0%						
IKU2.9	PERSENTASE SMA/SMILB MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK	60,0%	67,0%	74,0%	81,0%	88,0%	95,0%								
IKU2.10	JUMLAH SMA/SMILB BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	20	316	612	908	1.204	1.500								
IKU2.11	PERSENTASE SMK MEMILIKI PERPUSTAKAAN YANG BERBASIS MULTIMEDIA.	10%	20%	40%	60%	80%	100%								

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
		IKU2.12	PERSENTASE SMK MEMILIKI BENGKEL KERJA SESUAI DENGAN STANDAR SARANA PRASARANA SMK	60%	68%	76%	84%	92%	100%						
		IKU2.13	PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATOIRUM SAINS YANG RELEVAN SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	34%	47%	60%	73%	86%	100%						
		IKU2.14	PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATORIUM BAHASA SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	43%	54%	66%	77%	89%	100%						
		IKU2.15	PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATORIUM MULTIMEDIA SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	63%	70%	78%	85%	93%	100%						
		IKU2.16	PERSENTASE KAB/KOTA MEMILIKI SMK RSB/SBI	60.0%	62.0%	64.0%	66.0%	68.0%	70.0%						
		IKU2.17	PERSENTASE KAB/KOTA DG SMK BERBASIS KELINGGULAN LOKAL	40.0%	49.0%	58.0%	67.0%	76.0%	85.0%						
		IKU2.18	PERSENTASE SMK BERWAWASAN PUP3B	0.0%	16.0%	32.0%	48.0%	64.0%	80.0%						
		IKU2.19	PERSENTASE SMK MENERAPKAN KTSP DENGAN BAIK	50.0%	57.0%	64.0%	71.0%	78.0%	85.0%						
		IKU2.20	PERSENTASE SMK BERSERTIFIKAT ISO 9001:2000/9001:2008	7.0%	25.6%	44.2%	62.8%	81.4%	100.0%						
		IKU2.21	PERSENTASE SMK BERKEMITRAAN DG INDUSTRI KREATIF	19.2%	23.4%	27.5%	31.7%	35.8%	40.0%						
2.1	PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN SMK	IKK.2.1.1	APK SMK	26.9%	28.3%	29.6%	30.5%	31.6%	32.9%	1.408	1.798	1.879	2.004	2.154	
		IKK.2.1.1.1	PROPOSAL BER-APK > 32.88%	18.2%	32.5%	46.9%	61.3%	75.6%	90.0%						
		IKK.2.1.1.2	KOTA BER-APK > 32.88%	69.47%	71.6%	73.7%	75.8%	77.9%	80.0%						
		IKK.2.1.1.3	KABUPATEN > BER-APK 32.88%	14.95%	29.0%	43.0%	57.0%	71.0%	85.0%						
		IKK.2.1.2	PERSENTASE SMK MEMENUHI KRITERIA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) DENGAN AKREDITASI MINIMAL B	50.0%	55.0%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%						
		IKK.2.1.3	PERSENTASE SMK MEMILIKI PERPUSTAKAAN DENGAN KOLEKSI BUKU YANG MEMADAI YANG BERBASIS MULTIMEDIA	10.0%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%						
		IKK.2.1.4	PERSENTASE SMK MEMILIKI BENGKEL KERJA SESUAI DENGAN STANDAR SARANA PRASARANA SMK	10.0%	20.0%	40.0%	60.0%	80.0%	100.0%						
		IKK.2.1.5	PERSENTASE SMK MEMILIKI BENGKEL KERJA SESUAI DENGAN STANDAR SARANA PRASARANA SMK	60.0%	68.0%	76.0%	84.0%	92.0%	100.0%						
		IKK.2.1.6	PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATOIRUM SAINS YANG RELEVAN SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	34.0%	47.0%	60.0%	73.0%	86.0%	100.0%						
		IKK.2.1.7	PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATORIUM BAHASA SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	43.0%	54.4%	65.8%	77.2%	88.6%	100.0%						
		IKK.2.1.8	JUMLAH SISWA SMK PENERIMA BOMM		3.000.000	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000						
		IKK.2.1.9	JUMLAH SISWA SMK SASARAN BANTUAN BUKU		-	3.100.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000						
		IKK.2.1.10	JUMLAH SISWA SMK PENERIMA BKMM		305.535	390.476	475.417	560.358	645.298						
		IKK.2.1.11	JUMLAH USB-SMK	95	200	200	200	200	200						
		IKK.2.1.12	JUMLAH RKB-SMK	3656	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET				PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014	
IKK.2.1.13		JUMLAH KOTA/KABUPATEN VOKASI	115	125	135	145	155	165					
IKK.2.1.14		PERSENTASE LULUSAN SMK YANG BEKERJA PADA TAHUN KELULUSAN	45,0%	50,0%	55,0%	60,0%	65,0%	70,0%					
IKK.2.1.15		PERSENTASE LULUSAN SMK BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	80,0%	82,0%	84,0%	86,0%	88,0%	92,0%					
IKK.2.1.16		PERSENTASE SMK MENERAPKAN PEMBELAJARAN ADAPTIF YANG SESUAI DENGAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN IPTEK SESUALDEKATAN TINGKATANIV	40,0%	70,0%	80,0%	90,0%	95,0%	100,0%					
IKK.2.1.17		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI MINIMAL 1 (SATU) SMK RSBI/SBI	33,0%	46,4%	59,8%	73,2%	86,6%	100,0%					
IKK.2.1.18		PERSENTASE SMK RSBI/SBI MEMILIKI MINIMAL 1 KOMPETENSI KEAHLIAN DIAKRREDITASI OLEH INSTTITUSI KEJUJUAN DARI NEGARA MAJU ATAU LEMBAGA INTERNASIONAL	40,0%	50,0%	64,0%	78,0%	93,0%	100,0%					
IKK.2.1.19		PERSENTASE SMK MENERAPKAN PEMBELAJARAN BERPUSAT PADA PESERTA DIDIK YANG KONTEKSTUAL-BEBBASITIK	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	82,0%	100,0%					
IKK.2.1.20		PERSENTASE SMK MEMILIKI LABORATORIUM MULTIMEDIA SESUAI STANDARD SARANA PRASARANA SMK	63,0%	70,4%	77,8%	85,2%	92,6%	100,0%					
IKK.2.1.21		JUMLAH MEDALI DARI KOMPETISI INTERNASIONAL	3	4,0	4,0	4,0	4,0	5,0					
IKK.2.1.22		PERSENTASE SISWA SMK BERASAL DARI SISWA YANG BERPRESTASI DI SMP/MTS	2,0%	3,6%	5,2%	6,8%	8,4%	10,0%					
IKK.2.1.23		PERSENTASE LULUSAN SMK BERPREDIKAT ENTERPRENEUR	4,0%	4,5%	5,0%	6,0%	8,0%	10,0%					
IKK.2.1.24		PERSENTASE SISWA SEKOLAH MENENGAH BERASAL DARI SMK	49,0%	52,0%	56,0%	60,0%	64,0%	67,0%					
IKK.2.1.25		PERSENTASE SMK BERPASANGAN DENGAN MINIMAL 1 (SATU) PERUSAHAAN YANG RELEVAN	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	100,0%					
IKK.2.1.26		PERSENTASE SMK MENERAPKAN KONSEP PENDIDIKAN UNTUK PENGEMBANGAN YANG BERKELANJUTAN (EESDI)	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	82,0%	100,0%					
IKK.2.1.27		JUMLAH SMK BERSERTIFIKAT ISO 9001:2000/9001:2008	340	440	540	640	740	840					
IKK.2.1.28		JUMLAH INSTITUSI DAN INDUSTRI DALAM DAN LUAR NEGERI YANG MENJALIN KERJASAMA	10	44	45	46	47	48					
IKK.2.2.1	2.2 PENYEDIAAN DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN SMA/ SMLB	PERSENTASE SISWA SEKOLAH MENENGAH BERASAL DARI SMA	52,2%	51,7%	51,2%	50,7%	50,3%	50,0%	989	1.290	1.354	1.410	1.488
IKK.2.2.1.1		APK SMA/SMLB NASIONAL	31,6%	33,5%	35,0%	35,8%	36,7%	37,8%					
IKK.2.2.1.2		PROVINSI BER-APK > 37,79%	45,45%	54,4%	63,3%	72,2%	81,1%	90,0%					
IKK.2.2.1.3		KOTA BER-APK > 37,79%	53,68%	58,9%	64,2%	69,5%	74,7%	80,0%					
IKK.2.2.2		KABUPATEN > BER-APK 37,79%	37,37%	46,9%	56,4%	65,9%	75,5%	85,0%					
IKK.2.2.3		RASIO KESETARAAN GENDER SISWA SMA	72,4%	76,9%	81,4%	86,0%	90,5%	95,0%					
IKK.2.2.4	JUMLAH SISWA SMA PENERIMA BKMM	248.021	378.783	501.898	614.395	714.653	800.000						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
	IKK.2.2.5	JUMLAH SMA MEMILIKI ASRAMA SISWA	50	60	70	80	90	100						
	IKK.2.2.6	PERSENTASE SMA MEMENUHI SNP DENGAN AKREDITASI MINIMAL B	33,9%	47,2%	59,7%	71,1%	81,3%	90,0%						
	IKK.2.2.7	PERSENTASE KAB. MEMILIKI SATU SMA SBI/RSBI	15,0%	25,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%						
	IKK.2.2.8	PERSENTASE KOTA MEMILIKI DUA SMA SBI/RSBI	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%						
	IKK.2.2.9	PERSENTASE KAB./KOTA MEMILIKI SMA BERKELINGGULAN LOKAL	5,0%	12,0%	19,0%	26,0%	33,0%	40,0%						
	IKK.2.2.10	PERSENTASE SMA MEMILIKI PERPUSTAKAAN	74,5%	80,6%	86,2%	91,4%	96,1%	100,0%						
	IKK.2.2.11	PERSENTASE SMA MEMILIKI E-PERPUSTAKAAN	0,5%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%	30,0%						
	IKK.2.2.12	PERSENTASE SMA MEMILIKI LAB. IPA (KIM, FIS, BIO)	35,6%	50,9%	65,2%	78,4%	90,0%	100,0%						
	IKK.2.2.13	PERSENTASE SMA MEMILIKI LAB. KOMPUTER	47,8%	60,2%	71,8%	82,4%	91,9%	100,0%						
	IKK.2.2.14	PERSENTASE SMA MEMILIKI LAB. MULTIMEDIA	2,3%	20,7%	38,0%	53,9%	68,0%	80,0%						
	IKK.2.2.15	PERSENTASE SMA MEMILIKI RUANG PSB	1,5%	8,2%	14,6%	20,4%	25,6%	30,0%						
	IKK.2.2.16	RASIO KOMPUTER PEMBELAJARAN TERHADAP JUMLAH SISWA	140	60	39	30	24	20						
	IKK.2.2.17	PERSENTASE SMA MENERAPKAN PEMBELAJARAN BERWAWASAN KEBANGSAAN, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KESEHATAN SEKOLAH	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%						
	IKK.2.2.18	PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH SISWA SMA YANG MEMILIKI PERILAKU MENYIMPANG	6,0%	5,0%	4,0%	3,0%	2,0%	1,0%						
	IKK.2.2.19	PERSENTASE SMA YANG MENERAPKAN PEMBELAJARAN BERPUSAT PADA PESERTA DIDIK YANG KONTEKSTUAL-BERBASIS-TIK	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%						
	IKK.2.2.20	JUMLAH SISWA SMA PENERIMA BOMM	2.481.244	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000						
	IKK.2.2.21	JUMLAH SISWA SMA SASARAN BANTUAN BUKU	-	-	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000						
	IKK.2.2.22	RERATA NASIONAL NILAI UN 7 SMA	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	85,0						
	IKK.2.2.23	PERINGKAT HASIL TES PISA PESERTA DIDIK KELAS 10 (Mat & Sains)	391 & 393	410 & 410	430 & 430	450 & 450	470 & 470	495 & 495						
	IKK.2.2.24	PERSENTASE SISWA SMA MERAH SKOR TOEFL 400 ATAU EKUIVALEN	1,0%	2,0%	4,0%	6,0%	8,0%	10,0%						
	IKK.2.2.25	PERSENTASE LULUSAN SMA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	10,0%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%						
	IKK.2.2.26	PEROLEHAN MEDALI EMAS PADA KOMPETISI INTERNASIONAL	20	22	24	27	30	33						
	IKK.2.2.27	PERSENTASE LULUSAN SMA DITERIMA PT PADA TAHUN KELULUSAN	38,2%	50,5%	62,0%	72,6%	82,0%	90,0%						
	IKK.2.2.28	JUMLAH SMA BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	20	316	612	908	1.204	1.500						
	IKK.2.3.1	PERSENTASE ANAK CACAT TERTAMPUNG PADA SMAKH/SMILB	7%	7,41	8,27	10,20	11,30	11,00						
2.3	PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PK DAN PLK SMA/SMILB	SISWA SMAKH/SMILB BERDASARKAN JENDER.	20,0%	15,0%	14,0%	13,0%	11,0%	10,0%						
									106	111	116	121	126	

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET				PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)						
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014		
2,4	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	IKK.2.3.3	PERSENTASE ANAK KEBUTUHAN KHUSUS YANG TERTAMPLUNG PADA SMA/PLK	1,0%	2,2%	3,4%	4,6%	5,8%						
		IKK.2.3.4	ANGKA PUTUS SEKOLAH (DROP OUT RATES) SISWA SMA/PLK BERDASARKAN JENDER.	17,5%	16,0%	14,5%	12,5%	10,5%						
		IKK.2.3.5	PERSENTASE SMAKH/SMLB MEMENUHI KRITERIA STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNPL) DENGAN AKREDITASI MINIMAL B	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%	30,0%						
		IKK.2.3.6	PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG MEMILIKI SMAKH/SMLB B/SBI/ SBI	0,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%						
		IKK.2.3.7	PERSENTASE GURU SMAKH/SMLB BERKUALIFIKASI S1/D4	40,8%	45,0%	50,0%	55,0%	60,0%						
		IKK.2.3.8	PERSENTASE GURU SMAKH/SMLB BERTERTIKAT	2,5%	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%						
		IKK.2.3.9	PERSENTASE LULUSAN SMAKH/SMLB BERTERTIKAT MINIMAL 1 KOMPETENSI KETERAMPILAN KHUSUS.	5,0%	15,0%	30,0%	45,0%	60,0%						
		IKK.2.3.10	PERSENTASE SMA/SMK/SMLB YANG MENYELENGGARAKAN SMA INKLUSIF	0,8%	5,2%	7,1%	9,0%	10,9%						
		IKK.2.3.11	PERSENTASE SMA YANG MENYELENGGARAKAN PROGRAM CERDAS DAN BERBAKAT ISTIMEWA (CIBI)	5,1%	7,8%	11,6%	15,4%	19,2%						
		IKK.2.3.12	JUMLAH SMLB PENYELENGGARA E LEARNING	32	37,0	42,0	47,0	52,0						
		IKK.2.4.1	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEPEGAWAIAAN	3	3	3	3	3						
		IKK.2.4.2	PENYUSUNAN , PENYAMPAIAN DAN IMPLEMENTASI KEBIAKIATAN (PERSEN)		100%	100%	100%	100%						
		IKK.2.4.3	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BMN (PERSEN)	90%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.2.4.8	PERSENTASE SATKER BERDAYA-SERAP > 95%	46,30%	51,0%	55,8%	60,5%	65,3%						
		IKK.2.4.9	PERSENTASE SATKER YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA	0%	45%	100%	100%	100%						
		IKK.2.4.10	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEUANGAN	100%	100%	100%	100%	100%						
IKK.2.4.11	PERSENTASE SATKER LAPORAN KEUANGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU	97%	99%	100%	100%	100%								
IKK.2.4.12	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBI	0%	5%	18%	35%	55%								
IKK.2.4.13	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN BMN	75%	80%	85%	90%	95%								
IKK.2.4.14	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEPEGAWAIAAN & JUJUM	0%	50%	100%	100%	100%								
IKK.2.4.15	RERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI	232	233	234	235	236								
IKK.1.7.16	PERSENTASE DEWAN PENDIDIKAN KAB/KOTA YANG TELAH BERFUNGSI DENGAN BAIK	20%	36%	52%	68%	84%								
3	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	IKU3.1	APK PT DAN PTA USIA 19-23 THN *	21,60%	22,80%	25,10%	26,75%	28,60%						
		IKU3.2	RASIO KESETARAAN GENDER PT	116,7%	111,8%	107,9%	104,6%	104,5%						
		IKU3.3	JUMLAH PTN MENJADI BHPP	0	7	7	12	27						
		IKU3.4	JUMLAH PTS BHPP	0	50	150	250	400						
				19.561	20.565	21.797	23.538	25.185						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)							
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
IKU3.5		JUMLAH PTN BERBADAN HUKUM BEROPINI WTP	6	7	9	11	20	37								
IKU3.6		JUMLAH PTS BHPM BEROPINI WTP	0	5	25	75	125	200								
IKU3.7		JUMLAH PTN SERTIFIKAT ISO 9001:2008	17%	33%	67%	83%	100%	100%								
IKU3.8		JUMLAH PTS SERTIFIKAT ISO 9001:2008	10%	15%	25%	35%	40%	50%								
IKU3.9		PERSENTASE PRODI PT BERAKREDITASI MINIMAL B	64,8%	67,8%	70,9%	73,9%	77,0%	80,0%								
IKU3.10		JUMLAH PRODI BERAKREDITASI INTERNASIONAL	0	3	3	5	5	7								
IKU3.11		JUMLAH PT 300 TERBAIK DUNIA VERSI THES	1	1	2	2	3	3								
IKU3.12		JUMLAH PT 500 TERBAIK DUNIA VERSI THES	3	3	5	6	8	11								
IKU3.13		JUMLAH PT 200 TERBAIK ASIA VERSI THES	8	8	9	10	11	12								
IKU3.14		JUMLAH PT BERBINTANG 4-5 VERSI QS STAR	0	6	9	13	16	20								
IKU3.15		JUMLAH PT BERBINTANG 1-3 VERSI QS STAR	0	15	90	150	200	250								
IKU3.16		JUMLAH PT BERWAWASAN PUP3B	11	69	127	184	242	300								
IKU3.17		JUMLAH PT BERSERTIFIKAT ISO 17025 (ATAU SETARAI)	6	9	13	17	22	27								
IKU3.18		JUMLAH PT ANGGOTA GDIN	363	390,0	418,0	445,0	473,0	500,0								
IKU3.19		RASIO MHS VOKASI : TOTAL MHS VOKASI DAN S1	17,2%	19%	21%	24%	27%	30,0%								
IKU3.20		APK PRODI SAINS NATURAL DAN TEKNOLOGI (LUSIA 19-23 TAHUN)	3,6%	4,1%	5,0%	6,0%	8,0%	10,0%								
IKU3.21		PERSENTASE DOSEN PROGRAM S-1/DIPLOMA BERKUALITAS MINIMAL S-2	57,8%	62,5%	67,5%	75,0%	82,50%	90%								
IKU3.22		PERSENTASE DOSEN PROGRAM PASCA BERKUALITAS S-3	56,2%	60,0%	65,0%	75%	82,50%	90,0%								
IKU3.23		PERSENTASE DOSEN PT BERSERTIFIKAT	15,4%	23,0%	36,0%	49,0%	62,0%	75,0%								
IKU3.24		PERSENTASE PT BERAKSES E-JURNAL	23,3%	32,6%	42,0%	51,3%	60,7%	70,0%								
IKU3.25		PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI NASIONAL	6,0%	14,8%	23,6%	32,4%	41,2%	50,0%								
IKU3.26		PERSENTASE DOSEN PASCA DG PUBLIKASI INTERNASIONAL	0,2%	1,20%	2,20%	3,70%	4,90%	6,5%								
IKU3.27		JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN	65	75	95	110	130	150								
IKU3.28		PERSENTASE MAHASISWA PENERIMA BEASISWA	6%	10%	15%	20%	20%	20%								
IKK.3.1.1	3.1 PENYEDIAAN LAYANAN AKADEMIK PROGRAM STUDI	JUMLAH PROGRAM STUDI BARU PER TAHUN	500	500	500	500	500	500								
IKK.3.1.2		PERSENTASE PRODI VOKASI BERAKREDITASI MINIMAL B	20,6%	22,0%	24,6%	26,6%	28,7%	30,7%								
IKK.3.1.3		PERSENTASE PRODI PROFESI BERAKREDITASI MINIMAL B	0,4%	0,43%	0,47%	0,51%	0,55%	0,59%								
IKK.3.1.4		PERSENTASE PRODI AKADEMIK BERAKREDITASI MINIMAL B	39,4%	43,3%	47,1%	51,0%	54,9%	58,7%								
IKK.3.1.5		JUMLAH PRODI YANG MELAKSANAKAN KELAS BERTARAF INTERNASIONAL	8	10	12	14	16	20								
IKK.3.1.6		JUMLAH LAB SAINS YANG BERSERTIFIKAT ISO 17025	6	10	16	25	37	50								
IKK.3.1.7		JUMLAH PT BERPERINGKAT TOP 1000 VERSI WEBOMATICS	2	3	3	5	5	5								
3.1									2.886	2.991	3.196	3.397	3.610			

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
3.2	PENYEDIAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERMUTU	IKK.3.1.8	JUMLAH PT BERPERINGKAT TOP 1000-4000	24	24	27	27	30	30							
		IKK.3.1.9	VERSI WEBO MATRICS	97	178	258	339	419	500							
		IKK.3.1.10	MENGIMPLEMENTASIKAN KBK	5	6	7	8	9	11							
			NILAI TERTIMBAH MEDALI DALAM KOMPETISI INTERNASIONAL AKADEMIK													
		IKK.3.2.1	PERSENTASE DOSEN PTN/BHPP PROGRAM S1/DIPLOMA YANG BERKUALIFIKASI S2/SP1	70,0%	73,0%	78,0%	85,0%	92,0%	100,0%	100,0%	2.238	2.611	2.997	3.402	3.964	
		IKK.3.2.2	PERSENTASE DOSEN PTS/BHPM PROGRAM S1/DIPLOMA YANG BERKUALIFIKASI S2/SP1	40,0%	45,0%	55,0%	65,0%	75,0%	85,0%	85,0%						
		IKK.3.2.3	PERSENTASE DOSEN PTN/BHPP PROGRAM PASCASARJANA/SPECIALIS YANG BERKUALIFIKASI S3/SP2	63,0%	68,0%	73,0%	78,0%	83,0%	90,0%	90,0%						
		IKK.3.2.4	PERSENTASE DOSEN PTS/BHPM PROGRAM PASCASARJANA/SPECIALIS YANG BERKUALIFIKASI S3/SP2	45,0%	48,0%	55,0%	65,0%	75,0%	85,0%	85,0%						
		IKK.3.2.5	PERSENTASE DOSEN PTN/BHPP BERSERTIFIKAT	21,0%	35,0%	50,0%	65,0%	80,0%	100,0%	100,0%						
		IKK.3.2.6	PERSENTASE DOSEN PTS/BHPM BERSERTIFIKAT	9,0%	20,0%	35,0%	50,0%	70,0%	90,0%	90,0%						
		IKK.3.2.7	PERSENTASE TENAGA PTN/BHPP YANG MEMILIKI SERTIFIKAT ELINGSIONAL	0%	1,9%	3,7%	5,5%	7,5%	10,3%	10,3%						
		IKK.3.2.8	PERSENTASE MAHASISWA S3 DALAM NEGERI YANG MELAKSANAKAN SANDWICH KE LUAR NEGERI	7%	11%	15%	18%	22%	25%	25%						
		IKK.3.2.9	PERSENTASE DOSEN YANG MELAKSANAKAN ACADEMIC RECHARGING (DALAM DAN LUAR NEGERI)	0,3%	0,4%	0,5%	0,6%	0,7%	0,8%	0,8%						
		3.3	PENYEDIAAN LAYANAN KELEMBAGAAN	IKK.3.3.1	PERSENTASE MAHASISWA PTN/BHPP MENEMERIMA BEASISWA PEMERINTAH	3,2%	5,3%	8,0%	10,6%	10,6%	10,6%	907	979	1.049	1.091	1.185
				IKK.3.3.2	PERSENTASE MAHASISWA PTS/BHPM MENEMERIMA BEASISWA PEMERINTAH	1,9%	3,1%	4,6%	6,2%	6,2%	6,2%	6,2%				
IKK.3.3.3	PERSENTASE MAHASISWA MENEMERIMA BEASISWA DUNIA USAHA DAN DONOR LAINNYA (CSRI)			0,4%	0,7%	1,0%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%						
IKK.3.3.4	JUMLAH PT MASUK DALAM QS STAR 1-2			6	14	20	30	40	50	50						
IKK.3.3.5	JUMLAH PT MASUK DALAM QS STAR 3-5			4	6	10	15	20	25	25						
IKK.3.3.6	PERSENTASE PTN/BHMIN MENJADI BHPP			7%	30%	70%	100%	100%	100%	100%						
IKK.3.3.7	PERSENTASE PTS MENJADI BHP PENLENGGARAN/BHPM			0,2%	10,0%	20,0%	35,0%	50,0%	75,0%	75,0%						
IKK.3.3.8	JUMLAH MEDALI DALAM KOMPETISI OLAH RAGA INTERNASIONAL															
IKK.3.3.9	JUMLAH MAHASISWA PERAIH MEDALI DALAM OLIMPIADE SAINS YANG MENEMERIMA BEASISWA			57	60	62	65	68	70	70						
IKK.3.3.10	PERSENTASE MAHASISWA ASING															
IKK.3.3.11	PERSENTASE PT YANG MELAKSANAKAN LIFE SKILLS			70												

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)									
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014					
3.4	PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	IKK.3.3.12	JUMLAH PT MENGEMBANGKAN KERJASAMA KELEMBAGAAN DALAM DAN LUAR NEGERI	33	40	48	56	64	72									
		IKK.3.4.1	PERSENTASE DOSEN MELAKUKAN PENELITIAN	29%	35%	40%	45%	50%	55%									
		IKK.3.4.2	PERSENTASE DOSEN DG PUBLIKASI NASIONAL	6.0%	14.8%	23.6%	32.4%	41.2%	50.0%									
		IKK.3.4.3	PERSENTASE DOSEN PASCA DG PUBLIKASI INTERNASIONAL	0.2%	1.2%	2.2%	3.7%	4.9%	6.5%					469	542	623	745	926
		IKK.3.4.4	JUMLAH HAKI YANG DIHASILKAN	65	75	95	110	130	150									
		IKK.3.4.5	PERSENTASE PT YANG MEMBERIKAN AKSES INTERNET DAN E-JOURNAL	25%	35%	45%	55%	65%	75%									
		IKK.3.4.6	RASIO SITASI TERHADAP JUMLAH DOSEN (KUMULATIF)	1	3	5	7	8	10									
		IKK.3.4.7	PERSENTASE DOSEN YANG MELAKUKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	4%	5%	6%	7%	8%	9%									
		IKK.3.4.8	JUMLAH PT YANG MEMPUNYAI INKUBATOR BISNIS/INDUSTRI	11	15	18	20	23	25									
		IKK.3.4.9	PERSENTASE PT YANG MEMPUNYAI KERJASAMA DENGAN INDUSTRI BERBASIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,5%	1%	2%	3%	4%	5%									
IKK.3.4.10	PERSENTASE PT YANG MEMPUNYAI KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS PENELITIAN DAN KEBIAKAN	0,5%	1%	2%	4%	6%	8%											
IKK.3.4.11	PERSENTASE MAHASISWA YANG MELAKSANAKAN PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA	0,6%	1,0%	1,5%	2,5%	3,5%	5,0%											
3.5	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PENDIDIKAN DIKTI	IKK.3.5.1	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEPEGAWAIAN	3	3	3	3	3	3									
		IKK.3.5.2	PENYUSUNAN , PENYAMPAIAN DAN IMPLEMENTASI KEBIAKAN (PERSEN)		100%	100%	100%	100%	100%									
		IKK.3.5.3	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BMN (PERSEN)	90	100%	100%	100%	100%	100%									
		IKK.3.5.8	PERSENTASE SATKER BERDAYA-SERAP > 95%	46,3%	51,0%	55,8%	60,5%	65,3%	70%									
		IKK.3.5.9	MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA	0%	45%	100%	100%	100%	100%									
		IKK.3.5.10	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEUANGAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
		IKK.3.5.11	PERSENTASE SATKER LAPORAN KEUANGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU	97%	99%	100%	100%	100%	100%									
		IKK.3.5.12	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBI	0%	5%	18%	35%	55%	75%									
		IKK.3.5.13	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN BMN	75%	80%	85%	90%	95%	100%									
		IKK.3.5.14	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEPEGAWAIAN & UMUM	0%	50%	100%	100%	100%	100%									
IKK.3.5.15	RERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI	232	233	234	235	236	237											
IKK.3.5.16	JUMLAH PT BHMN BERBADAN HUKUM BEROPINI WTP	6	7	7	7	7	7											
				13.061	13.443	13.933	14.904	15.500										

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
		IKK.3.5.17	JUMLAH PTN (INSTITUT/UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI) BERBADAN HUKUM BEROPINI WTP	0	0	1	3	7	20						
		IKK.3.5.18	JUMLAH POLITEKNIK BERBADAN HUKUM BEROPINIWTP	0	0	1	1	6	10						
		IKK.3.5.19	JUMLAH PTS BHPM (INSTITUT/UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI) BEROPINIWTP	0	3	15	45	75	120						
		IKK.3.5.20	JUMLAH PTS BHPM (POLITEKNIK/AKADEMI) BEROPINIWTP	0	2	10	30	50	80						
		IKK.3.5.21	PERSENTASE PT BHMIN BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.3.5.22	PERSENTASE PTN (INSTITUT/UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI) BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	8%	29%	54%	70%	90%	100%						
		IKK.3.5.23	PERSENTASE POLITEKNIK BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	11%	26%	52%	74%	89%	100%						
		IKK.3.5.24	PERSENTASE PTS (INSTITUT/UNIVERSITAS/SEKOLAH TINGGI) BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	13%	18%	28%	38%	43%	53%						
		IKK.3.5.25	PERSENTASE PTS (POLITEKNIK/AKADEMI) BERSERTIFIKAT ISO 9001:2008	6%	11%	21%	31%	36%	46%						
		IKK.3.5.26	JUMLAH LAPORAN BMN PERGURUAN TINGGI/KOPERTIS SESUALSIMAK.BMN	91	95	95	95	95	95						
		IKK.3.5.27	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN PT/KOPERTIS SESUALSIMAK	92	95	95	95	95	95						
4	PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL	IKU4.1	APK PAUD NON FORMAL	10,68	11,31	11,94	12,57	13,20	13,83	2.455	2.931	3.128	3.334	3.593	
		IKU4.2	PERSENTASE SATUAN PAUD NONFORMAL	0,0%	0,0%	2,5%	6,0%	10,0%	15,0%						
		IKU4.3	BERAKREDITASI	0,50%	0,56%	0,57%	0,58%	0,58%	0,57%						
		IKU4.4	APK PAKET A	3,78%	3,75%	3,75%	3,73%	3,74%	3,75%						
		IKU4.4	APK PAKET B	1,92%	1,99%	2,05%	2,11%	2,17%	2,22%						
		IKU4.5	APK PAKET C	5,7%	5,4%	5,2%	4,8%	4,5%	4,2%						
		IKU4.6.1	PERSENTASE BUTA AKSARA > 15 TAHUN	69,7%	74,8%	79,8%	84,9%	89,9%	95,0%						
		IKU4.6.2	PERSENTASE PROVINSI DENGAN TINGKAT BUTA AKSARA ≤ 4,2%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%						
		IKU4.6.3	PERSENTASE KOTA DENGAN TINGKAT BUTA AKSARA ≤ 4,2%	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%						
		IKU4.7	RASIO KESETARAAN GENDER PENUNTASAN BUTA AKSARA	97,3%	97,6%	97,8%	98,0%	98,0%	98,0%						
		IKU4.8	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MEMILIKI SKB	75,9%	78,9%	81,9%	84,9%	87,9%	90,0%						
IKU4.9	PERSENTASE KECAMATAN YANG TELAH MEMILIKI PKBM	40,0%	48,0%	56,0%	64,0%	72,0%	80,0%								
IKU4.10	PERSENTASE KECAMATAN YANG TELAH MEMILIKI TBM	40,0%	48,0%	56,0%	64,0%	72,0%	80,0%								
IKU4.11	PERSENTASE KAB/KOTA YANG MENGARUSUTAMAKAN GENDER	5,0%	14,0%	23,0%	32,0%	41,0%	50,0%								

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
	IKU4.12	PERSENTASE LULUSAN PKH BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	4%	5%	10%	15%	20%	25%						
	IKU4.13	PERSENTASE PEMEGANG SUKMA MENEMPUH PKH	2%	5%	9%	16%	19%	20%						
	IKU4.14	PERSENTASE REMAJA 16-35TH TAK SEKOLAH MENGIKUTI PKH	12,0%	15,6%	19,2%	22,8%	26,4%	30,0%						
	IKU 4.15	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PARENTING EDUCATION	0%	0%	10%	20%	35%	50%						
	IKU 4.16	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYEDIAKAN LAYANAN FASILITASI HOMESCHOOLING	0%	0%	10%	20%	35%	50%						
4.1	PENYEDIAAN LAYANAN PAUD NONFORMAL	IKK4.1.1	APK PAUD NONFORMAL	10,7%	11,3%	11,9%	12,6%	13,2%	13,8%	750	1.115	1.201	1.297	1.397
		IKK4.1.2	PERSENTASE PROPINSI MENCAIPI APK PAUD NONFORMAL 75%	30,5%	33,3%	36,1%	38,9%	41,7	44,5%					
		IKK4.1.3	PERSENTASE KABUPATEN MENCAIPI APK PAUD NONFORMAL 50%	32,3%	35,1%	37,9%	40,7%	43,5%	46,3%					
		IKK4.1.4	PERSENTASE KOTA MENCAIPI APK PAUD NONFORMAL 60%	34,1%	36,9%	39,7%	42,5%	45,3%	48,1%					
		IKK4.1.5	PERSENTASE PAUD NON FORMAL BERAKREDITASI	0,0%	0,0%	2,5%	6,0%	10,0%	15,0%					
		IKK4.2.1	APK PAKET A	0,50%	0,56%	0,57%	0,58%	0,58%	0,57%					
		IKK4.2.2	PERSENTASE PESERTA DIDIK PAKET A DARI RUTUS SEKOLAH SD/MI	1,99%	1,93%	1,86%	1,80%	1,75%	1,69%					
4.2	PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN	IKK4.2.3	APK PAKET B	3,78%	3,75%	3,75%	3,73%	3,74%	3,75%					
		IKK4.2.4	PERSENTASE PESERTA DIDIK PAKET B DARI RUTUS SEKOLAH SMP/MTS	1,99%	1,93%	1,86%	1,80%	1,75%	1,69%					
		IKK4.2.5	APK PAKET C	1,92%	1,99%	2,05%	2,11%	2,17%	2,22%					
		IKK4.2.6	PERSENTASE PESERTA DIDIK PAKET C DARI RUTUS SEKOLAH SMA/SMK/MA	1,99%	1,93%	1,86%	1,80%	1,75%	1,69%					
		IKK4.2.7	RASIO JUMLAH PESERTA DIDIK ORANG DEWASA LAKI-LAKI:PEREMPUAN MENURUT KABUPATEN/KOTA	0,68%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7					
		IKK4.2.8	PERSENTASE LAYANAN PAKET B ORANG DEWASA MENURUT KABUPATEN/KOTA	14,0%	16,0%	18,0%	21,0%	24,0%	27,0%					
		IKK4.2.9	PERSENTASE LAYANAN PAKET C ORANG DEWASA MENURUT KABUPATEN/KOTA	16,0%	16,6%	17,3%	17,8%	18,0%	19,0%					
		IKK4.2.10	PERSENTASE PROGRAM PAKET A YANG BERAKREDITASI MINIMAL B	0,0%	0,0%	5,0%	15,0%	27,0%	40,0%					
		IKK4.2.11	PERSENTASE PROGRAM PAKET B YANG BERAKREDITASI MINIMAL B	0,0%	0,0%	5,0%	15,0%	27,0%	40,0%					
		IKK4.2.12	PERSENTASE PAKET C KEJUJUAN BERKREDITASI MINIMAL B	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%	15,0%	25,0%					
4.3	PENYEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	PERSENTASE PROGRAM PAKET C YANG BERKREDITASI MINIMAL B	0,0%	5,0%	10,0%	22,0%	35,0%	50,0%	388	413	435	459	487	
	IKK4.3.1	PERSENTASE BUTA AKSARA > 15 TAHUN	5,7%	5,4%	5,2%	4,8%	4,5%	4,2%						
	IKK4.3.	PERSENTASE PROVINSI DENGAN TINGKAT BUTA AKSARA ≤ 4,2%	69,7%	74,8%	79,8%	84,9%	89,9%	95,0%						
	IKK4.3.	PERSENTASE KOTA DENGAN TINGKAT BUTA AKSARA ≤ 4,2%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
IKK.4.3.		PERSENTASE KAB DENGAN TINGKAT BUTA AKSARA < 4,2%	60,0%	65,0%	70,0%	75,0%	80,0%	85,0%						
IKK.4.3.2		JUMLAH PENDUDUK USIA ≥ 15 TAHUN YANG MENJADI SASARAN PENGENTASAN BUTA AKSARA	9.364.183	9.078.444	8.703.322	8.281.993	7.845.620	7.353.450						
IKK.4.3.3		DISPARITAS GENDER PENDUDUK BERKEKASAAN USIA ≥ 15 TAHUN MINIMAL 3%	3,3%	3,0%	2,7%	2,4%	2,2%	2,0%						
IKK.4.3.4		PERSENTASE KAB/ KOTA YANG MEMILIKI SKB	0,0%	78,9%	81,9%	84,9%	87,9%	90,0%						
IKK.4.3.5		PERSENTASE KECAMATAN YANG MEMILIKI PKBM	0,0%	48,0%	56,0%	64,0%	72,0%	80,0%						
IKK.4.3.6		PERSENTASE PEMEGANG SUKMA PENEMPUH PKH	0,0%	5,0%	9,0%	16,0%	19,0%	20,0%						
IKK.4.3.7		PERSENTASE PENDUDUK PEREMPUAN BERKEKASAAN DASAR YANG MEMPEROLEH LAYANAN KECAKAPAN HIDUP- MEMILIKI TBM	0,0%	7,0%	10,0%	14,0%	17,5%	20,0%						
IKK.4.3.8		PERSENTASE KAB/ KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN	0,0%	48,0%	56,0%	64,0%	72,0%	80,0%						
IKK.4.3.9		PERSENTASE KAB/ KOTA YANG TELAH MENERAPKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN	0,0%	14,0%	23,0%	32,0%	41,0%	50,0%						
IKK.4.3.10		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MEMILIKI 10 PKBM	40,0%	48,0%	56,0%	64,0%	72,0%	80,0%						
IKK.4.3.11		PERSENTASE PKBM BERAKREDITASI	0,0%	5,0%	10,0%	15,0%	20,0%	25,0%						
IKU 4.15		PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PARENTING EDUCATION	0%	0%	10%	20%	35%	50%						
IKK.4.4.1	4.4 PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN	PERSENTASE ANAK PUTUS SEKOLAH DAN LULUS SEKOLAH MENENGAH TIDAK MELANJUTKAN MENDEKAPKAN LAYANAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KECAKAPAN HIDUP, BERSERTIFIKAT DAN BEKERJA	0%	5%	11%	17%	23%	30%						
IKK.4.4.2		JUMLAH PESERTA DIDIK KURSUS DAN WARGA MASYARAKAT YANG MENGIKUTI UJI KOMPETENSI	50.000	65.000	85.000	105.000	125.000	145.000						
IKK.4.4.3		PERSENTASE LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BERAKREDITASI	0%	6%	11%	17%	24%	30%						
IKK.4.4.4		PERSENTASE JENIS KETERAMPILAN/KEAHLIAN YANG DAPAT DILAYANI UJI KOMPETENSI OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK)	0%	10%	15%	20%	25%	30%						
IKK.4.4.5		PERSENTASE LULUSAN PKH BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	0%	5%	10%	15%	20%	25%						
IKK.4.4.6		JUMLAH LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI (LSK) YANG DIBENTUK	12	20	25	30	35	40						
IKK.4.4.7		PERSENTASE LULUSAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP) BEKERJA ATAU USAHA MANDIRI	0%	60%	66%	72%	75%	77%						
										297	329	367	404	450

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)							
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
4,5	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL	IKK.4.5.1	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEPENGAWAIAAN	3	3	3	3	3	3	275	288	301	313	326		
		IKK.4.5.2	PENYUNAN , PENYAMPAIAN DAN IMPLEMENTASI KEBIAKAN (PERSEN)		100%	100%	100%	100%	100%							
		IKK.4.5.3	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BMN (PERSEN)	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.4.5.8	PERSentase SATKER BERDAYA-SERAP > 95%	46.30%	51.0%	55.8%	60.5%	65.3%	70%							
		IKK.4.5.9	MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA	0%	45%	100%	100%	100%	100%							
		IKK.4.5.10	PERSentase SATKER MENERAPKAN E-KEUANGAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
		IKK.4.5.11	PERSentase SATKER LAPORAN KEUANGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU	97%	99%	100%	100%	100%	100%							
		IKK.4.5.12	PERSentase SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBI	0%	5%	18%	35%	55%	75%							
		IKK.4.5.13	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN BMN	75%	80%	85%	90%	95%	100%							
		IKK.4.5.14	PERSentase SATKER MENERAPKAN E-KEPEGAWAIAAN & UMUM	0%	50%	100%	100%	100%	100%							
		IKK.4.5.15	RERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI	232	233	234	235	236	237							
		IKK.4.5.16	JUMLAH MODEL PROGRAM PEMBELAJARAN PNFI YANG DIKEMBANGKAN OLEH UPT DITJEN PNFI (P2PNFI/PP-PNFI)	16	16	16	16	16	16	24						
		IKK.4.5.17	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA-PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN MODEL PNFI DI UPT DITJEN PNFI	8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0						
		IKK.4.5.18	JUMLAH DIREKTORAT DAN UPT DITJEN PNFI BERSERTIFIKAT ISO 9001-2008	0	-	5,0	8,0	10,0	13,0							
		5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	IKU5.1	PERSentase GURU TK/TKLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	14.49%	15.30%	16.40%	22.50%	55%	85.00%	7.913	11.668	16.136	21.506	29.770
				IKU5.2	PERSentase PENDIDIK PAUD NON FORMAL BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D-4	5%	7%	10%	15%	20%	25%					
				IKU5.3	PERSentase GURU TK/TKLB FORMAL BERSERTIFIKAT PENDIDIK	9.70%	12%	13%	22%	60%	85.00%					
IKU5.4	PERSentase GURU TK/TKLB MENGIKUTI PPB			5%	15%	25%	35%	45%	55%							
IKU5.5	PERSentase TUTOR PAUD NON FORMAL MENGIKUTI PPB			5%	15%	25%	35%	45%	55%							
IKU5.6	PERSentase KEPALA TK/TKLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA			5%	10%	25%	45%	70%	90%							
IKU5.7	PERSentase TK/TKLB YANG TELAH DILAKUKAN BENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN			53%	60%	67%	74%	80%	90%							
IKU5.8	PERSentase GURU SD/SDLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4			24.59%	35.60%	48.77%	61.8%	74.9%	88%							
IKU5.9	PERSentase GURU SD/SDLB BERSERTIFIKAT PENDIDIK			14.00%	26.30%	40.40%	54.90%	67.50%	80.00%							
IKU5.10	PERSentase GURU SD/SDLB MENGIKUTI PPB			14.00%	25.30%	37.3%	51.30%	65.30%	80.00%							
IKU5.11	PERSentase TUTOR PAKET A MENGIKUTI PPB			6.00%	15.80%	25.60%	35.40%	45.20%	55.00%							

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET				PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014	
IKU5.12		PERSENTASE KEPALA SD/SDLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5%	10%	25%	45%	70%						
IKU5.13		PERSENTASE PENGAWAS SD/SDLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5%	10%	25%	50%	70%						
IKU5.14		PERSENTASE SD/SDLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	70%	75%	80%	85%	90%						
IKU5.15		PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4	73.39%	77.10%	82.80%	87.20%	92.30%						
IKU5.16		PERSENTASE GURU SMP/SMPLB BERSERTIFIKAT PENDIDIK	32.80%	44.00%	56.00%	67.00%	79.00%						
IKU5.17		PERSENTASE GURU SMP/SMPLB MENGIKUTI PPB	32.80%	44.00%	56.00%	67.00%	79.00%						
IKU5.18		PERSENTASE TUTOR PAKET B MENGIKUTI PPB	7.00%	16.60%	26.20%	35.80%	45.40%						
IKU5.19		PERSENTASE KEPALA SMP/SMPLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5%	10%	25%	45%	70%						
IKU5.20		PERSENTASE PENGAWAS SMP/SMPLB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5%	10%	25%	50%	75%						
IKU5.21		PERSENTASE SMP/SMPLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	66%	71%	76%	81%	86%						
IKU5.22		PERSENTASE GURU SMA/SMILB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	91.16%	92.20%	93.90%	95.80%	97.30%						
IKU5.23		PERSENTASE GURU SMA/SMILB BERSERTIFIKAT PENDIDIK	41.00%	51.00%	61.00%	70.00%	80.00%						
IKU5.24		PERSENTASE GURU SMA /SMILB YANG MENGIKUTI PPB	41.00%	51.00%	61.00%	70.00%	80.00%						
IKU5.25		PERSENTASE TUTOR PAKET C YANG MENGIKUTI PPB	5.00%	14.00%	23.00%	32.00%	41.00%						
IKU5.26		PERSENTASE KEPALA SMA/SMILB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5%	10%	25%	45%	70%						
IKU5.27		PERSENTASE PENGAWAS SMA/SMILB MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5%	10%	25%	50%	75%						
IKU5.28		PERSENTASE SMA/SMILB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	69%	74%	79%	87%	92%						
IKU5.29		PERSENTASE GURU SMK BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	85.77%	87.60%	89.50%	93.60%	95.40%						
IKU5.30		PERSENTASE GURU SMK BERSERTIFIKAT PENDIDIK	32.00%	44.00%	55.00%	67.00%	78.00%						
IKU5.31		PERSENTASE GURU SMK BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	15.00%	18.00%	21.00%	24.00%	27.00%						
IKU5.32		PERSENTASE GURU SMK YANG MENGIKUTI PPB	32.00%	44.00%	55.00%	67.00%	78.00%						
IKU5.33		PERSENTASE KEPALA SMK MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5%	10%	25%	45%	70%						
IKU5.34		PERSENTASE PENGAWAS SMK MENGIKUTI PPB MENURUT KAB/KOTA	5%	10%	25%	50%	75%						
IKU5.35		PERSENTASE TUTOR PAKET C KEJURUAN YANG MENGIKUTI PPB	0.00%	0.00%	0.00%	5.00%	15.00%						
IKU5.36		PERSENTASE SMK YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	69%	75%	81%	86%	90%						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
	IKU5.37	PERSENTASE TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN MENGIKUTI PPP	30,00%	38,00%	46,00%	54,00%	62,00%	70,00%					
	IKU5.38	PERSENTASE PENDIDIK KURSUS MENGIKUTI DIKLAT.KOMPETENSI	10,00%	19,00%	28,00%	37,00%	46,00%	55,00%					
	IKU5.39	PERSENTASE PAJONG BELAJAR MENGIKUTI PPP	50%	52%	54%	56%	58%	60%					
	IKU5.40	PERSENTASE PENILIK YANG MENGIKUTI PPP	45%	47%	49%	51%	53%	55%					
	IKU5.41	PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG MENGIKUTI DIKLAT.KOMPETENSI	5%	8%	12%	15%	18%	21%					
	IKU5.42	PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMPEROLEH KESEJAHTERAAN	15%	23%	33%	45%	59%	75%					
5.1	PENYEDIAAN GURU UNTUK SELURUH JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH GURU TK/PENERIMA TUNJANGAN PROEESI	6389	6.500	10.165	15.995	39.353	156.001	5.134	7.624	11.634	16.486	24.223
	IKK.5.1.1	PERSENTASE GURU TK/TKLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	14,49%	15,30%	16,40%	22,50%	55%	85,00%					
	IKK.5.1.2	PERSENTASE GURU TK/TKLB FORMAL BERSERTIFIKAT.PENDIDIK	9,70%	12%	13%	22%	60%	85,00%					
	IKK.5.1.3	PERSENTASE GURU TK/TKLB FORMAL BERSERTIFIKAT.PENDIDIK	5%	15%	30%	40%	50%	60%					
	IKK.5.1.4	JUMLAH GURU TK/TKLB MENGIKUTI PPP	76743	120.000	187.470	332.131	532.907	816.167					
	IKK.5.1.5	TUNJANGAN PROFESI	24,59%	35,60%	46,30%	57,90%	68%	82,00%					
	IKK.5.1.6	PERSENTASE GURU SD/SDLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	14,00%	26,30%	40,40%	54,90%	67,50%	80,00%					
	IKK.5.1.7	PERSENTASE GURU SD/SDLB BERSERTIFIKAT	14,00%	25,30%	40,00%	55,00%	70,00%	85,00%					
	IKK.5.1.8	PERSENTASE GURU SD/SDLB MENGIKUTI PPP	0%	6%	12%	18%	24%	30%					
	IKK.5.1.9	PERSENTASE GURU SD RSBI/SBI BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-2	5%	4%	3%	2%	1%	0%					
	IKK.5.1.10	PERSENTASE GURU SD YANG MISMATCH	50863	75.000	150.783	212.266	283.256	369.496					
	IKK.5.1.11	JUMLAH GURU SMP YANG MENERIMA TUNJANGAN PROEESI	73,39%	77,10%	82,80%	87,20%	92,30%	98,00%					
	IKK.5.1.12	PERSENTASE GURU SMP/SMP/PLB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S1/D4	32,80%	44,00%	56,00%	67,00%	79,00%	90,00%					
	IKK.5.1.13	PERSENTASE GURU SMP/SMP/PLB BERSERTIFIKAT	32,80%	44,00%	56,00%	67,00%	79,00%	90,00%					
	IKK.5.1.14	PERSENTASE GURU SMP/SMP/PLB MENGIKUTI PPP	3%	8%	13%	18%	24%	30%					
	IKK.5.1.15	PERSENTASE GURU SMP RSBI/SBI BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-2	30%	24%	18%	12%	6%	0%					
	IKK.5.1.16	PERSENTASE GURU SMP YANG MISMATCH	30224	75.000	100.527	129.950	158.871	194.766					
	IKK.5.1.17	JUMLAH GURU SMA YANG MENERIMA TUNJANGAN PROFESI	91,2%	92,2%	93,9%	95,8%	97,3%	98,0%					
	IKK.5.1.18	PERSENTASE GURU SMA/SMALB BERKUALIFIKASI AKADEMIK S-1/D-4	41,0%	51,0%	61,0%	70,0%	80,0%	90,0%					
	IKK.5.1.19	PERSENTASE GURU SMA/SMALB BERSERTIFIKAT	41,0%	51,0%	61,0%	70,0%	80,0%	90,0%					
	IKK.5.1.20	PERSENTASE GURU SMA /SMALB YANG MENGIKUTI PPP	41,0%	51,0%	61,0%	70,0%	80,0%	90,0%					

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
		IKK.5.1.21	PERSENTASE GURU SMA YANG MISMATCH	12,0%	9,6%	7,2%	4,8%	2,4%	0,0%					
		IKK.5.1.22	RASIO PENDIDIK DAN PESERTA DIDIK SMK	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30	1:30					
		IKK.5.1.23	JUMLAH GURU SMK YANG MEMPEROLEH TUNJANGAN PROEESI	15788	45.000	71.663	101.123	137.051	178.774					
		IKK.5.1.24	PERSENTASE GURU SMK BERKUALIFIKASI	85,8%	87,6%	89,5%	93,6%	95,4%	98,0%					
		IKK.5.1.25	AKADEMIK S-1/D-4	32,0%	44,0%	55,0%	67,0%	78,0%	90,0%					
		IKK.5.1.26	PERSENTASE GURU SMK BERSERTIFIKAT	15,0%	18,0%	21,0%	24,0%	27,0%	30,0%					
		IKK.5.1.27	PERSENTASE GURU SMK YANG MENGIKUTI PPB	32,0%	44,0%	55,0%	67,0%	78,0%	90,0%					
		IKK.5.1.28	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RASIO PENDIDIK DAN PESRTA DIDIK TK 1:15	0,2%	1,5%	2,7%	4,0%	5,3%	6,5%					
		IKK.5.1.29	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RASIO PENDIDIK DAN PESRTA DIDIK SD 1:20	44,8%	48,0%	51,2%	54,3%	57,5%	60,6%					
		IKK.5.1.30	SAMBAL 1:28	44,2%	47,4%	50,5%	53,7%	56,8%	60,0%					
		IKK.5.1.31	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RASIO PENDIDIK DAN PESRTA DIDIK SMA 1:20	18,5%	21,7%	24,8%	28,0%	31,2%	34,3%					
		IKK.5.1.32	PERSENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RASIO PENDIDIK DAN PESRTA DIDIK SMK 1:15	35,6%	38,7%	41,9%	45,1%	48,2%	51,4%					
		IKK.5.1.33	SAMBAL 1:32	18%	24%	30%	36%	42%	48%					
		IKK.5.1.34	PERSENTASE GURU YANG MEMPEROLEH BENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN											
		IKK.5.1.34	PERSENTASE GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK YANG DIEVALUASI KINERJANYA											
5.2	PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NON FORMAL	IKK.5.2.1	RASIO TUTOR DAN PESERTA DIDIK PAUD NONFORMAL	1:30	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20	163	179	195	212	225
		IKK.5.2.2	PERSENTASE TUTOR PAUD BERKUALIFIKASI S1/D4	2%	2,5%	3,1%	4,5%	5,2%	6,0%					
		IKK.5.2.3	PERSENTASE TUTOR PAUD NON FORMAL MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN (PPB)	5,0%	15,0%	25,0%	35,0%	45,0%	55,0%					
		IKK.5.2.4	PERSENTASE PENGELOLA PAUD MENGIKUTI PENDIDIKAN PROEESI BERKELANJUTAN (PPB)	5,0%	7,0%	9,0%	10,0%	13,0%	15,0%					
		IKK.5.2.5	RASIO TUTOR DAN PESERTA DIDIK PAKET A	2:20	2:20	2:20	2:20	2:20	2:20					
		IKK.5.2.6	RASIO TUTOR DAN PESERTA DIDIK PAKET B	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30					
		IKK.5.2.7	PERSENTASE TUTOR PAKET A BERKUALIFIKASI S1/D4	2,0%	2,2%	2,5%	3,2%	4,1%	5,0%					
		IKK.5.2.8	PERSENTASE TUTOR PAKET B BERKUALIFIKASI S1/D4	16,0%	16,1%	16,5%	16,8%	17,1%	17,4%					
		IKK.5.2.9	PERSENTASE TUTOR PAKET A MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN	6,0%	15,8%	25,6%	35,4%	45,2%	55,0%					
		IKK.5.2.10	PERSENTASE TUTOR PAKET B MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN	7%	16,6%	26,2%	35,8%	45,4%	55%					

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
		IKK.5.2.11	PROSENTASE TUTOR PAKET C BERKUALIFIKASI DI SEMUA PROPINSI S1/D4	5%	5,5%	6,2%	7,1%	8,3%	9,8%					
		IKK.5.2.12	RASIO TUTOR DAN PESERTA DIDIK PAKET C	7:40	7:40	7:40	7:40	7:40	7:40					
		IKK.5.2.13	PERSENTASE TUTOR PAKET C MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN (PPB)	5%	14%	23%	32%	41%	50%					
		IKK.5.2.14	PERSENTASE TUTOR PAKET C KEJUJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN (PPB)	0%	0%	0%	5%	15%	25%					
		IKK.5.2.15	PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG MENGIKUTI PPP	5%	14%	23%	32%	41%	50%					
		IKK.5.2.16	RASIO JUMLAH TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN PESERTA DIDIK	1:25	1:25	1:20	1:20	1:20	1:20					
		IKK.5.2.17	PROSENTASE TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN BERKUALIFIKASI S1/D4	54%	60%	70%	85%	90%	100%					
		IKK.5.2.18	PERSENTASE TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN (PPB)	30%	38%	46%	54%	62%	70%					
		IKK.5.2.19	PERSENTASE PAMONG BELAJAR BERKUALIFIKASI S1/D4	83,3%	84,8%	87,1%	90,1%	93,8%	98,3%					
		IKK.5.2.20	PROSENTASE PENILIK BERKUALIFIKASI S1/D4	43,4%	48%	54%	60%	65%	70%					
		IKK.5.2.21	PROSENTASE PENDIDIK KURSUS BERKUALIFIKASI S1/D4	10%	11%	12%	13%	14%	15%					
		IKK.5.2.22	PERSENTASE PENDIDIK KURSUS MENGIKUTI DIKLAT KOMPETENSI	10%	19%	28%	37%	46%	55%					
		IKK.5.2.23	PERSENTASE PAMONG BELAJAR MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN (PPB)	10,0%	19,0%	28,0%	37,0%	46,0%	55,0%					
		IKK.5.2.24	PERSENTASE PENILIK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN (PPB)	10,0%	15,0%	35,0%	40,0%	45,0%	55,0%					
		IKK.5.2.25	PERSENTASE PTK-PNF YANG MEMPEROLEH PENGHARGAAN	33,2%	35,1%	34,9%	34,7%	34,7%	34,4%					
		IKK.5.2.26	RASIO JUMLAH TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN PESERTA DIDIK	1:25	1:25	1:20	1:20	1:20	1:20					
5.3	PENINGKATAN MUTU DAN PEMBINAAN LEMBAGA DIKLAT DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	IKK.5.3.1	JUMLAH LPMP DAN P4TK TERKAIT YANG MEMILIKI SEKURANG-KURANGNYA 3 WIDYASWARA-BIDANG BALID	1	8	14	21	27	34					
		IKK.5.3.2	PERSENTASE WIDYASWARA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN PROFESIONAL WIDYASWARA BERKELANJUTAN BIDANG TK/TKLB	5%	20%	40%	60%	80%	100%					
		IKK.5.3.3	JUMLAH P4TK/LPMP TERKAIT YANG MEMILIKI SEKURANG-KURANGNYA 3 WI BIDANG SD/SDLB DAN SMP/SMPLB	1	7	13	20	27	34					
		IKK.5.3.4	JUMLAH P4TK/LPMP TERKAIT YANG MEMILIKI SEKURANG-KURANGNYA 3 WI BIDANG SMA/SMILB dan SMK	-	28	56	85	113	141					
		IKK.5.3.5	PERSENTASE WI YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN BIDANG SMA/SMILB dan SMK	5%	20%	40%	60%	80%	100%					
										124	188	217	246	276

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
		IKK.5.4.9 PERSENTASE GURU INTI YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME BIDANG PENSIJASKES DAN PK	5%	20%	40%	60%	80%	100%					
		IKK.5.4.10 PERSENTASE GURU INTI YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME BIDANG BAHASA	5%	20%	40%	60%	80%	100%					
		IKK.5.4.11 PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SESUAI BIDANGNYA	5%	10%	20%	30%	40%	50%					
		IKK.5.4.12 JUMLAH PROGRAM DAN MODEL PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG DIHASILKAN SETIAP TAHUN SESUAI BIDANGNYA											
		IKK.5.4.13 PERSENTASE DATA KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG TELAH DI MUTAHIRKAN SESUAI BIDANGNYA	10%	10%	10%	10%	10%	10%					
5.5	PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	IKK.5.5.1 PERSENTASE GURU TK/TKLB YANG TERPETAHAN KOMPETENSINYA	20%	30%	40%	60%	80%	100%	1.944	2.573	2.933	3.353	3.785
		IKK.5.5.2 PERSENTASE GURU SD/SDLB YANG TERPETAHAN KOMPETENSINYA	0	10%	20%	35%	50%	70%					
		IKK.5.5.3 PERSENTASE GURU SMP/SMPB YANG TERPETAHAN KOMPETENSINYA	0	10%	20%	45%	65%	90%					
		IKK.5.5.4 PERSENTASE GURU SMA/SMALB YANG TERPETAHAN KOMPETENSINYA	0	10%	25%	45%	65%	90%					
		IKK.5.5.5 PERSENTASE GURU SMK YANG TERPETAHAN KOMPETENSINYA	0	10%	25%	45%	65%	90%					
		IKK.5.5.6 PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN YANG TERPETAHAN MUTU PENDIDIKANNYA DI TIAP PROVINSI	3%	20%	40%	60%	80%	100%					
		IKK.5.5.7 PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN HASIL PEMETAAN YANG DILAKUKAN SUPERVISI DI TIAP PROVINSI	3%	10%	20%	30%	40%	50%					
		IKK.5.5.8 PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN HASIL SUPERVISI YANG DILAKUKAN FASILITASI SUMBER DAYA DI TIAP PROVINSI	3%	10%	20%	30%	40%	50%					
		IKK.5.5.9 PERSENTASE TK/TKLB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	53%	60%	67%	74%	80%	90%					
		IKK.5.5.10 PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PERSENTASE SMP/SMPB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	70%	75%	80%	85%	90%	95%					
		IKK.5.5.11 PERSENTASE SMA/SMALB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	66%	71%	76%	81%	86%	92%					
		IKK.5.5.12 PERSENTASE SMA/SMALB YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	69%	74%	79%	87%	92%	95%					
		IKK.5.5.13 PERSENTASE SMK YANG TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN	69%	75%	81%	86%	90%	95%					

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
		IKK.5.6.17 PERSENTASE TENAGA LABORATORIUM SMA/SMK YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI	5%	10%	20%	30%	40%	50%					
		IKK.5.6.18 PERSENTASE TENAGA ADMINISTRASI SMA/SMK YANG MENGIKUTI PENINGKATAN KOMPETENSI	5%	10%	20%	30%	40%	50%					
		IKK.5.6.19 PERSENTASE TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MEMPEROLEH PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN	10%	15%	20%	25%	30%	35%					
5.7	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PMPTK	IKK.5.7.1 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEPEGAWAIAN	3	3	3	3	3	3	75	79	82	86	89
		IKK.5.7.2 PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN IMPLEMENTASIKEBELAJAAN (JPBSEN)		100%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.5.7.3 TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BSMN (JPBSEN)	90	100%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.5.7.8 PERSENTASE SATKER DITJEN PMPTK BERDAYA-SERAP > 95%	46.30%	51.0%	55.8%	60.5%	65.3%	70%					
		IKK.5.7.9 MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA	0%	45%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.5.7.10 PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KELUANGAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.5.7.11 PERSENTASE SATKER LAPORAN KEUANGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU	97%	99%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.5.7.12 PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBJ	0%	5%	18%	35%	55%	75%					
		IKK.5.7.13 TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN BMN	75%	80%	85%	90%	95%	100%					
		IKK.5.7.14 PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEPEGAWAIAN & UMUM	0%	50%	100%	100%	100%	100%					
IKK.5.7.15 RERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI	232	233	234	235	236	237							
6	PROGRAM DUJUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENDIKNAS	IKU.6.1 PERSENTASE SATKER UPT PUSAT DI DAERAH YANG MENERAPKAN STANDAR ISO 9001-2008		20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	1.232	1.336	1.522	1.708	1.897
		IKU.6.2 UTAMA YANG MENERAPKAN STANDAR ISO 9001-2008		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
		IKU.6.3 SKOR LAKIP KEMENTERIAN	75	76	77	77	78	79					
		IKU.6.4 LAPORAN KEUANGAN UNIT-UNIT UTAMA TERINTEGRASI/TERKONSOLIDASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	75,5	100	100	100	100	100					
		IKU.6.5 PERSENTASE UNIT UTAMA YANG MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA	40	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0					
		IKU.6.6 PERSENTASE SATUAN KERJA YANG TINGKAT KEHADIRAN PEGAWAINYA TIDAK KURANG DARI 99% (BASIS - OHU)	30	95,0	98,0	99,0	100,0	100,0					
		IKU.6.7 PERSENTASE SATKER KEMENTERIAN TERKONEKSI SECARA DARING (ONLINE)	90	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
		IKU.6.8	84	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
		IKU.6.9	60	80	100	100	100	100							
		IKU.6.10	0	-	-	100	100	100							
		IKU.6.11	29	52,0	64,0	76,0	88,0	100,0							
		IKU.6.12	38	510	590	670	725	746							
		IKU.6.13	35	28,0	40,0	52,0	64,0	76,0							
		IKU.6.14	21			100	100	100							
		IKU.6.15	90	90	95	98	98	98							
		IKU.6.16	70%	90%	100%	100%	100%	100%							
6.1	PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA DALAM PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI	IKK.6.1.1	60%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	182	186	190	195	212	
		IKK.6.1.2	10%	28%	46%	64%	82%	100%	100%						
		IKK.6.1.3	4	8	8	8	8	8	8						
		IKK.6.1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.6.1.5		90%	95%	98%	98%	98%	98%						
		IKK.6.1.6	83%	95%	100%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.6.1.7	5%	15%	30%	45%	60%	75%	75%						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
6,2	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DALAM MENUNJANG FUNGSI PELAYANAN UMUM KEMENTERIAN	IKK.6.1.8	20	32	33	34	35	36							
		IKK.6.1.9	70%	90%	100%	100%	100%	100%							
		IKK.6.1.10	50%	70%	95%	100%	100%	100%							
		IKK.6.1.11	1	1	2	3	4	5							
		IKK.6.1.12	70%	80%	100%	100%	100%	100%							
		IKK.6.1.13	0%	60%	100%	100%	100%	100%							
		IKK.6.1.14	2	4	6	8	10	12							
		IKK.6.2.1	27	63	62	62	62	64	172,0	175,6	179,7	184,2	188,1		
		IKK.6.2.2	90	95	99	99	99	100							
		IKK.6.2.3	75	80	85	90	95	95							
		IKK.6.2.4	232	233	234	235	236	237							
		IKK.6.2.5	60	65	70	75	80	85							
		6,3	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DALAM PENGADAAN DAN PENATAAN BMN SERTA SARANA DAN PRASARANA KEMENTERIAN	IKK.6.3.1	90	95,0	95,0	95,0	95,0	98,0	5,5	5,8	6,0	6,3	6,5
				IKK.6.3.2	90	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
IKK.6.4.1				95,0	95,5	96,0	97,0	97,0	124,2	128,5	132,3	135,8	140,5		
IKK.6.4.2	94,5			98,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
6,4	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DI BIDANG PENGELOLAAN ANGGARAN	IKK.6.4.3	97	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
		IKK.6.4.4	3.735 LEMBAGA/ SAT-DIK	3.248 LEMBAGA/ SAT-DIK	2.826 LEMBAGA/ SAT-DIK	2.458 LEMBAGA/ SAT-DIK	2.138 LEMBAGA/ SAT-DIK	1.860 LEMBAGA/ SAT-DIK							

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
6,5	PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN YANG ANDAL	IKK.6.5.1	TINGKAT KETEPATAN LAYANAN KEPEGAWAIAN MENCAPAI 99,75%	99,5	99,8	100,0	100,0	100,0	28,0	29,4	30,7	32,0	33,2	
		IKK.6.5.2	TINGKAT ABSENSI PNS KURANG DARI 2% BERTAHUN	95	98	99	100	100						
		IKK.6.5.3	PERSENTASE KESESUAIAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI PEGAWAI DENGAN TUGAS DAN JABATAN	80,0	85,0	90,0	100,0	100,0						
		IKK.6.5.4	PERSENTASE SATKER YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA	-	-	100,0	100,0	100,0						
6,6	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DI BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI	IKK.6.6.1	SKOR KUALITAS LAKIP KEMENDIKNAS MENURUT PENILAIAN MENDAPAN	75	75	75	75	75	21,0	22,1	23,0	24,0	24,9	
		IKK.6.6.2	PERSENTASE SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJA	85,0	90,0	95,0	98,0	100,0						
		IKK.6.6.3	JUMLAH RANCANGAN PERATURAN SAMBALDENGAN SELOJUV	22	27	32	35	40						
		IKK.6.6.4	PERSENTASE SATUAN KERJA KEMENDIKNAS MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN MUTU BERBASIS ISO 9001:2008	159.489,4	318.945,8	478.402,2	637.858,6	100,0						
6,7	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DI BIDANG INFORMASI DAN KEHUMASAN	IKK.6.7.1	JUMLAH BERITA/ARTIKEL DI MEDIA MASSA YANG POSITIF MENUNJANG KEBIJAKAN KEMENDIKNAS	192	240	288	288	288	35,3	37,1	38,8	40,3	42,0	
		IKK.6.7.2	RANKING CITRA PUBLIK KEMENDIKNAS DI ANTARA KEMENTERIAN/LEMBAGA BERDASARKAN SURVEI LEMBAGA PUBLIK YANG	4	4	3	2	2						
		IKK.6.7.3	JUMLAH LAYANAN INFORMASI PENDIDIKAN	2.186	2.394	2.658	2.775	2.905						
		IKK.6.7.4	PERSENTASE MASYARAKAT YANG MEMAHAMI KEBIJAKAN TENTANG PENDIDIKAN	72	77	82	87	92						
6,8	PENINGKATAN LAYANAN PRIMA DALAM MENUNJANG FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI.	IKK.6.8.1	JUMLAH KUMULATIF PEGAWAI KEMENDIKNAS YANG MENGIKUTI DIKLAT	72.430	76.430	80.430	84.430	88.430	43,2	45,4	47,4	49,3	51,3	
		IKK.6.8.2	INDEK KEPUJASAN PEGAWAI YANG DILATIH TERHADAP PELAYANAN PUSDIKLAT (DALAM SKALA 5)	4	4	4	4,5	5						
		IKK.6.10.1	PERSENTASE MATA PELAJARAN SD YANG BUKU TEKSNYA TELAH DIBELI HAK CIPTANYA (TOTAL 78 JILID MABEL)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	114,0	117,7	122,1	126,1	130,3	
		IKK.6.10.2	PERSENTASE MATA PELAJARAN SMP YANG BUKU TEKSNYA TELAH DIBELI HAK CIPTANYA (TOTAL 47 JILID MABEL)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
IKK.6.10.3	PERSENTASE MATA PELAJARAN SMA YANG BUKU TEKSNYA TELAH DIBELI HAK CIPTANYA (TOTAL 93 JILID MABEL)	56	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
		40	52,0	64,0	76,0	88,0	100,0							
IKK.6.10.4	PERSENTASE MATA PELAJARAN SMK YANG BUKU TEKSNYA TELAH DIBELI HAK CIPTANYA (TOTAL 493 JILID MABEL)	56	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
		40	52,0	64,0	76,0	88,0	100,0							

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
6.10	PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDAYAGUNAAN E-PEMBELAJARAN DAN ADMINISTRASI	IKK.6.10.5 PERSENTASE MATA PELAJARAN SLB YANG BUKU TEKSNYA TELAH DIBELI HAK CIPTANYA (TOTAL 174 JILID, MABEL)	0	10,0	20,0	30,0	40,0	50,0						
		IKK.6.11.1 JUMLAH TITIK TERKONEKSI JARDIKNAS	32.024	33.140	74.855	116.570	158.285	200.000	368,0	444,9	603,5	762,0	910,4	
		IKK.6.11.2 MEMANFAATKAN e-PEMBELAJARAN	41.020	41.020	98.000	127.000	156.000	185.000						
		IKK.6.11.3 JUMLAH SATUAN KERJA YANG MEMANFAATKAN e-ADMINISTRASI	16.294	34.623	52.952	71.281	89.610	107.939						
6.11	PENGGAJIAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELAYANAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	IKK.6.12.1 JUMLAH PUBLIKASI HASIL PENELITIAN PADA JURNAL INTERNASIONAL	40	50	65	80	100	125	101,9	105,0	107,8	111,3	114,0	
		IKK.6.12.2 JUMLAH KOSAKATA HASIL PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
		IKK.6.12.3 JUMLAH TITIK PENGAMATAN BAHASA DAERAH (N=300 TITIK)	50	50	65	65	70							
		IKK.6.12.4 JUMLAH PENGEMBANGAN PUSAT PENGAJARAN BIPA DI LUAR NEGERI (N=30)	5	5	5	5	5	5						
6.12	PENINGKATAN KUALITAS JASMANI PESERTA DIDIK DAN PELAYANAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN	IKK.6.13.1 JUMLAH SEKOLAH SEHAT PERCOTOHAN YANG TERSEBAR MERATA DI SELURUH KAB/KOTA	400	700	1.000	1.300	1.600	1.900	25,0	26,3	27,4	28,5	29,7	
		IKK.6.13.2 JUMLAH KANTIN SEHAT SEKOLAH YANG TERSEBAR DI SELURUH KAB/KOTA	288	500	1.000	2.000	4.000	5.000						
		IKK.6.13.3 PERSENTASE TINGKAT KEBUGARAN JASMANI PESERTA DIDIK PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH LOB MAL DENGAN KATEGORI BAIK	6,1	9,1	12,1	15,1	18,1	21,1						
		IKK.6.13.4 JUMLAH SISWA BERPERAN SEBAGAI KADER SERBAYA ANTI NARKOBA DAN HIV/AIDS	50400	75.600	100.800	126.000	151.200	176.400						
6.13	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH (PTJ) DI ASIA TENGGARA	IKK.6.14.1 JUMLAH MODEL PTJ BERBASIS ICT YANG DIKEMBANGKAN UNTUK KAWASAN ASIA TENGGARA	3	4	5	6	7	8	12,0	12,6	13,2	13,7	14,2	
		IKK.6.14.2 JUMLAH PENELITIAN PENGEMBANGAN, DAN EVALUASI DI BIDANG PENDIDIKAN TERBUKA DAN JARAK JAUH (PTJ)	30	35	50	70	85	100						
		IKK.6.14.3 JUMLAH INSTITUSI DI KAWASAN ASIA TENGGARA YANG TERLAYANI MELALUI PELATIHAN DAN KONSULTASI BIDANG PTJ	84	100	150	200	250	300						
7	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENDIKNAS	IKU7.1 PERSENTASE SATKER DENGAN TEMUAN AUDIT BERKONSEKUENSI PENYETORAN KE KAS NEGARA > 500 JUTA	21,0%	18,0%	15,0%	12,0%	9,0%	6,0%	222	231	240	249	260	
		IKU7.2 PERSENTASE SATKER DI LINGKUNGAN KEMENDIKNAS MEMILIKI SPI	8,5%	45%	80%	100%	100%	100%						
		IKU7.3 PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT	72,2%	73,3%	75,1%	76,9%	78,8%	80,7%						
7.1	PENGUATAN DAN PERLUASAN PENGAWASAN YANG AKUNTABEL WILAYAH	IKK.7.1.1 JUMLAH LAPORAN HASIL AUDIT PADA DITJEN MANDIKASMEN DAN ITJEN YANG DISAMPAIKAN KEPADA INSPEKTUR JENDERAL KEMENDIKNAS	2	2	2	2	2	2	33	34	36	37	39	

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)						
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
7.4	PENGUATAN DAN PERLUASAN PENGAWASAN YANG AKUNTABEL WILAYAH IV	IKK.7.2.3 PERSENTASE SATUAN KERJA YANG DIAUDIT PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJANYA SAMPAI DENGAN ESELON IV PADA DITJEN DIKTI, DITJEN PNFI, BALITBANG, DAN PERGURUAN TINGGI, SERTA UPT DI PROPINSI : SUMBAR, DKI JAKARTA, DI YOGYAKARTA, KALTIM, GORONTALO, MALUKU UTARA, PAPUA	0	30,0	75,0	100,0	100,0	100,0							
		IKK.7.2.4 PERSENTASE PEMBINAAN TEKNIS PENGAWASAN TERHADAP SPI PADA UNIT KERJA DLUWILAYAH INSEKTORBAT III	0	45,0	65,0	85,0	100,0	100,0							
		IKK.7.3.1 JUMLAH LAPORAN HASIL AUDIT PADA DITJEN PMPTK YANG DISAMPAIKAN KEPADA INSEKTUR JENDERAL KEMENDIKNAS.	1	1	1	1	1	1	33	34	36	37	39		
		IKK.7.3.2 PERSENTASE SATKER DENGAN TEMUAN AUDIT BERKONSEKUENSI PENYETORAN KE KAS NEGARA > 500 JUTA PADA DITJEN PMPTK, LPMP JAKARTA, P4TK BAHASA, DAN PERGURUAN TINGGI, SERTA UPT DI PROPINSI : SUMUT, JAMBI, BABEL, JATENG, BALI, KALTENG, SULSEL, SULBAR, DAN SULTENG.	21,0%	18,0%	15,0%	12,0%	9,0%	6,0%							
7.5	AUDIT INVESTIGASI	IKK.7.3.3 PERSENTASE SATUAN KERJA YANG DIAUDIT PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS KINERJANYA SAMPAI DENGAN ESELON IV PADA DITJEN PMPTK, LPMP JAKARTA, P4TK BAHASA, DAN PERGURUAN TINGGI, SERTA UPT DI PROPINSI : SUMUT, JAMBI, BABEL, JATENG, BALI, KALTENG, SULSEL, SULBAR, DAN SULTENG.	0	30,0	70,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
		IKK.7.3.4 PERSENTASE PEMBINAAN TEKNIS PENGAWASAN TERHADAP SPI PADA UNIT KERJA DLUWILAYAH INSEKTORBAT IV	0	45,0	65,0	85,0	100,0	100,0							
		IKK.7.5.1 PERSENTASE KASUS YANG BERINDIKASI KKN DAN ATAU PELANGGARAN BERAT PADA SELURUH SATUAN KERJA PENGELOLA DANA APBN YANG TELAH DILAKUKAN FACT FINDING DI ALAT LALU LINTAS INVESTIGASI	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	3	3	3	3	3		
		IKK.7.5.2 PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG TELAH DILAKUKAN KAJIAN.	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
		IKK.7.5.3 PERSENTASE HASIL PENGAWASAN REGULER YANG TELAH DILAKUKAN KAJIAN.	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
		IKK.7.5.4 PERSENTASE KASUS YANG TELAH DIAUDIT DENGAN INVESTIGASI DAN ATAU DIAUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PERMINTAAN MENTRI/ALAT LALU LINTAS UNIT KERJA	100	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0							
		IKK.7.6.1 JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEPEGAWAIAN DITJEN MPDM	3	3	3	3	3	3	88	90	93	96	101		
		IKK.7.6.2 PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN DAN IMPLEMENTASI KEBLIKAAN (PERSEN)		100%	100%	100%	100%	100%							

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
IKK.7.6.3		TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BMN (PERSEN)	90	100%	100%	100%	100%	100%						
IKK.7.6.8		PERSENTASE SATKER DITJEN PMPTK BERDAYA-SERAP > 95%	46.30%	51.0%	55.8%	60.5%	65.3%	70%						
IKK.7.6.9		PERSENTASE SATKER YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA	0%	45%	100%	100%	100%	100%						
IKK.7.6.10		PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KELUANGAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
IKK.7.6.11		PERSENTASE SATKER LAPORAN KEUANGANNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU	97%	99%	100%	100%	100%	100%						
IKK.7.6.12		PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBI	0%	5%	18%	35%	55%	75%						
IKK.7.6.13		TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN BMN	75%	80%	85%	90%	95%	100%						
IKK.7.6.14		PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEPEGAWAIAN & UMUM	0%	50%	100%	100%	100%	100%						
IKK.7.6.15		RERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI	232	233	234	235	236	237						
IKK.7.6.16		PERSENTASE SATKER PUSAT MEMILIKI SPI	8.5%	50%	100%	100%	100%	100%						
IKK.7.6.17		PERSENTASE SATKER UPT MEMILIKI SPI	8.5%	40%	60%	100%	100%	100%						
IKK.7.6.18		PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT ITJEN	90.1%	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0						
IKK.7.6.19		PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT BPKP	74.6%	76.1%	77.6%	79.0%	80.5%	0.8						
IKK.7.6.20		PERSENTASE PENYELESAIAN TEMUAN AUDIT BPK-RI	51.8%	52.8%	55.8%	58.8%	61.8%	0.7						
IKK.7.6.21		PERSENTASE SDM ITJEN YANG TELAH MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI												
IKK.7.6.6		- STANDAR KOMPETENSI AUDITOR PENDIDIKAN	90	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
IKK.7.6.7		- PENGELOLAAN ANGGARAN	40	50,0	60,0	70,0	80,0	100,0						
IKK.7.6.8		- BIDANG SUBSTANSI	70	85,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
IKK.7.6.9		- BIDANG INVESTIGASI	60	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0						
IKK.7.6.10		- AUDIT BERBASIS TEKNOLOGI/INFORMASI	15	50,0	75,0	100,0	100,0	100,0						
IKU8.1	8	PERSENTASE SATUAN PAUD FORMAL DIAKREDITASI	48.2%	55.6%	62.9%	70.3%	77.6%	85.0%	1.048	1.263	1.327	1.393	1.462	
IKU8.2		PERSENTASE SATUAN PAUD NONFORMAL DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	2.5%	6.0%	10.0%	15.0%						
IKU8.3		PERSENTASE SD/SDLB DIAKREDITASI	65.4%	70.2%	77.5%	84.9%	92.2%	100%						
IKU8.4		PERSENTASE PROGRAM PAKET A DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	27.0%	40.0%						
IKU8.5		PERSENTASE SMP/SMP/PLB DIAKREDITASI	0,61	66.8%	74,1%	81,5%	88,8%	100%						
IKU8.6		PERSENTASE PROGRAM PAKET B DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	27.0%	40.0%						
IKU8.7		PERSENTASE SMA/SM/SLB/SMK DIAKREDITASI	64.7%	70.7%	78,0%	85,4%	92,7%	100%						
IKU8.8		PERSENTASE PROGRAM PAKET C DIAKREDITASI	2.0%	5.0%	10.0%	22.0%	35.0%	50.0%						
IKU8.9		PERSENTASE PROGRAM PAKET C KEJURUAN DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	25.0%						
IKU8.10		PERSENTASE PRODI PT DIAKREDITASI	69.6%	73.7%	81,0%	88,4%	95,7%	95%						
IKU8.11		JUMLAH PRODI DIAKREDITASI INTERNASIONAL	47	47	57	57	57	94						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
		IKU8.12	PERSENTASE PROGRAM KEAHLIAN LKP DIAKREDITASI	3%	6%	11%	17%	24%	30%					
		IKU8.13	PERSENTASE PKBM DIAKREDITASI	1.3%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%					
		IKU8.14	JUMLAH MODEL PEMBELAJARAN PAUD	2	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0					
		IKU8.15	PERSENTASE PAUD YANG MENGEMBANGKAN PEMBELAJARAN SECARA MANDIRI	24%	31%	38%	45%	52%	60%					
		IKU8.16	JUMLAH MODEL KURIKULUM DIKDas	17	19.0	20.0	20.0	20.0	20.0					
		IKU8.17	PERSENTASE SATUAN DIKDas YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM SECARA MANDIRI	32%	39%	46%	53%	60%	67%					
		IKU8.18	JUMLAH MODEL KURIKULUM DIKMen	7	11	12	12	12	12					
		IKU8.19	PERSENTASE SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM SECARA MANDIRI	33.5%	46%	57%	68%	79%	90%					
8.1	FASILITASI STANDAR MUTU DAN PELAKSANAAN AKREDITASI	IKK.8.1.1	PERSENTASE SATUAN PAUD FORMAL	48.2%	55.6%	62.9%	70.3%	77.6%	85.0%	728	917	962	1.010	1.056
		IKK.8.1.2	PERSENTASE SATUAN PAUD NONFORMAL	0.0%	0.0%	2.5%	6.0%	10.0%	15.0%					
		IKK.8.1.3	PERSENTASE SD/SDLB DIAKREDITASI	65.4%	70.2%	75.2%	80.1%	85.1%	90.0%					
		IKK.8.1.4	PERSENTASE PROGRAM PAKET A DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	27.0%	40.0%					
		IKK.8.1.5	PERSENTASE SMP/SMPLB DIAKREDITASI	0.61	66.8%	72.6%	78.4%	84.2%	90.0%					
		IKK.8.1.6	PERSENTASE PROGRAM PAKET B DIAKREDITASI	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	27.0%	40.0%					
		IKK.8.1.7	PERSENTASE SMA/SMLB DIAKREDITASI	64.7%	70.7%	76.8%	82.9%	88.9%	95.0%					
		IKK.8.1.8	PERSENTASE PROGRAM PAKET C DIAKREDITASI	2.0%	5.0%	10.0%	22.0%	35.0%	50.0%					
		IKK.8.1.9	PERSENTASE PROGRAM PAKET C KEJURUAN	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	25.0%					
		IKK.8.1.10	PERSENTASE PRODI DIAKREDITASI	69.6%	73.7%	77.8%	81.8%	85.9%	90.0%					
		IKK.8.1.11	JUMLAH PRODI DIAKREDITASI INTERNASIONAL	47	47	57	57	57	94					
		IKK.8.1.12	PERSENTASE PROGRAM KEAHLIAN LKP	3%	6%	11%	17%	24%	30%					
		IKK.8.1.13	PERSENTASE PKBM DIAKREDITASI	1.3%	5.0%	10.0%	15.0%	20.0%	25.0%					
		IKK.8.1.14	JUMLAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG		2	1	1	1	1					
		IKK.8.1.15	JUMLAH RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH		6	8	8	6	6					
8.2	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIK LAINNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDIKNAS	IKK.8.2.1	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEPEGAWAIAN	3	3	3	3	3	3	75	79	83	86	90
		IKK.8.2.2	PENYUSUNAN , PENYAMPAIAN DAN IMPLEMENTASIKEBLAKAAN (PERSEN)		100%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.8.2.3	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN SAK DAN SIMAK BMN (PERSEN)	90	100%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.8.2.8	PERSENTASE SATKER DITJEN PIVPPTK BERDAYA-SERAP > 95%	46.30%	51.0%	55.8%	60.5%	65.3%	70%					
		IKK.8.2.9	PERSENTASE SATKER YANG TELAH MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KINERJA	0%	45%	100%	100%	100%	100%					
		IKK.8.2.10	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEUANGAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%					

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET				PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)							
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014			
8.3	PENYEMPURNAAN SISTEM PEMBELAJARAN	IKK.8.2.11	PERSENTASE SATKER LAPORAN KEANGGANYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN TEPAT WAKTU	97%	99%	100%	100%	100%							
		IKK.8.2.12	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-PENGADAAN > 50% PAKET PBI	0%	5%	18%	35%	55%	75%						
		IKK.8.2.13	TINGKAT KETERTIBAN PENGELOLAAN BMIN	75%	80%	85%	90%	95%	100%						
		IKK.8.2.14	PERSENTASE SATKER MENERAPKAN E-KEPEGAWAIAN & UMUM	0%	50%	100%	100%	100%	100%						
		IKK.8.2.15	IRERATA HARI KERJA EFEKTIF PEGAWAI	232	233	234	235	236	237						
		IKK.8.2.16	JUMLAH SNP YANG DIKEMBANGKAN	5	5	5	5	5	5						
		IKK.8.2.17	JUMLAH PEMANTAUAN DAN EVALUASI SNP	9	6	9	7	10	8						
		IKK.8.2.18	JUMLAH PENYEMPURNAAN SNP	-	-	-	3	3	2						
		IKK.8.2.19	JUMLAH LAPORAN KERJASAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL (WTO, APEC, SEAMEO, INNOTECH, OECD, IEA, ICCS, F-BNET, PMBI)	10	10	10	10	10	10						
		IKK.8.2.20	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI JARINGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	1	1	1	1						
		IKK.8.2.21	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMBENTUK JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN	206	60	70	70	70	61						
		IKK.8.3.1	JUMLAH MODEL PEMBELAJARAN TK YANG DIHASILKAN	1	1	1	1	1	1						
		IKK.8.3.2	PERSENTASE TK YANG MENGEMBANGKAN PROGRAM PEMBELAJARAN AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN KAPABERDAYA	24,0%	31,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%						
		IKK.8.3.3	PERSENTASE TKLB YANG MENGEMBANGKAN PROGRAM PEMBELAJARAN AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN KAPABERDAYA	24,0%	31,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%						
		IKK.8.3.4	PERSENTASE PAUD NON FORMAL YANG MENGEMBANGKAN PROGRAM PEMBELAJARAN AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN KAPABERDAYA	24,0%	31,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%						
		IKK.8.3.5	JUMLAH MODEL KURIKULUM SD/MI	3	1	4	4	4	4						
		IKK.8.3.6	JUMLAH MODEL KURIKULUM SDLB DAN SMP/IB	6	2	6	6	6	6						
		IKK.8.3.7	JUMLAH MODEL KURIKULUM PAKET A	4	1	4	4	4	4						
		IKK.8.3.8	JUMLAH MODEL KURIKULUM SMP/MTS	3	1	3	3	3	3						
IKK.8.3.9	JUMLAH MODEL KURIKULUM PAKET B	1	1	2	2	2	2								
IKK.8.3.10	PERSENTASE SD/SDLB/PAKET A YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM DENGAN PEMBELAJARAN AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEWIRAUSAHAAN DAN KAPABERDAYA	32,0%	39,0%	50,0%	65,0%	80,0%	100,0%								

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
IKK.8.3.11		PERSENTASE SMP/SMPLB/PAKET B YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM DENGAN PEMBELAJARAN AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEMERDEKAAN DAN KAWALAN DIRI	33,0%	42,0%	50,0%	65,0%	80,0%	100,0%					
IKK.8.3.12		JUMLAH MODEL KURIKULUM SMA/MA YANG DIHASILKAN	2	1	3	3	3	3					
IKK.8.3.13		JUMLAH MODEL KURIKULUM SMK/MAK YANG DIHASILKAN	4	1	5	5	5	5					
IKK.8.3.14		JUMLAH MODEL KURIKULUM SMLB	-	1	2	2	2	2					
IKK.8.3.15		JUMLAH MODEL KURIKULUM PAKET C	1	1	1	1	1	1					
IKK.8.3.16		PERSENTASE SMA/MA YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM DENGAN PEMBELAJARAN AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEMERDEKAAN DAN KAWALAN DIRI	31%	42%	50%	65%	80%	100%					
IKK.8.3.17		PERSENTASE SMK/MAK YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM DENGAN PEMBELAJARAN AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEMERDEKAAN DAN KAWALAN DIRI	36%	46%	50%	65%	80%	100%					
IKK.8.3.18		PERSENTASE PAKET C YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM DENGAN PEMBELAJARAN AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEMERDEKAAN DAN KAWALAN DIRI	-	18%	40%	60%	80%	100%					
IKK.8.3.19		PERSENTASE SMLB YANG MENGEMBANGKAN KURIKULUM DENGAN PEMBELAJARAN SECARA AKTIF YANG MENGHASILKAN LULUSAN YANG KREATIF, MEMILIKI JIWA KEMERDEKAAN DAN KAWALAN DIRI	-	18%	40%	60%	80%	100%					
IKK.8.3.20		PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN KURIKULUM ORANG DEWASA BERKELANJUTAN SECARA MANDIRI	-	25%	40%	60%	80%	100%					
IKK.8.3.21		JUMLAH MODEL KURIKULUM UNTUK PENDIDIKAN ORANG DEWASA BERKELANJUTAN	1	1	1	1	1	1					
IKK.8.3.21		JUMLAH STANDAR KOMPETENSI PENDIDIKAN KEWIRUSAHAAN, BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA PADA TINGKAT NASIONAL, DAERAH DAN SEKOLAH	-	-	1	1	-	-					
IKK.8.3.22		JUMLAH PROPINSI YANG MEMPEROLEH BANTUAN TEKNIS PENGEMBANGAN KURIKULUM SETIAP TAHUN		33	33	33	33	33					
IKK.8.3.23		JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMPEROLEH BANTUAN TEKNIS PENGEMBANGAN KURIKULUM MINIMAL 3 KALI DALAM LIMA TAHUN		200	300	300	300	300					

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET						PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
8.4	PENYEDIAAN DATA PENDIDIKAN	IKK.8.3.24	JUMLAH DOKUMEN SEBAGAI MASUKAN KEBIAYAAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM	-	10	10	10	10	10	10				
		IKK.8.4.1	PERSENTASE TK/TKLB/PAUD NON FORMAL YANG JUMLAH DATANYA TEREMAJAKAN DALAM PADATI-WEB DIRINCI MENURUT KABUPATEN/KOTA	50%	61,0%	75,0%	86,0%	90,0%	92,0%	131	137	144	152	160
		IKK.8.4.2	PERSENTASE DATA SD/SDLB/MI YANG JUMLAH DATANYA TEREMAJAKAN DALAM PADATIWEB DIRINCI MENURUT KABUPATEN/KOTA	56%	62,0%	69,0%	77,0%	86,0%	92,0%					
		IKK.8.4.3	PERSENTASE DATA SMP/SMPLB/MTs YANG JUMLAH DATANYA TEREMAJAKAN DALAM PADATIWEB DIRINCI MENURUT KABUPATEN/KOTA	34%	42,0%	51,0%	63,0%	77,0%	94,0%					
		IKK.8.4.4	PERSENTASE DATA PAKET A/PAKET B YANG JUMLAH DATANYA TEREMAJAKAN DALAM PADATIWEB DIRINCI MENURUT KABUPATEN/KOTA	-	25,0%	45,0%	60,0%	80,0%	95,0%					
		IKK.8.4.5	PERSENTASE SMA/SMK/SMLB/MA/MAK/PAKET C YANG JUMLAH (ENTITAS) DATANYA TEREMAJAKAN (UP TO DATE) DALAM PADATI-WEB DIRINCI MENURUT KAB/KOTA	34%	41,0%	50,0%	61,0%	74,0%	90,0%					
		IKK.8.4.6	PERSENTASE PENDUDUK MELEK HURUF USIA ≥ 15 TAHUN YANG JUMLAH DATANYA TEREMAJAKAN DALAM PADATIWEB DIRINCI BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN JENIS KEAKSARAAN YANG DIKUASAI PER KABUPATEN/KOTA	15%	20,0%	40,0%	50,0%	60,0%	80,0%					
		IKK.8.4.7	PERSENTASE DATA PELAKSANA PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER YANG JUMLAH DATANYA TEREMAJAKAN (UP TO DATE) DALAM PADATI-WEB DIRINCI MENURUT KABUPATEN/KOTA	15%	20,0%	40,0%	50,0%	60,0%	80,0%					
		IKK.8.4.8	PERSENTASE LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN BER AKREDITASI YANG JUMLAH DATANYA TEREMAJAKAN DALAM PADATIWEB DIRINCI MENURUT BIDANG KETERAMPILAN PER KABUPATEN/KOTA	15%	20,0%	40,0%	50,0%	60,0%	80,0%					
		IKK.8.4.9	PERSENTASE PESERTA UJI KOMPETENSI PENDIDIKAN ORANG DEWASA BERKELANJUTAN YANG JUMLAH DATANYA TEREMAJAKAN DALAM PADATI-WEB DIRINCI MENURUT JENIS KOMPETENSI PER KABUPATEN/KOTA	10%	20,0%	30,0%	40,0%	50,0%	60,0%					
IKK.8.4.10	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENIMPLEMENTASIKAN SISTEM INFORMASI PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN	-	75	75	75	75	75	75						

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

**BIDANG PEMBANGUNAN : SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2009)	TARGET					PROYEKSI ANGGARAN (Rp. Miliar)							
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
8.5	PENYEDIAAN INFORMASI UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN NASIONAL	IKK.8.5.1	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG PAUD	0	2	2	2	2	2	2	21	22	23	24	25	
		IKK.8.5.2	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG SD/MI/PAKET A	0	2	2	2	2	2	2	2					
		IKK.8.5.3	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG SMP/MTS/PAKET B	0	2	2	2	2	2	2	2	3				
		IKK.8.5.4	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG SMA/MA/PAKET C	0	2	2	2	2	2	2	2	3				
		IKK.8.5.5	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG SMK	1	3	3	4	4	4	4	4	4				
		IKK.8.5.6	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG POLITEKNIK	0	-	1	2	2	2	2	2	2				
		IKK.8.5.7	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG UNIVERSITAS	1	2	2	2	2	2	2	2	2				
		IKK.8.5.8	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG KURSUS DAN PENDIDIKAN ORANG DEWASA	0	2	3	3	4	4	5	5	5				
		IKK.8.5.9	JUMLAH LAPORAN RISET KEBIJAKAN TENTANG JINTAS, LENJANG, PENDIDIKAN	1	5	5	5	5	5	5	5	5				
		IKK.8.5.10	JUMLAH LAPORAN INOVASI PENDIDIKAN	3	5	5	5	5	5	5	5	5				
		8.6	PENYEDIAAN INFORMASI HASIL PENILAIAN PENDIDIKAN	IKK.8.6.1	PERSENTASE PAUD FORMAL YANG TERPETAKAN KESIAPAN BELAJARNYA	0%	5%	10%	15%	25%	30%	42	44	47	50	54
IKK.8.6.2	PERSENTASE PAUD NON FORMAL YANG TERPETAKAN KESIAPAN BELAJARNYA			0%	5%	10%	15%	25%	30%	42	44	47	50	54		
IKK.8.6.3	PERSENTASE GURU SD/SDLB YANG TERPETAKAN KOMPETENSINYA			0%	10%	15%	20%	25%	30%	42	44	47	50	54		
IKK.8.6.4	JUMLAH SOAL UASBN + PAKET A (BHS IND, IPA, MATH)			5100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
IKK.8.6.5	PERSENTASE BANTUAN PROFESIONAL PENILAIAN DI KAB./KOTA			15%	25%	50%	60%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
IKK.8.6.6	PERSENTASE GURU SMP/SMPLB YANG TERPETAKAN KOMPETENSINYA			0%	20%	30%	40%	50%	60%	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
IKK.8.6.7	JUMLAH SOAL UNTUK BANK SOAL UN SMP DAN PAKET B			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
IKK.8.6.8	PERSENTASE GURU DIKEMEN YANG DIPETAKAN KOMPETENSINYA			0	40%	60%	70%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
IKK.8.6.9	JUMLAH BANK SOAL UB SMA/SMLB, SMK DAN PAKET C			16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	
IKK.8.6.10	JUMLAH SOAL NON KOGNITIF			7.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
IKK.8.6.11	JUMLAH LAPORAN SURVAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL TENTANG HASIL BELAJAR			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
20. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
21. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan di pusat dan sebagai acuan bagi setiap penyelenggara pembangunan dan pengembangan pendidikan di daerah.
- (2) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan ke dalam rencana program jangka menengah unit utama.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H. M.H., DFM
NIP 196108281987031003